LAKIP20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar. Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2020. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan triwulan keempat Tahun 2020 yang merupakan kegiatan pertama setelah berakhirnya Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2015 – 2019. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di triwulan berjalan dan secara umum untuk tahun mendatang.

Kami berupaya menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Interim ini secara runut untuk periode Tahun 2020 dimana sejumlah capaian kinerja pertriwulan dalam dokumen Recana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar dituangkan dalam laporan ini, yang merupakan gambaran capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2020 sesuai Rencana Strategis 5 (Lima) tahunan, serta perjanjian Kinerja tahunan.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Makassar, 19 Februari 2021

KEPALA,

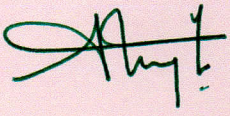

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Ringkasan Eksekutif

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Laporan Kinerja Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, Pengukuran Kinerja tahun 2020, Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2020, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2020. Terdapat 11 sasaran Strategis dengan 28 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2020 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.
Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja Utama yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Capaian kinerja pada laporan ini merupakan gabungan dari capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Palopo selama tahun 2020. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada tahun 2020.

pada *Stekholders Perspective* dengan nilai tertinggi pada sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai 105,46 kategori **Baik.**

Persepctive *Internal Proses* seluruh sasaran Strategis dapat dicapai dan hanya satu sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis ketujuh "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" dengan nilai 146,33 kategori Tidak dapat disimpulkan , sasaran Strategis keenam yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai 117,72 kategori sangat Baik, sedangkan 2 sasaran Strategis yang lainnya yaitu sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar dan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik dengan nilai masing-masing 103,65 dan 102,13.

Pada learning and growth perspective sasaran Strategis yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal dan sasaran Strategis Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan tidak dapat dicapai oleh BBPOM di Makasar dengan kategori **cukup dengan nilai masing-masing 77,37 dan 88,51**; sedangkan 2 sasaran Strategis yang lainnya yaitu sasaran Strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal dan Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel kategori Baik dengan nilai masing-masing 97,99 dan 106,86.

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		
Ringkasan Eksekutif		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
1. Pendahuluan		
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Gambaran Umum Organisasi	2
	Tugas dan Fungsi Unit kerja	3
	Aspek Strategis	5
1.3.	Struktur Organisasi	6
1.4.	Isu Strategis	11
	Arah Kebijakan dan strategi BBPOM Makassar	17
	Aspek Strategi Organisasi	25
2. Perencanaan Kinerja		
2.1.	Rencana Strategis	30
2.2.	Rencana Kinerja Tahun (RKT)	50
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK)	52
2.4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	56
2.5.	Kriteria Pencapaian Indikator	59
3. AkuntabilitasKinerja		
3.1.	Capaian Kinerja	62
3.2.	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	77
3.3.	Realisasi Anggaran	201
3.4.	Analisis Efisiensi Kegiatan	207
4. Penutup		295
4.1.	Kesimpulan	295
4.2.	Saran	215
Lampiran		

Daftar Tabel

1.1. Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 202
2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 BBPOM di Makassar
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar
2.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
3.1 Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.2 Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.3 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategi
3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020
3.5 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.6 Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.8 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2020
3.9 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.10 Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.12 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020
3.13 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2019 dengan Tahun 2020

3.14 Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.15 Capaian Kinerja Indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020
3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020
3.17 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.18 Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024.
3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.20 Target Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020
3.21 Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020
3.22 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.23 Perbandingan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.24 Capaian Kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.25 Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020
3.26 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.27 Capaian Kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta secara Nasional Tahun 2020
3.28 Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020
3.29 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.30 Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.31 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

3.32 Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar tahun 2020
3.33 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.34 Perbandingan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.35 Capaian Kinerja Indikator Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.36 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.37 Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.38 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.39 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2020
3.40 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.41 Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.42 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.43 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020
3.44 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.45 Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.46 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.47 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020
3.48 Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

3.49 Perbandingan realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.50 Capaian Kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.51 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020
3.52 Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.53 Perbandingan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.54 Capaian Kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.55 Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020
3.56 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.57 Perbandingan realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.58 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.59 Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020
3.60 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.61 Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.62 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.63 Target Kinerja Indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2020
3.64 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.65 Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.66 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020
3.67 Jumlah desa pangan aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.68 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.69 Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

3.70 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.71 Target Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020
3.72 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.73 Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.74 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.75 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2020
3.76 Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020
3.77 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.78 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.79 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.80 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2020
3.81 Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020
3.82 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.83 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.84 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.85 Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2020
3.86 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020
3.87 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.88 Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.89 Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.90 Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM
3.91 Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

3.92 Target Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.93 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.94 Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB UPT Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.95 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.96 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.
3.97 Capaian Rincian bobot komponen pengungkit penilaian BBPOM di Makassar
3.98 Target Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.99 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.100 Perbandingan realisasi Indikator Nilai AKIP UPT Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.101 dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.102 Target Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.103 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.104 Perbandingan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.105 Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.106 Target Kinerja Indikator Persentase Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020
3.107 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.108 Perbandingan realisasi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.109 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.110 Capaian penilaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
3.111 Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020
3.112 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.113 Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.114 Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

3.115 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.116 Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.117 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.118 Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.119 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.120 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
3.121 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
3.122 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020
3.123 Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024
3.124 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional
3.125 Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
3.126 Data Sasaran Strategis dan Realisasi Penyerapan Anggaran TW I,TW II , TW III dan TW IV tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar
3.127 Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar Tahun 2020
3.128 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja
3.129 Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

Daftar Gambar

1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.
1.2. Struktur Organisasi Loka Pom di Palopo berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018
1.3. Empat Pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024
1.4. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024
1.5. Arah Kebijakan BPOM 2020-2024
1.6. Strategi BPOM 2020-2024
1.7. Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024
1.8. Hasil Analisis SWOT
2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan
2.3 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar
2.1 *Sumber: Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2020*
2.2 Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020
3.1 Dashboard Peta Strategi E-Performance BBPOM di Makassar
3.2 Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2020
3.3 Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.4 Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.5 Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020
3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020
3.7 Jumlah Sampel makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2020
3.8 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020
3.9 Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

3.10 Capaian Kinerja Indikator persentase Obat yang aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

3.11 Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

3.12 Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

3.13 Capaian Kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

3.14 Capaian Kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta secara Nasional Tahun 2020

3.15 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

3.16 Capaian Kinerja Indikator Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

3.17 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.18 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.19 Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun 2020

3.20 Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.21 Jumlah Sarana Produksi nyang diperiksa Tahun 2020

3.22 Capaian Kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.23 Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa Tahun 2020

3.24 Capaian Kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.25 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.26 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.27 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.28 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.29 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.30 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.32 Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

3.33 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.34 Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

3.35 Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.36 Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2020
3.37 Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA Tahun 2020
3.38 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.
3.39 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020
3.40 Pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Agenda Prioritas
Realisasi Anggaran
Kinerja Lain
Evaluasi Internal

Bab 1

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI
B. ASPEK STRATEGIS
C. ISU STRATEGIS

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja BBPOM Makssar Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dan awal dari Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BBPOM di Makassar. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja BBPOM di Makassar dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Kementerian BBPOM di Makassar.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PPNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Badan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan menunjuk Balai Besar POM di Makassar untuk mengkoordinasikan Loka POM di Kota Palopo. Hal ini tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Berdasarkan PeraturanBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka tugas, fungsi BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

TUGAS

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan

FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi obat dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakatdi bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM RI

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Makassar yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen produk Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Karenanya Balai Besar POM di Makassar selalu berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Sedangkan tugas dari Loka POM di Kota Palopo adalah :

> Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Aspek Strategis

Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan berada pada bagian sentra kepulauan Indonesia, dengan Selat Makassar telah ditetapkan sebagai salah satu jalur pelayaran internasional, menjadikannya sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (centre point of Indonesia) yang tidak pernah sepi dari aktifitas perdagangan baik domestik maupun internasional. Kondisi ini menjadi poin penting menunjukkan peran Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus pengawasan Balai Besar POM di Makassar di tahun pertama periode Renstra 2020-2024 antara lain :

- Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan

- ❖ Peningkatan kapasitas SDM dan Pemangku Kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKN di Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan keamanan, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
- ❖ Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan
- ❖ Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ❖ Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
- ❖ Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

1.3. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/ Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

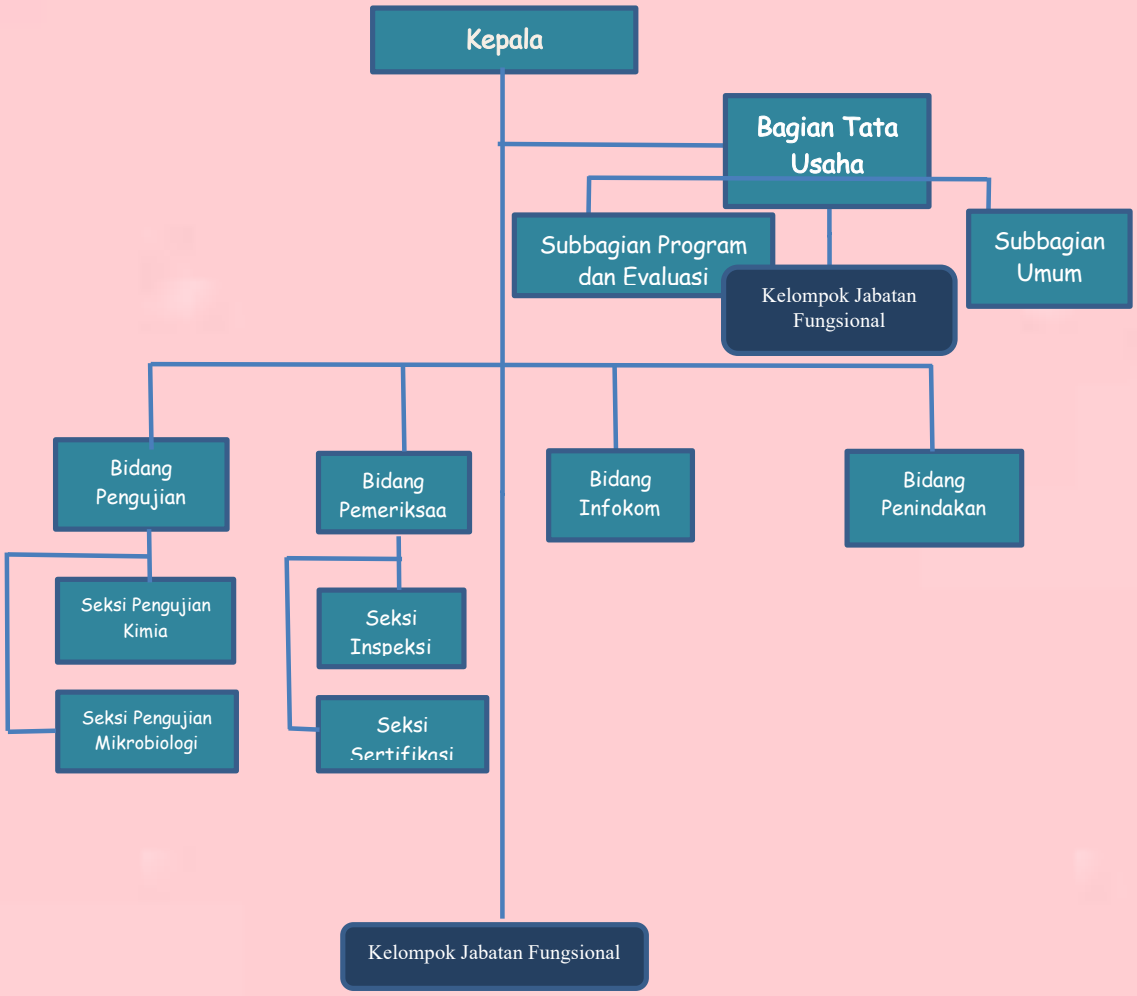

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

1. **Bidang Pengujian**
   Bidang Pengujianmempunyai tugasmelaksanakan kebijakan operasional di bidangpengujiankimiadan mikrobiologiObat dan Makanan.
   Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:
   1. Penyusunanrencanadanprogramdibidangpengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
   2. PelaksanaanpengujiankimiadanmikrobiologiObatdanMakanan;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangpengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

a. Seksi Pengujian Kimia
   Seksi Pengujian Kimiamempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
b. Seksi Pengujian Mikrobiologi
   Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obatdan Makanan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugasmelaksanakan kebijakan operasional di bidanginspeksidan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusiObat dan Makanandansarana/fasilitaspelayanan kefarmasian,serta sertifikasidanpengambilancontoh*(sampling)* produkObat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunanrencanadanprogramdibidanginspeksidan sertifikasisarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obatdan Makanandansarana/fasilitaspelayanan kefarmasian, sertasertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)*produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana / fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat danMakanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana / fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana / fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)*produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

a. Seksi Inspeksi;
   Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusiObat dan Makanan dan sarana/fasilitas

pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan.

b. Seksi Sertifikasi;
   Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang penindakanterhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program dibidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangintelijendan penyidikanterhadap pelanggaran ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidangpengelolaan komunikasi, informasi,edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara,teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi;

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

a. Subbagian Umum;

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun2018 dibentuk 40 Loka POM di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Loka POM di Kota Palopo.

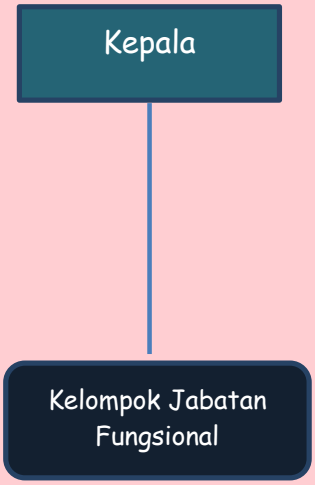

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Loka Pom di Palopo
berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

Tugas dan fungsi Loka POM sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian, yang membedakan adalah wilayah kerja. Cakupan pengawasan Loka POM Palopo yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Enrekang.

1.4 Isu Strategis

Agar pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih tajam, terarah dan mendalam, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan secara lebih terperinci dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan untuk periode Tahun 2019 yaitu "**Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015- 2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya".**

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV

tahun 2020-2024. Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;

4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Gambar 1.3 Empat Pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemertaan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar 1.4 Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah **Pemenuhan Layanan Dasar.** Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper.*
- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, **serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal**.
- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi fokus penting dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan POM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk optimalnya fungsi pengawasan dan perkuatan peran dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak dijamin mutu dan keamanannya sangat dibutuhkan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan.Adanya regulasi dapat memberikan perkuatan pada legal aspek sehingga meningkatkan "kewibawaan" pengawasan.

Sasaran, indikator, serta target BPOM dalam mendukung isu strategis ini adalah

Tabel 1.1

Indikator Terkait Pengawasan Obat dan Makanan dalam RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,8	92.3
2	Persentase makanan yang berkualitas	78	86

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

Isu "**Pemenuhan Layanan Dasar**" dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: **Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: **Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan**, mencakup: **pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan**.

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan Pemangku Kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sector terkait;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 1.5. Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

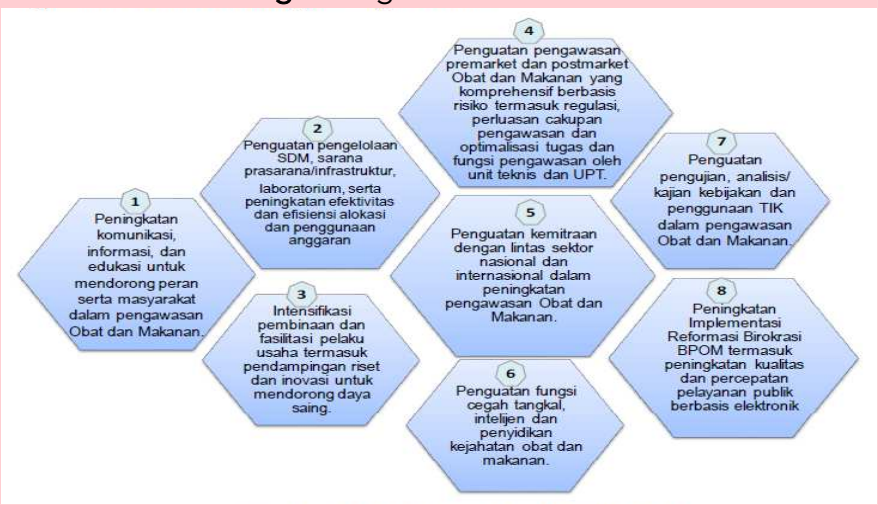

Gambar 3.4 Strategi BPOM 2020-2024

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijaan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI MAKASSAR

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan, adapun arah kebijakan BBPOM di Makassar yang akan dilaksanakan antara lain :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat Sulawesi Selatan dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM dan Pemangku Kepentingan kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKN di Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya peningkatan keamanan, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Penguatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan ;
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BBPOM di Makassar melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan peengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Selatan
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor Pusat maupun Daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

1. **Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

   Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BBPOM di Makassar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

   Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

   a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

   b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

   c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

   Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BBPOM di Makassar mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

   a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai. Pengelolaan SDM berdasarkan sistem manajemen mutu implementasi ISO 9001 : 2019 berbasis kinerja.

   b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian

terakreditasi yang mendukung kualitas pengujian obat dan makanan yang mampu telusur dengan hasil uji terjamin validitasnya. Sistem manajemen mutu Laboratorium yang handal dengan implementasi ISO 17025 : 2018 secara konsisten pada semua proses yang dilakukan.

c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BBPOM di Makassar, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

   Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

   a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

   b. Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM di Makassar juga tentunya Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.

4. **Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh BBPOM di Makassar.**

   Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

   1) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
   2) Pengujian Secara Laboratorium;
   3) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

   Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar dan Loka POM Palopo), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditujukan agar BBPOM di Makassar dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Penguatan kemitraan dengan lintas sektor pusat maupun darah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

   Strategi ini merupakan upaya BBPOM di Makassar dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

   Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

   a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.

b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

c. Koordinasi pengawasan bersama pemerintah daerah dan lintas sector terkait yang berperan dalam penerapan Inpres no.3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan keamanan obat dan makanan.

d. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan.

Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.

c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BBPOM di Makassar dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BBPOM di Makassar harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

   Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BBPOM di Makassar harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

   a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
   b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
   c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
   d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

   Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan *(continuous improvement).*

b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.

c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara otpimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.7
Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2020:

  Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:

Gambar 1.8. Hasil Analisis SWOT

ASPEK STRATEGI ORGANISASI

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per November 2020 adalah sejumlah 125 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Sedangkan jumlah SDM di Loka POM di Kota Palopo adalah sebanyak 16 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.

Tabel 1.1
Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

BBPOM DI MAKASSAR			LOKA POM DI KOTA PALOPO		
Tingkat Pendidikan	**Jumlah**	**Persentase**	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**
Non Sarjana	16	12,80 %	Non Sarjana	1	6,25 %
S1	39	31,20 %	S1	15	93,75%
Profesi	50	40 %	Profesi	6	%
• **Apoteker**	**50**	40 %	• **Apoteker**	**6**	%
• **Non Apoteker**		0 %	• **Non Apoteker**	**9**	0 %
S2	20	16 %	S2	1	0 %
S3	0	0%	S3	0	0%
Total	**125**	**100 %**	**Total**	**16**	**100 %**

*Keterangan: data SIAP per November 2019

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir(*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m2 diatas total luas tanah 19.662 m2

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2020, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.047.323.000,-. Namun terdapat revisi DIPA pertama

tanggal 02 Maret 2020 dalam rangka penambahan anggaran untuk kegiatan KIE sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 50.544.323.000 kemudian Pada Tanggal 30 April terbit Revisi DIPA kedua Rp. 44.216.042.000 dalam rangka refocussing penanggulangan covid 19, selanjutnya revisi anggaran revisi DIPA keempat tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka penambahan anggaran pada output 3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman menggunakan Pola baru sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 45.992.042.000.

EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan 1 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

Isu Strategis

Eksistensi sebuah instansi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi kinerja BBPOM di Makassar pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Visi-Misi Presiden (Pangan PJAS, Desa, Pasar)

BBPOM di Makassar berperan dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular dan penurunan angka stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) yang diinisiasi Badan POM sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden No 1 tahun 2017 terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
Germas SAPA dilakukan melalui kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Gerakan Pasar aman (Paman).

2. Dukungan Terhadap UMKM

Jumlah UMKM di Sulawesi Selatan mencapai 916.232 unit (Bapedda Pemprov Makassar tahun 2019). Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan bimbingan teknis e- registrasi pangan olahan, dengan output antara lain menerbitkan 12 NIE pangan olahan dari UMKM pangan di BBPOM di Makassar.

3. Penegakan Hukum Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Makassar

Sebagai kota Daeng juga sebagai kota jalur perdagangangan dan transit antar propinsi juga sebagai kota pelajar untuk Kawasan bagian timur Indonesia, Makassar memiliki populasi dengan latar belakang yang beragam diantaranya golongan mahasiswa dan usia produktif yang diyakini melek IT dan berpotensi menggerakkan perekonomian melalui usaha skala kecil, namun juga menunjukkan peluang dalam peningkatan resiko atas pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di Makassar

4. Pengawasan Produk Obat JKN

BBPOM di Makassar melakukan pengawasan terhadap produk obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain melalui *sampling* dan pengujian obat serta pemeriksaan sarana sesuai CPOB, CDOB dan GPP. Sampling obat JKN dilakukan sesuai Prioritas Sampling tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Sampling *purposive-targeted* obat JKN dilakukan melalui pendekatan analisis risiko produk obat yang digunakan di sarana pemerintah maupun sarana pelayanan lain yang bekerja sama dengan BPJS.

5. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor

terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Makassar sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 24 Kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Makassar melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Reformasi Birokrasi (RB)

Implementasi RB oleh BBPOM di Yogyakarta menuju *good and clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada *Road Map*-RB BPOM tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, BBPOM di Makassar belum berhasil berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB
.

7. Pandemi Covid-19

Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Agenda Prioritas
Realisasi Anggaran
Kinerja Lain
Evaluasi Internal

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Visi

"Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut: :

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

misi

1. *Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*
3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan misi :

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

   Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
   mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku

kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini

diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

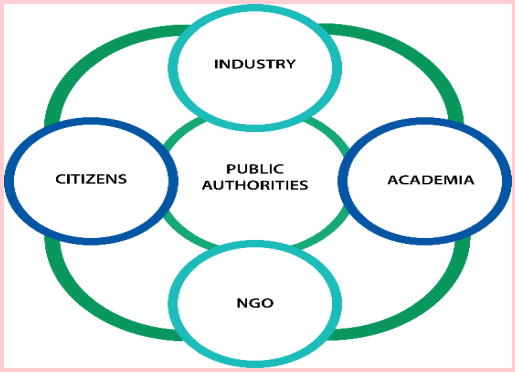

Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: https://pentahelix.eu.

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi

pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: ***1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.***

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

   Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Makassar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana

tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Kota Palopo berikut:

Untuk mewujudkan visi, misi, serta menjalankan sasaran strategis tersebut, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun sasaran kegiatan dengan pertimbangan tantangan masa depan dan sumber daya termasuk infrastuktur yang dimiliki. Sasaran kegiatan yang ditetapkan mengacu pada sasaran strategis Badan POM tahun 2015-2019 yang mengalami perubahan pada pertengahan tahun 2018 yang tercantum dalam Peta Strategis BSC level 0. Sasaran strategis tersebut diturunkan menjadi sasaran kegiatan pada peta strategis Level II BBPOM di Makassar.

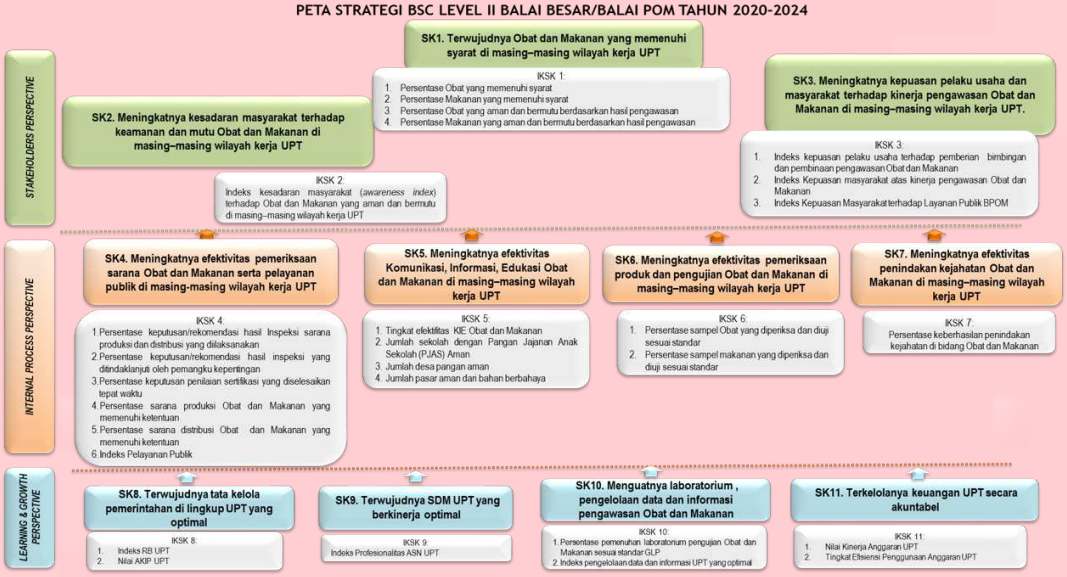

Gambar 2.3 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2020

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar peiode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
	SS.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process	SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

			IKSS.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
	SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB BBPOM di Makassar
			IKSS.8.2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar

	SS.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
			IKSS.11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Stakeholder Perspective :

1. Sasaran Strategis 1 :

   Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

   Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

   Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,

pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 80,8 pada akhir tahun 2020;**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 78 di tahun 2020;**
3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 80,6 pada akhir tahun 2020;**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 78 pada akhir tahun 2020.**

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 74 pada akhir tahun 2020.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 pada akhir tahun 2020;
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 69 pada akhir tahun 2020;
3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 89 pada akhir tahun 2020.

Internal Process Perspective:

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, dengan target sebesar 87 pada akhir tahun 2020;**
2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 55 pada akhir tahun 2020;**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 85 pada akhir tahun 2020;**

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 46 pada akhir tahun 2020;
5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 55 pada akhir tahun 2020.
6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 3,51 pada akhir tahun 2020.

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 72 pada akhir tahun 2020;
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 20 pada akhir tahun 2020;
3) Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 6 pada akhir tahun 2020;
4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 4 pada akhir tahun 2020.

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 85 pada akhir tahun 2020;
2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 75 pada akhir tahun 2020.

7. Sasaran Strategsi 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 67 pada akhir tahun 2020.

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi

yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 81 pada akhir tahun 2020;
2) Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 81 pada akhir tahun 2020.

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makasssar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 75 pada akhir tahun 2020.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things.*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 78,8 pada akhir tahun 2020;.**
2) **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 1,51 pada akhir tahun 2020.**

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 93 pada akhir tahun 2020;**
2) **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 88 pada akhir tahun 2020.**

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

Pada akhir tahun 2019, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2020 mengacu pada Renja Badan POM tahun 2020. Lebih lanjut kemudian Balai Besar POM di Makassar melakukan revisi dokumen rencana kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan

memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	85
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020

merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 (dapat dilihat pada lampiran 2). Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74

	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik	3,51

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	81
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8

	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 50.047.323.000

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2020 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Tahun 2020	Anggaran (Rupiah)
		B03	B06	B09	B12		
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	470.071.306
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	137.275.677
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	112.276.694
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	46.789.323
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	74	74	346.890.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	83	83	19.246.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	69	69	98.825.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	-	-	-	89	89	59.746.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	80.759.000
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	34.611.000
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	85	283.257.000

	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	46	347.825.000
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	1.310.394.000
	Indeks Pelayanan Publik	-	3,51	3,51	3,51	3,51	153.462.000
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	85,16	85,16	85,16	85,16	5.063.448.000
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	16	20	345.832.000
	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	4	6	587.620.000
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	2	4	214.600.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	20	60	85	85	1.433.882.093
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	15	30	75	75	969.747.907
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	33	43	50	67	67	796.433.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	85	85	24.674.274.000
	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	81	81	169.935.000
Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	75	75	611.234.000
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	78,8	78,8	1.452.295.000
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	-	0,4	0,9	1,51	1,51	596.359.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	30	50	75	93	93	5.466.378.000
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien -88%	Efisien -88%	Efisien -88%	Efisien -88%	Efisien -88%	108.576.000

2.5. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Makassar merupakan Indikator Kegitan Utama. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun
berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan Membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus di bawah.

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus di bawah.

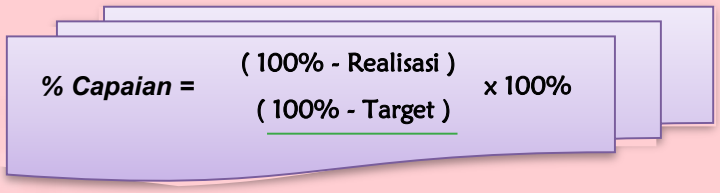

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran

Kriteria penilaian Capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Tidak dapat disimpulkan	$\chi \leq 120\%$
Sangat Baik	$110\% < X \leq 120\ \%$
Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$
Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$
Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$
Sangat Kurang	< 50%

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSP) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NSP) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indicator(NPI) dikalikan dengan bobot :

$$NPS2 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS3 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS4 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS5 = \frac{1\ NPI1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai hasil capaian baik faktor/analisis penyebab ketidaktercapaian kinerja triwulan yang lalu atau faktor pendukung/analisis penyebab capaian kinerja serta rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan oleh SK Kepala BPOM

2. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar. Penanggung jawab data di setiap bidang bertanggungjawab melakukan penginputan sesuai dengan form data kinerja, kertas kerja dan penginputan pada database bit.ly data kinerja secara rutin setiap bulan dan triwulanan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada bit.ly data monev berupa RAPK, RHPK, aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi memanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) dimana aplikasi ini telah menyediakan pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 , eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Hasil pengukuran ini kemudian menjadi dasar dan diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi acuan dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Agenda Prioritas
Realisasi Anggaran
Kinerja Lain
Evaluasi Internal

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja BBPOM di Makassar tahun 2020 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2020 merupakan kinerja tahun pertama Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 102,26 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan nilai Nilai Pencapaian Sasaran Strategis NPSS pada aplikasi kinerja yang diimplementasikan di BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra 2015-2019 yaitu 91,02 %.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi E-Performance BBPOM di Makassar

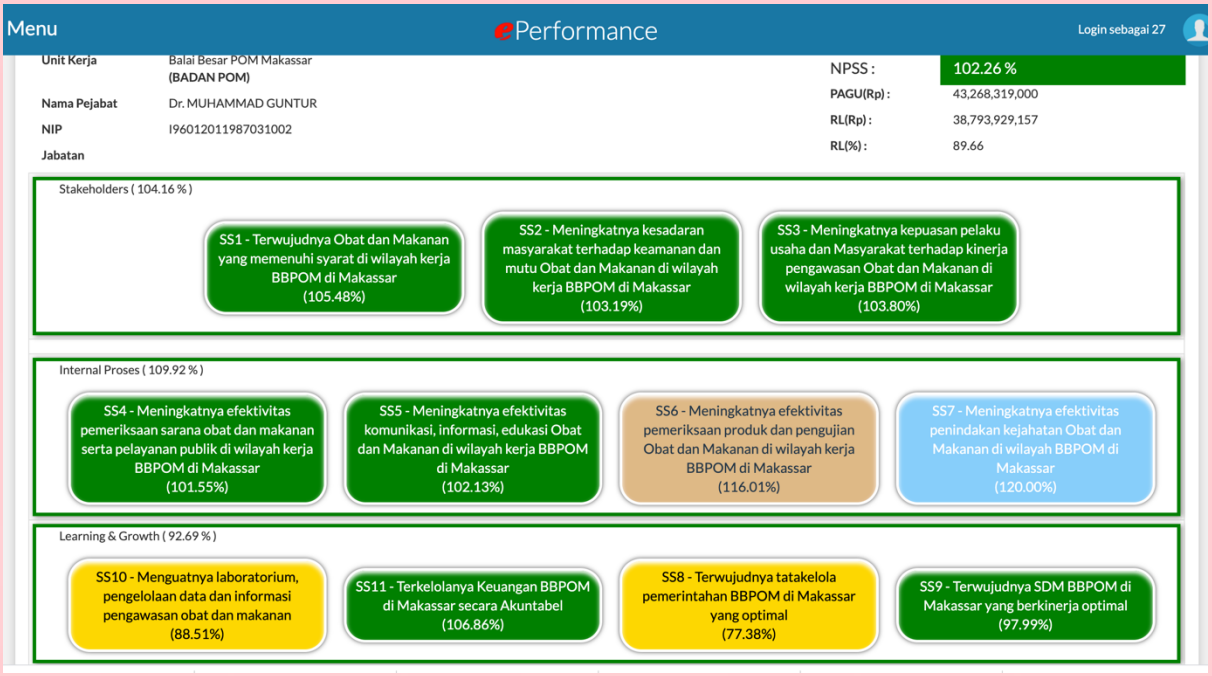

Berdasarkan aplikasi e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di BBPOM di Makassar, diperoleh nilai NPSS sebesar 102,26 % dengan kriteria BAIK, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 104,16 %, NPS perspektif internal proses sebesar 109,92 %, NPS perspektif *learning* & *growth* sebesar 92,69%. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Makassar **telah berhasil** mencapai target semua sasaran strategis dari semua perspektif.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2020 sebagai awal periode Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja 2020 dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1. Capaian Kinerja

Dari 28 indikator untuk penilaian kinerja tahun 2020 pada 11 sasaran strategis, 24 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu dengan capaian ≥ 90% terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 4 indikator (keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; Indeks RB BBPOM di Makassar; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya dibawah 90 %

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Terhadap 11 sasaran strategis penilaian pada tahun 2020 terdapat 7 sasaran strategis dengan kategori baik, 1 sasaran strategis kategori sangat baik, 1 sasaran strategis kategori tidak dapat disimpulkan hingga tidak dapat disimpulkan dan belum berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori Cukup seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	105,48	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	103,19	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	103,80	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	101,55	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,13	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	116,01	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	120	Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	77,38	Cukup
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	97,99	Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	88,51	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	106,86	Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 105,46 ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 103,19 ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM

di Makassar 103,80 ; dimana ketiga sasaran strategis pada perspektif ini bearada pada kategori **Baik**.

Persepctive *Internal Proses* satu sasaran strategis berada pada kategori **Tidak dapat disimpulkan** yaitu dengan nilai 146,33 Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" , kategori sangat baik dengan nilai 117,72 yaitu sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" sedangkan 2 sasaran yang lainnya yaitu Sasaran keempat "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar" dan sasaran kelima "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori **Baik** dengan nilai masing-masing 103,65 dan 102,13.

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis dan hanya dua sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesembilan "Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal 97,99" dan sasaran strategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel' dengan nilai 106,86 kategori **Baik**, Sedangkan Sasaran kedelapan dan sepuluh yaitu "Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal" dan "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan" tidak dapat dicapai oleh BBPOM di Makasar dengan nilai dibawah dari range 90 yaitu masing-masing 77,37 dan 88,51 berada pada kategori **Cukup**

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	88,09	109,02	105,46
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	85,86	110,08	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,42	103,50	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	77,42	99,26	

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	74	76,36	103,19	103,19
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	82,50	99,40	103,80
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	73,94	107,16	
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	93,31	104,84	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	68,19	78,38	103,65
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51,91	94,38	
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	96,43	113,45	
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	47,81	103,93	
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,95	132,64	
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,48	99,15	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	92,41	108,51	102,13
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16,00	100,00	
		17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00	
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,21	112,01	117,72
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	92,57	123,43	

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	98,04	146,33	146,33
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	85	50,45	59,35	77,37
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	77,27	95,40	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99	97,99
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	70,60	89,59	87,42
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	1,32	87,42	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	93,07	100,08	106,86
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	100,00	113,64	

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM Makassar 102,26	CAPAIAN BBPOM Semarang 102,81	CAPAIAN BBPOM Surabaya 106,06	CAPAIAN BBPOM Bandung 101,03
	Stakeholders	**104,16**	**98,91**	**104,29**	**100,67**
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM	105,48	95,95	110,06	104,22
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM	103,19	99,88	100.32	93,54

3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM	103,80	100,89	102.49	104,24
	Internal Proses	**109,92**	**105,64**	**108,05**	**99,65**
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM	101,55	106,89	102.77	104,65
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM	102,13	103,77	101,28	100,94
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM	116.01	109,91	119.08	108,75
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM	120	101,99	109,05	84,23
	Learning & Growth	**92,69**	**103,88**	**105,83**	**102,77**
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM yang optimal	77,38	94,41	94.61	93,76
9	Terwujudnya SDM BBPOM yang berkinerja optimal	97,99	111,13	113.45	104,77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	88,51	105,86	107.57	107,04
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM secara Akuntabel	106,86	104,10	107.68	105,50

Berdasarkan tabel diatas, Stekholders Perspective dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Surabaya dengan capaian 104,29 dibandingkan BBPOM di Makassar, BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung. Pada Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 110,06 kategori Baik; Sasaran Strategis kedua yaitu

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 103,19 kategori Baik; serta Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 104,24 kategori Baik, secara rata-rata sasaran strategis satu, dua dan ketiga pada BBPOM di Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM Bandung berada pada kategori "Baik".

Persepctive *Internal Proses* dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Makassar dengan capaian 109,92 dibandingkan BBPOM Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung. Pada Sasaran Strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Semarang 106,89 kategori Baik; Sasaran Strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Semarang 103,77 kategori Baik; Sasaran Strategis keenam yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 119,09 kategori Baik, serta Sasaran Strategis ketujuh yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 120 kategori Baik, secara rata-rata sasaran strategis empat, lima, enam dan tujuh pada BBPOM di Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM Bandung berada pada kategori "Baik".

Pada learning and growth perspective, nilai tertinggi pada BBPOM di Surabaya dengan capaian 105,83 tertinggi dibandingkan BBPOM di Makassar, BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung. sasaran Strategis kedelapan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM yang optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 94,61 kategori Baik; Sasaran Strategis kesembilan yaitu Terwujudnya SDM BBPOM yang berkinerja optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 113,45 kategori Baik; Sasaran Strategis kesepuluh yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 107,57 kategori Baik; serta Sasaran Strategis kesebelas yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM secara Akuntabel dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Surabaya 107,68 kategori Baik, secara rata-rata sasaran strategis delapan, Sembilan, sepuluh dan sebelas pada BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM Bandung berada pada kategori "Baik", sementara BBPOM Makassar pada perspective ini berada pada kategori "cukup" untuk sasaran strategis kedelapan capaian 77,38 serta Sasaran Strategis kesepuluh capaian 88,51.

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 4 Indikator sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
Target 80,80 Realisasi 88,09 Capaian 109,02%

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Target 78,00 Realisasi 85,86 Capaian 110,08%

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 80,60 Realisasi 83,42 Capaian 103,50%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Target 78,00 Realisasi 77,42 Capaian 99,26%

Pada sasaran strategis pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar " terdiri dari 3 indikator yang nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu indikator pertama kedua dan ketiga yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 88,09 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2020 adalah 109,02 % dengan realisasi sebesar 88,09 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	88,09	109,02	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 1.294 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 1.469 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 1.469 sampel terdiri atas 1.186 sampel Makassar dan 283 Sampel Loka yang selesai diperiksa, dari 1.469 sampel tersebut terdapat 175 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 35 (32 Makassar; 3 Palopo) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 6 (6 Makassar; 0 Palopo) Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 5 (3 Makassar; 2 Palopo) Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 129 (36 Makassar; 93 Palopo) Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 0 (0 Makassar; 0 Palopo) Sampel

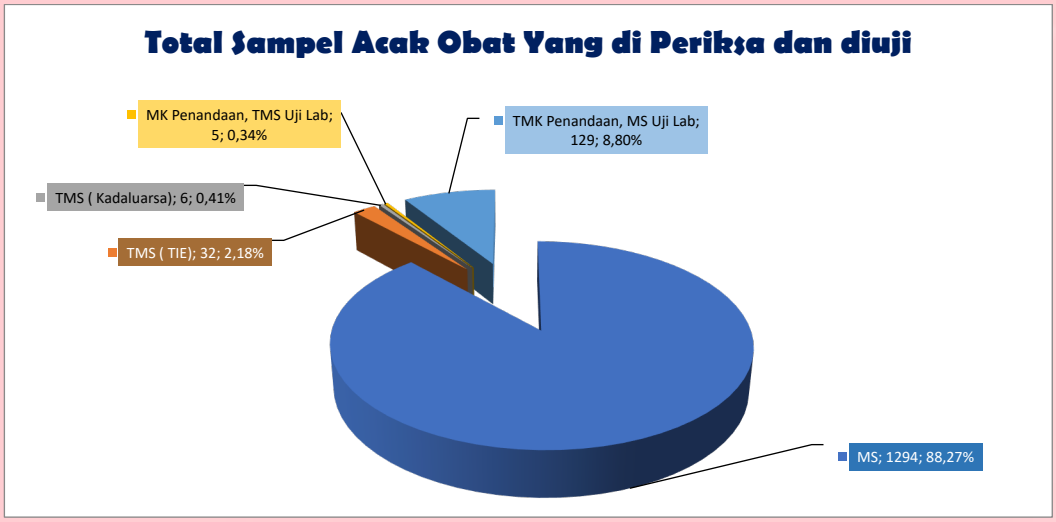

Gambar 3.2
Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

Jumlah sampel Obat sampai dengan yang diperiksa adalah 1.470 sampel dan sebesar 1.469 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 1 sampel obat yang carry over di tahun 2021.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tahun 2019	94	95,48	101,57	Baik
Tahun 2020	80,80	88,09	109,02	Baik

Pada a tahun 2019 belum terdapat indikator persentase obat yang memenuhi syarat dengan perhitungan sampel acak, dimana terdapat perbedaan defenisi operasional pada indikator ini. Perbedaan signifikan realisasi indikator tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi karena pada tahun 2019 belum diterapkan sepenuhnya sampling obat secara

acak, serta defenisi kategori Obat yang berbeda antara 2019 dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, sampling secara acak/random sudah diterapkan secara maksimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	92,30	88,09	95,43	Baik

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

Indikator Kinerja **Persentase obat yang memenuhi syarat**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	80,8	88,09	109,02	Baik
BBPOM di Semarang	90,00	84,62	94,02	Baik
BBPOM di Surabaya	80,80	91,40	113,12	Sangat Baik
BBPOM di Bandung	80,8	97,62	120,82	Tidak dapat disimpulkan

Target indikator persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Makassar, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung berada pada angka yang sama pada yaitu 80,8, berbeda dengan BBPOM di Semarang lebih tinggi yaitu 90,00 adapun hasil capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Makassar dengan nilai kategori "Baik" lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Bandung dengan nilai kategori "Tidak dapat disimpulkan" dan BBPOM Surabaya dengan nilai kategori "Sangat Baik" serta lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Semarang dengan nilai kategori "Baik" . Berikut ini perbandingan capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

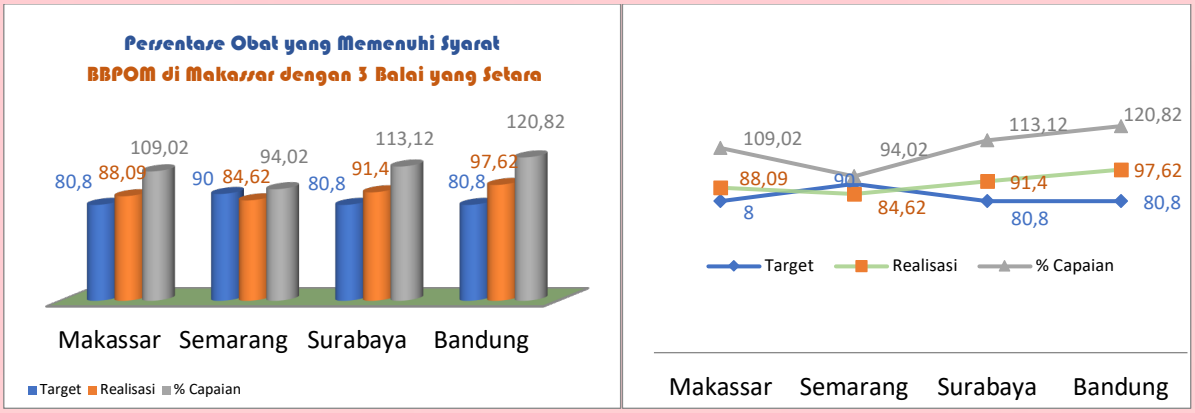

Gambar 3.6
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Mengikuti petunjuk dalam KepKa Badan POM tahun 2020 tentang Pedoman *Sampling* Obat& NAPZA Tahun 2020
  Untuk sampling obat secara acak/random dilakukan secara acak untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk yang beredar. Sampling acak yang dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan NAPZA Tahun 2020 dengan kaidah stratified random sampling dimana cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Tingkatan yang dimaksud adalah tingkatan kelas terapi berdasarkan jumlah produk beredar. Sampling acak diperuntukkan untuk obat JKN dan obat non JKN.
- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,09 %. Pelaksanaan sampling obat oleh Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM Palopo dilakukan secara onsite dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang belum berakhir.

  Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sedangkan untuk sampel Suplemen dan Obat Tradisonal yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persedian jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

  Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Palopo adalah 1.469 sampel, terdiri atas 1.294 sampel memenuhi syarat dan 175 sampel yang tidak memenuhi syarat, berasal dari 77 sampel acak yang TMS diperiksa dan diuji dari BBPOM di Makassar dan 98 sampel acak yang disampling oleh Loka POM di Palopo dan di uji oleh BBPOM Makassar.

- Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (loka pom) mempengaruhi tingginya persentase obat yang tidak memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan/label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku diwilayah sampling BBPOM Makassar juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada Tahun 2020 hal ini disebabkan karena tidak mencantumkan interaksi obat

pada brosur komoditi obat; klaim yang tidak sesuai pada Obat Tradisional dan Kosmetik.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Metode sampling acak untuk produk Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dilakukan dalam rangka menjawab sampling representatif (keterwakilan semua risiko yang ada di masyarakat), dimana metode sampling yang dilakukan pada tahun 2020 menggunakan metode pengawasan *Multistage* sampling sebagai upaya agar jenisnya lebih bervariasi
- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang dipeiksa dan diuji

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan

yang memenuhi syarat sebesar 85,86 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Makanan\ \ MS\ yang\ diperiksa}{Total\ Sampel\ Acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \ X\ 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020 adalah 110,08 % dengan realisasi sebesar 85,86 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	85,86	110,08	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 571 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 665 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki

NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 665 sampel terdiri atas 554 sampel Makassar dan 111 Sampel Loka yang selesai diperiksa. Dari 665 sampel tersebut terdapat 94 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 20 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 36 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 23 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 14 Sampel

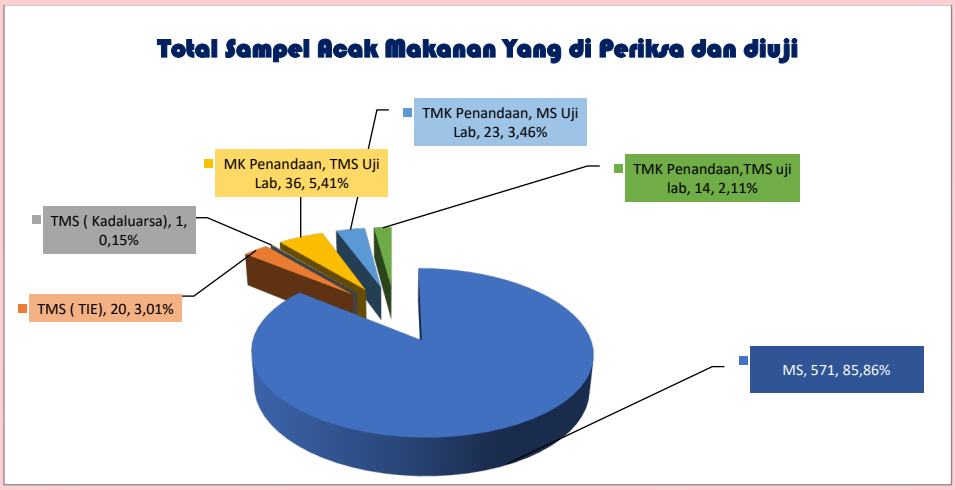

Gambar 3.7
Jumlah Sampel makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

Jumlah sampel makanan Tahun 2020 yang diperiksa adalah 665 sampel dan sebesar 665 sampel yang selesai diperiksa dan diuji di Tahun 2020.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.9. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tahun 2019	72	74,47	103,43	Baik
Tahun 2020	78	85,86	110,08	Sangat Baik

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dengan perhitungan sampel acak, dimana terdapat perbedaan defenisi operasional pada indikator ini. Perbedaan signifikan realisasi indikator tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi karena pada tahun 2019 belum diterapkan sepenuhnya sampling obat secara acak. Pada tahun 2020, sampling secara acak/random sudah diterapkan secara maksimal

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.10. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86	85,86	99,83	Baik

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

Indikator Kinerja **Persentase makanan yang memenuhi syarat**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	78	85,86	110,08	Sangat Baik
BBPOM di Semarang	78	74,34	95,31	Baik
BBPOM di Surabaya	78	80,10	102,69	Baik
BBPOM di Bandung	78	76,80	98,46	Baik

Target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung berada pada angka yang sama pada yaitu 78, adapun hasil capaian realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat BBPOM Makassar dengan nilai 110,08 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Bandung dan BBPOM Surabaya dengan nilai masing-masing 95,31; 98,46; dan 102,69 kategori "Baik". Berikut ini perbandingan capaian realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

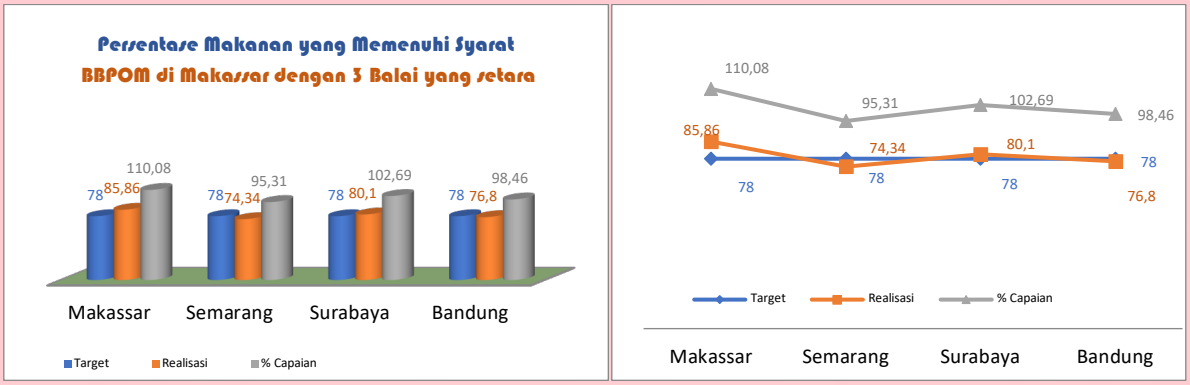

Gambar 3.8
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Makanan yang sudah disetujui oleh direktorat Registrasi Pangan Olahan sebanyak 5,57 %
- Terhadap sampel Makanan yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium yaitu TMS pada parameter pemanis siklamat, pemanis sakarin, pewarna tartrazin, pewarna eritrosin sebanyak 5,41 %

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase makanan yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ *Sampling* Makanan dilakukan Balai Besar POM di Makassar sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- ❖ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- ❖ Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB.
- ❖ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- ❖ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Makanan yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;

- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Produk Pangan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan. cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan

Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

2) Produk kedaluwarsa

3) Produk rusak

4) Tidak memenuhi ketentuan label

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 83,42 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ Obat\ aman\ \&\ Bermutu = \frac{Jumlah\ \ sampel\ Targeted\ \ Obat\ MS}{Total\ sampel\ Targeted\ Obat\ diperiksa\ \&\ diuji} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 adalah 103,50 % dengan realisasi sebesar 83,42 Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,60	83,42	103,50	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 322 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan. diujisebanyak 386 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 386 sampel terdiri atas 309 sampel Makassar dan 77 Sampel Loka yang selesai diperiksa , dari 386 sampel tersebut terdapat 64 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 1 Sampel (1 Makassar; 0 Palopo)
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 31 Sampel (31 Makassar; 0 Palopo)
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorium) : 2 Sampel (2 Makassar; 0 Palopo)
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorium) : 30 Sampel (7 Makassar; 23 Palopo)
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 0 Sampel (0 Makassar; 0 Palopo)

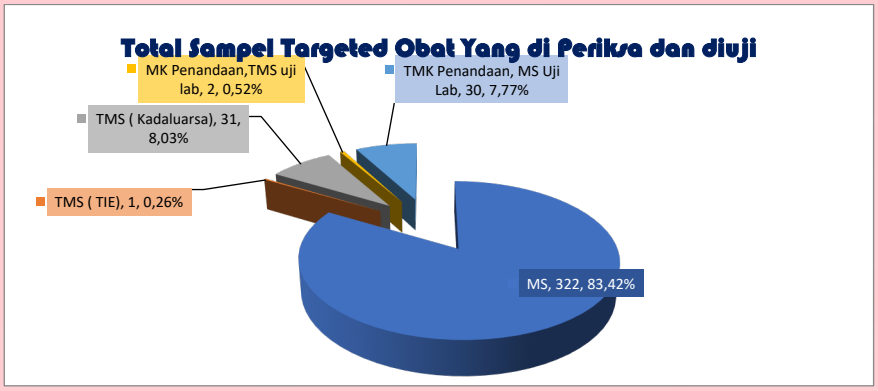

Gambar 3.9
Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	80,60	83,42	103,50	Baik

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perhitungan sampel targeted. Pada tahun 2020, sampling secara targreted sudah diterapkan secara maksimal

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.14. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,60	92,30	83,42	90,38	Baik

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

Indikator Kinerja **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	80,60	83,42	103,50	Baik
BBPOM di Semarang	90,00	84,62	94,02	Baik
BBPOM di Surabaya	80,80	84,37	104,42	Baik
BBPOM di Bandung	90,00	94,49	104,98	Baik

Target indikator persentase Obat yang aman dan bermutu BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM Makassar dengan nilai 103,50 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Surabaya dan BBPOM Bandung, namun capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Semarang. Capaian Indikator persentase Obat yang aman dan bermutu di BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung berada pada

ketegori "Baik". Berikut ini perbandingan capaian realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

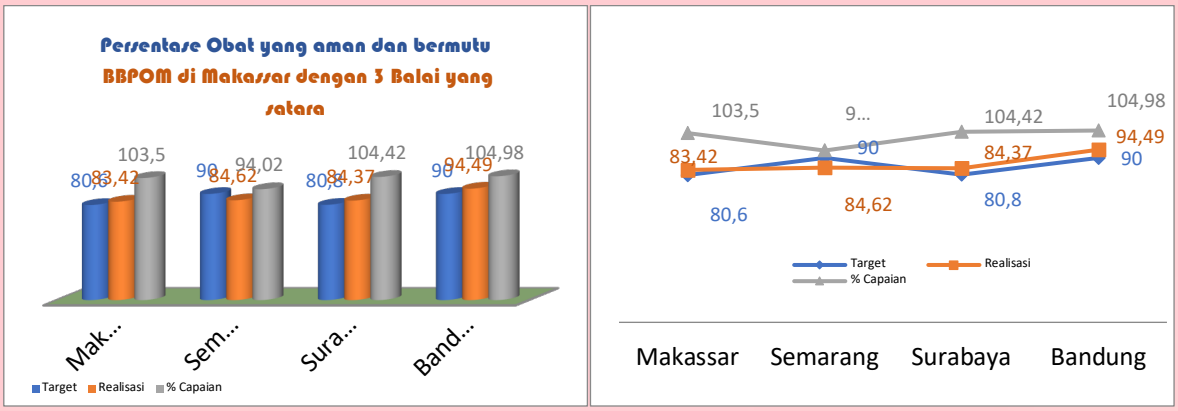

Gambar 3.10
Capaian Kinerja Indikator persentase Obat yang aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori sangat baik antara lain :

- Keberhasilan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi Perka BPOM No. 25 tahun 2017 tentang Tata Cara dan *mandatory Sertifikasi* CDOB
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Jumlah sampel obat targeted di triwulan keempat Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM Palopo adalah 386 sampel, tidak memenuhi syarat sejumlah 64 sampel dan memenuhi syarat 322
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Obat, Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang sudah disetujui oleh Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 7,77 %

- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi syarat pengujian laboratorium sebanyak 0,52 %
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sampel TIE, Kedaluarsa yaitu 32 sampel sebanyak 8,29 %

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- ❖ Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan, baik secara daring maupun kunjungan ke sarana di masa Pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.
- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK

- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar belum sepenuhnya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 70,64 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan keempat tahun 2020 adalah 99,26 % dengan realisasi sebesar 77,42 % makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	77,42	99,26	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 168 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 217 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2020, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 217 sampel terdiri atas 191 sampel Makassar dan 26 Sampel Loka yang selesai diperiksa dan diuji , dari 217 sampel tersebut terdapat 49 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel

- Tidak Memenuhi Syarat (Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 15 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Memenuhi Syarat Uji Laboratorim) : 11 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Tidak Memenuhi Syarat uji laboratorium) : 22 Sampel

Gambar 3.11
Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2020

Jumlah sampel makanan targeted tahun 2020 yang diperiksa adalah 217 sampel dan sebesar 217 sampel yang selesai diperiksa dan diuji di tahun 2020.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.17. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator **Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	78	77,42	99,26	Baik

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perhitungan sampel targeted. Pada tahun 2020,

sampling secara Targeted sudah diterapkan. Sehingga perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dengan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.18. Perbandingan realisasi Indikator **Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	86	77,42	90,02	Baik

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

Indikator Kinerja **Persentase makanan yang aman dan bemutu**	**Target**	**Realisasi**	**% Capaian**	**Kriteria**
BBPOM di Makassar	78	77,42	99,26	Baik
BBPOM di Semarang	73	77,58	106,28	Baik
BBPOM di Surabaya	50	70,07	140,15	Tidak dapat disimpulkan
BBPOM di Bandung	72	67,25	93,40	Baik

Target indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM Makassar dengan nilai 99,26 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Surabaya dan BBPOM Semarang, namun capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandung. Capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM Makassar, BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung berada pada ketegori "Baik" sedangkan capaian BBPOM di Bandung berada pada ketegori "Tidak dapat disimpulkan". Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

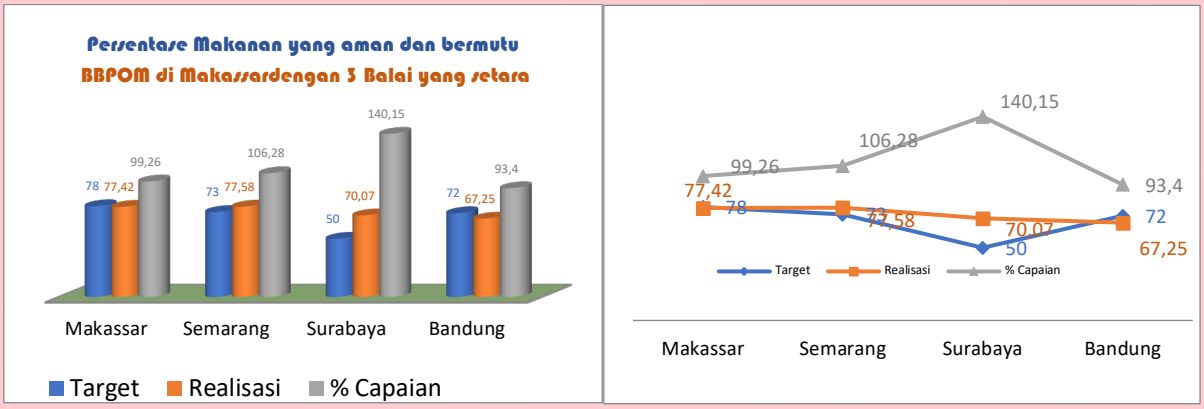

Gambar 3.12
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Dengan adanya pandemi Covid-19 Sampiling Produk Pangan di triwulan kedua bulan April dan Mei tidak dilakukan. Setelah Pembatasan Berskala Besar terkait Covid 19 mulai dilonggarkan Sampling Pangan kemudian mulai dilakukan di bulan Juni sd pertengahan triwulan keempat bulan September baik melalui online maupun secara onsite.
- Jumlah sampel makanan yang diuji Tahun 2020 mencapai 100 % (217 sampel makanan) yang disampling secara targeted. hasil pengujian Makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium disampling secara purposive/targeted. Sampel yang tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 49 sampel dari total 217 sampel makanan yang diuji, dengan TMS parameter Siklamat. pada sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) serta TMS parameter KIO3 dan kadar air pada sampel fortifikasi garam beryodium. Hal ini menunjukkan masih kurangnya

pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan, khususnya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran para guru, orang tua murid, murid dan pedagang sekitar sekolah terhadap keamanan pangan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- ❖ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ❖ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- ❖ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ❖ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang aman dan bermutu.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2020, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu

ndeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat rhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA *Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi engenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar 2020 adalah 103,19 dengan realisasi sebesar 76,36.

Tabel 3.20
Target Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	74	76,36	103,19	Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2020 adalah 76,36 Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,19 % dengan kriteria Baik.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner.

- Indeks Kesadaran Masyarakat

Indikator pembentuk indeks Kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu :

- Pengetahuan

  Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap

  Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- Perilaku

  Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.21
Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	66	71,35	108,11	Baik
Tahun 2020	74	76,36	103,19	Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 dibanding tahun 2019 dari nilai 66 menjadi 74, meskipun capaiannya mengalami penurunan 4,92 point, namun masih pada kategori baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	74	85	76,36	89,83	Cukup

indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasiTahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.24
Capaian Kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020

Indikator Kinerja ***Indeks Kesadaran Masyarakat***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	74	76,36	103,19	Baik
BBPOM di Semarang	72	71,91	99,88	Baik
BBPOM di Surabaya	73	73,23	100,32	Baik
BBPOM di Bandung	72	67,35	93,54	Baik
Nasional	72	74,29	103,18	Baik

Target kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja indikator indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di BBPOM Makassar dengan nilai 103,19 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

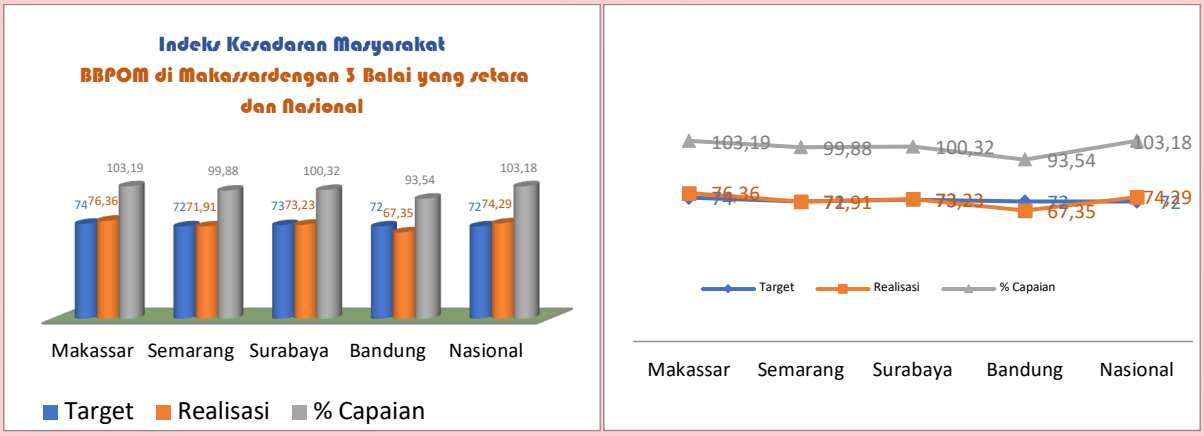

Gambar 3.13
Capaian Kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar kategori baik antara lain :

Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 78,66, indeks sikap 82,19 dan indeks perilaku adalah 68,23. Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,08 (Baik); Obat Tradisional 70,61 (Cukup Baik); Suplemen Kesehatan 71,37 (Cukup Baik); Kosmetik 71,09 (Cukup Baik); Pangan Olahan 77,06 (Baik).
Dari hasil survey diketahui bahwa :

- Umumnya masyarakat mengetahui bahwa Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan mempunyai petunjuk penyimpanan. Persentase terbesar untuk masyarakat yang mengetahui petunjuk penyimpanan yaitu pada produk Obat (85 %) diikuti berturut-turut oleh pangan olahan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Tradisional.
- Secara umum masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahanyang tidak

terdaftar atau tidak memiliki Izin Edar., sedangkan, persentase terbesar untuk yang mengetahui adanya produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar terdapat pada produk pangan olahan yaitu sebesar 48,5 % diikuti oleh Obat, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

- Umum masyarakat mengetahui bahwa Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan mempunyai tanggal kedaluarsa yaitu pada produk Obat (90 %) di ikuti Pangan, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Tradisional.
- Sebanyak 59,8 % masyarakat tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
- Mayoritas masyarakat (68,2 %) mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar
- Persentase masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui Obat tradisional yang mengandung bahan kimia Obat hamper sama yaitu berturut-turut 43,7 % dan 48,9 %
- Dari seluruh responden yang disurvei, sekitar 90 % responden menunjukkan sikap yang positif terhadap Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dari pendapat mereka yang menganggap penting kondisi kemasan produk, mengetahui efek samping produk, membaca petunjuk penggunaan, mengetahui petunjuk penyimpanan, produk harus terdaftar di BPOM, dan mengetahui tanggal kedaluarsa produk, serta mengimplementasikannya dalam keseharian melalui perilaku.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling rendah yaitu 63,9. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Makassar dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai menfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial.

Karena itu BBPOM di Makassar tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Sulawesi Selatan sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Makassar dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selama Triwulan IV tahun 2020 BBPOM Makassar telah melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat sebanyak 90 kali yang dilakukan di berbagai daerah antara lain Makassar, Barru, Palopo, Maros, dll.
Kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat terbukti mampu menarik perhatian masyarakat untuk datang dan menyimak materi obat dan makanan yang aman dan bermutu yang disampaikan oleh Tim BBPOM Makassar bersama tokoh masyarakat.

Alternatif Solusi

1. Strategi komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan melalui berbagai media, yaitu:
    a. Media televisi supaya dapat menjangkau seluruh wilayah, dalam bentuk iklan layanan, berita ataupun bincang-bincang seperti talk show.
    b. Media sosial dan internet terutama untuk menjangkau kawula muda.
    c. Media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dipasang di ruang publik.
2. Materi informasi akan dibuat lebih beragam dan variatif sehingga mudah dipahami masyarakat dengan mudah terutama pada kata-kata yang kurang dipahami oleh masyarakat awam seperti kata label/kemasan dan nomor izin edar,
   Kehadiran BBPOM Makassar sangat diharapkan oleh masyarakat yang jarang bersentuhan dengan teknologi komunikasi. Karena itu BBPOM Makassar harus menggunakan berbagai media secara efektif agar seluruh kelompok dan lapisan masyarakat merasakan kehadiran BBPOM Makassar.
3. Mengoptimalkan KIE khususnya edukasi kepada masyarakat dalam hal tugas dan fungsi BPOM;
4. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan.

Media sosial yang merupakan sarana edukasi yang relatif murah namun efektif tetap akan menjadi prioritas bagi BBPOM Makassar untuk memberikan layanan informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses informasi dengan menggunakan media sosial masyarakat telah terbiasa mencari berbagai

informasi melalui perangkat perangkat komunikasi. Hal ini harus dimanfaatkan oleh BBPOM Makassar agar kelompok masyarakat pengguna perangkat informasi selalu mendapat pilihan informasi yang benar dan valid yang bersumber dari BBPOM Makassar. Dari hasil survey kesadaran masyarakat, BBPOM Makassar juga dapat memilih komoditi apa yang akan lebih diprioritaskan untuk diperbanyak dan dilakukan lebih intensif. Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat menjadi pilihan subyek/materi untuk melakukan KIE melalui berbagai media dan dengan target segmen masyarakat yang berbeda beda sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Kelompok milenial misalnya akan lebih tertarik dengan topik kosmeetik dan suplemen Kesehatan sedangkan masyarakat pedesaan akan lebih tertarik dengan topik obat tradisional dan pangan misalnya. Pengemasan informasi yang menarik dan mudah dipahami harus menjadi bahan pertimbangan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Makassar harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll.
BBPOM Makassar memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada Tahun 2020 BBPOM Makassar telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, , Asprindo, dll. Semua komunitas tersebut diharapkan mampu menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan alternative untuk hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Makassar. Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan

keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Dari hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian masyarakat telah menunjukkan sikap yang baik terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu yang ditunjukkan dengan selalu membaca petunjuk penggunaan, melihat kondisi kemasan, mengetahui efek samping produk, petunjuk penyimpanan yang ada di label produk obat, obat tradisioal, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
2. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa ada produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar.
3. Sebagian besar masyarakat mengetahui tanggal kadaluwarsa yang harus dilihat pada kemasan Obat dan Makanan
4. Masyarakat mengetahui bahwa ada produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.

Namun demikian hasil survey juga menunjukkan pengetahuan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai media. Media sosial meskipun dirasa efektif untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat perkotaan, namun ternyata tidak demikian halnya dengan masyarakat di pedesaan dan masyarakat yang tinggal di daerah daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. KIE secara langsung bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama terbukti efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indkator Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
Target 83 Realisasi 82,5 Capaian 99,40

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Target 69 Realisasi 73,94 Capaian 107,16

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
Target 89 Realisasi 93,31 Capaian 104,84

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

1). **Aspek bimbingan dan pembinaan**
2). **Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan**
3). **Aspek penanganan saran dan masukan**
4). **Aspek manfaat**
5). **Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.**
6). **Aspek pengetahuan dan pemahaman**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar 2020 adalah 103,19 dengan realisasi sebesar 76,36.

Tabel 3.25
Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	82,50	99,40	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan untuk Periode akhir 2020 adalah 83.

Survey ini telah dilakukan pada tahun 2019 namun lokasi responden ditentukan secara regional bukan spesifik provinsi tertentu. Hasil survey untuk regional Sulawesi pada tahun 2020 adalah 82,60 dengan target 82. Survey ini dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Capaian Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 99,40 % dengan kriteria "Baik".

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha

Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :

1). Aspek bimbingan dan pembinaan
2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3). Aspek penanganan saran dan masukan
4). Aspek manfaat
5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.26. Perbandingan realisasi **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan** Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	89	82,50	92,69	Baik

indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasiTahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.27
Capaian Kinerja indikator **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan** Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta secara Nasional tahun 2020

Indikator Kinerja ***Indeks KPU***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	83	82,50	99,40	Baik
BBPOM di Semarang	82	86,03	104,91	Baik
BBPOM di Surabaya	82	82,60	100,73	Baik
BBPOM di Bandung	83	90,82	109,42	Baik
Nasional	82	86,81	105,87	Baik

Target kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 99,40 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih rendah dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang,

BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut:

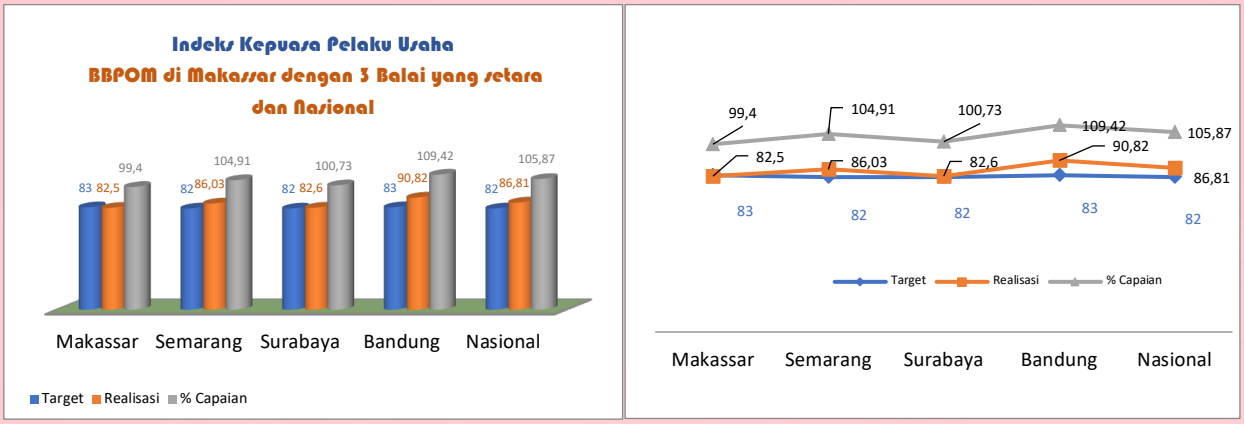

Gambar 3.14
Capaian Kinerja indikator **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan** Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta secara Nasional tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori baik antara lain :

1. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan tetapi tidak disertai pemberian Link Survey seperti : kegiatan bimtek dan fasilitasi/pendampingan implementasi CPPOB yang dilaksanakan secara daring tanggal 8 september 2020 dengan peserta 25 pelaku usaha UMKM
2. Pelayanan konsultasi terhadap pelaku usaha via telepon/WA juga tidak diberikan Link Survey

Alternatif Solusi

1. Pemberian layanan konsultasi serta pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha akan lebih ditingkatkan
2. Melaksanakan bimtek dan fasilitasi/pendampingan pelaku usaha UMKM

3. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa pelaku usaha yang terlibat proses registrasi di Badan POM merasakan manfaat bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Makassar. Petugas akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif dan dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh pelaku usaha. BBPOM di Makassar juga akan selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM agar proses pendaftaran, terutama untuk pelaku UMKM, terlaksana dengan cepat dan tepat.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam rangka upaya peningkatan capaian agar menjadi sangat baik dan peningkatan rating dibandingkan , perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

- Peningkatan frekuensi bimbingan teknis yang terkait sertifikasi dan pendaftaran produk
- Peningkatan kegiatan pendampingan terpadu dengan lintas sector
- Pelaksanaan survei untuk desk layanan konsultasi pendampingan e-registrasi pangan
- Monitoring kemajuan proses pendaftaran pangan, obat tradisional, dan kosmetik

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Kedepannya akan dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan dan mempercepat dalam pemulihan di sektor ekonomi. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan agar tetap ada monitoring kemajuan proses pendaftaran pangan, obat tradisional, dan kosmetik pasca bimbingan

Kegiatan-kegiatan yang perlu ditingkatkan antara lain :

- Bimbingan Teknis ke pelaku usaha meliputi produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dengan menggali kebutuhan dari pelaku usaha
- Pendampingan pendaftaran pangan, obat tradisional, dan kosmetik

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- ***tangibles,***
- ***realibility,***
- ***responsiveness,***
- ***assurance dan***
- ***emphaty***

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Tahun 2020 adalah 69. Capaian Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,16 % dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.28
Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	73,94	107,16	Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2020 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Hasil survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan adalah 73,94 dari target yang ditetapkan 71. Survey dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi Badan POM yaitu obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Hasil survey per komoditi secara nasional adalah :

- Obat : 75,12 (Puas)
- Obat Tradisional : 70,50 (Cukup Puas)
- Suplemen Kesehatan : 71,13 (Cukup Puas)
- Kosmetik : 71,06 (Cukup Puas)
- Pangan Olahan : 73,81 (Cukup Puas)

Capaian Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 secara Nasional adalah 72,54 dan capaian BBPOM di Makassar

telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 73,94 diatas dari capaian rara-rata Nasional dengan kriteria "Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	69	73,94	107,16	Baik

Realisasi indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.30. Perbandingan realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	81	73,94	91,28	Baik

indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja ***Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	69	73,94	107,16	Baik
BBPOM di Semarang	71	69,3	97,61	Baik
BBPOM di Surabaya	71	74,18	104,48	Baik
BBPOM di Bandung	71	75,43	106,24	Baik
Nasional	72	72,54	103,18	Baik

Target kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 107,16 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

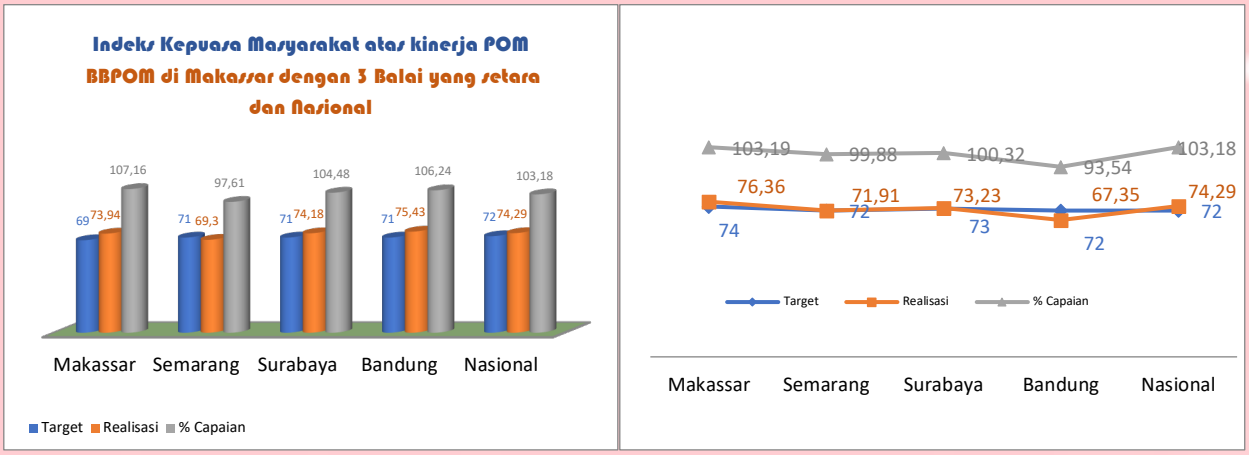

Gambar 3.15
Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan kategori baik antara lain :

1. Kegiatan dilakukan secara langsung maupun secara daring dalam melakukan pengawasan sarana maupun produk.
2. Melakukan komunikasi yang baik dengan pemilik sarana terutama dalam melaksanakan pemeriksaan secara daring.
3. Memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada pemilik sarana pada saat melakukan pengawasan.

Alternatif Solusi

Dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan telah menunjukkan kinerja BBPOM Makassar yang cukup baik namun masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu antara lain :

- BBPOM Makassar kedepan harus lebih memprioritaskan dalam hal pengawasan terhadap produk kedaluarsa , bahan berbahaya serta mengutamakan jaminan keamanan produk Obat an Makanan

- Mengoptimalkan Layanan Halo BPOM agar masyarakat lebih memanfaatkan layanan Halo BPOM
- Meningkatkan intensitas dan menembangkan program KIE maupun sosialisasi untuk setiap komoditi produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetikdalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan
- BBPOM Makassar akan melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan program KIE dan pengawasan diwilayah kerja BBPOM Makassar dan Loka POM di palopo dengan mengacu pada perbandingan indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat
- BBPOM Makassar dapat memilih dan menetapkan komoditi mana yang masih harus sering dikomunikasikan kepada masyarakat. Komoditi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan masih harus sering diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial dengan pilihan target dan waktu penyampaian yang tepat. Pilihan topik dan sub topik harus cukup menarik dan sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat luas sehingga masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi yang reliable dan valid sehingga dapat menangkal informasi yang tidak benar. Bagaimana memahami label pangan, bagaimana memilih kosmetik yang aman, bagaimana mengkonsumsi obat tradisional yang aman dan berkhasiat,

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan kategori baik antara lain :

- Pengawasan rutin sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian yang tersebar di 24 kabupaten/kota di diwilayah kerja BBPOM di Makassar dan Loka POM di Palopo sebanyak 228 sarana produksi obat dan makanan dan 1.331 sarana distribusi obat, makanan dan sarana pelayanan kefarmasian dengan hasil pemeriksaan 119 sarana produk obat dan makanan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan 360 sarana distribusi obat dan makanan TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) untuk selanjutnya diberikan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengawasan terhadap iklan dan label/penandaan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM Makassar dan Loka POM di Palopo.
- Pemanfaatan media sosial dan pemilihan topik komoditi yang menarik bagi masyarakat harus disesuaikan dengan target segmen masyarakat. Dari hasil survey, beberapa komoditi misalnya obat tradisional, pangan dan kosmetik belum menunjukkan hasil maksimal sehingga masih dapat dipilih sebagai prioritas topik untuk kegiatan penyebaran informasi melalui media pada masa yang akan datang. Demikian juga dengan pemanfaatan website BBPOM di Makassar sebagai situs resmi dimana. masyarakat berharap akan mendapatkan informasi yang terpercaya dan valid.
- Mengkomunikasikan Langkah pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di palopo melalui media social (facebook, website, Instagram,twitter) dan penyuluhan langsung ke masyarakat agar terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Dari hasil survey Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
kinerja BBPOM Makassar cukup baik namun masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. BBPOM Makassar dapat memilih dan menetapkan komoditi mana yang masih harus sering dikomunikasikan kepada masyarakat. Komoditi obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik masih harus sering diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media sosial dengan pilihan target dan waktu penyampaian yang tepat. Pilihan topik dan sub topik harus cukup menarik dan sesuai dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat luas sehingga masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi yang *reliable* dan valid untuk dapat menangkal informasi yang tidak benar serta bagaimana memahami label pangan, bagaimana memilih kosmetik yang aman, bagaimana mengkonsumsi obat tradisional yang aman dan bermutu.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Tahun 2020 adalah 89. Capaian Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,84 % dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.32
Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89	93,31	104,84	Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Pada tahun 2020, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Realisasi indikator ini ditargetkan akan diperoleh pada triwulan IV, namun hasil sudah dapat diperoleh pada triwulan III. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi hasilnya telah diperoleh pada triwulan III tahun 2020 dengan nilai SKM unit sebesar 93,31. Capaian Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,84 % dengan kriteria "Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.33. Perbandingan realisasi dan capaian **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik** Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	89	93,31	104,84	Baik

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.34. Perbandingan realisasi **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik** Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89	92	93,31	101,42	Baik

indikator indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih namun masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi secara Nasional Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Indikator **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik** Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	89	93,31	104,84	Baik
BBPOM di Semarang	88	88,11	100,13	Baik
BBPOM di Surabaya	89,5	91,5	102,3	Baik
BBPOM di Bandung	88,5	85,91	97,07	Baik
Nasional	86	87,00	103,18	Baik

Target kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 104,84 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

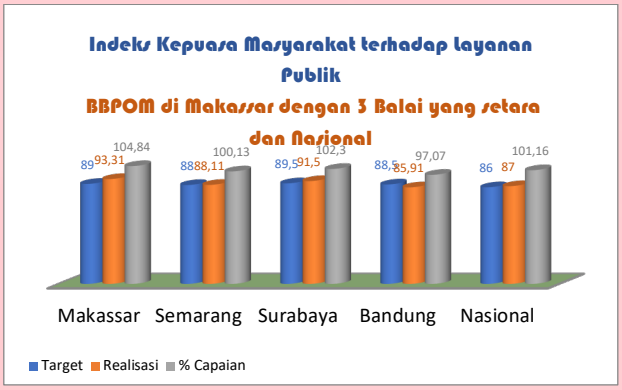

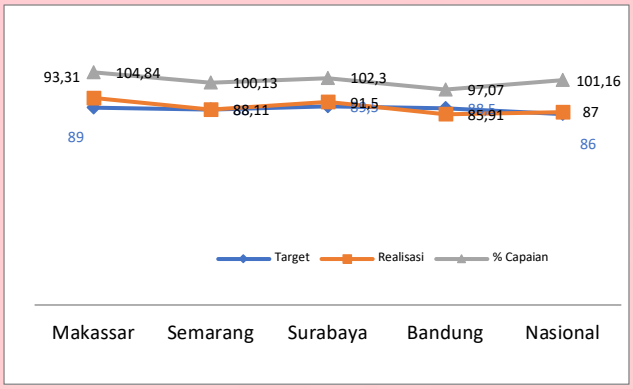

Gambar 3.16
Capaian Kinerja Indikator **Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik** Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar kategori baik antara lain :

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 BBPOM di Makassar dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :
- Pengujian : 10 orang
- SKI/SKE : 78 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 250 orang

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BBPOM Makassar terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 93,31 terhadap target yang ditetapkan yaitu 89. Berdasarkan hasil survey tersebut layanan publik di BBPOM Makassar mendapat katagori A (Sangat Baik). Namun jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2019 yaitu 88,77 maka terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Peningkatan indeks tersebut disebabkan 2 unsur yaitu :
1) Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran;
2) Sarana dan Prasarana.
Hal ini disebabkan terus intensnya BBPOM Makassar dan berkomitmen untuk tetap melakukan pelayanan Publik meskipun pandemi Covid-19 terjadi serta tetap melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap tuntas. Selain itu juga selama masa pandemi tetap ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik meskipun Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka masih belum bisa dilaksanakan dan dialihkan secara online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, google review, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena di masa pandemi seperti ini kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh Balai Besar POM di Makassar, ditunjukkan dengan adanya hasil perolehan SKM unit sebesar 93,31.

Alternatif Solusi

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat tahun 2020, BBPOM Makassar harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik.

Dari survey tersebut semua unsur pelayanan mengalami peningkatan dari tahun 2019 antara lain : 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 9) Sarana dan Prasarana, kecuali pada unsur ke- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mengalami penurunan 1,77 point. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM Makassar. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Meskipun masyarakat merasa kurang nyaman dan puas dengan layanan melalui media sosial, namun masyarakat menyadari bahwa kondisi pandemic memang memaksa kita semua merubah paradigma dan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah demikian drastis. Masyarakat menyambut baik dan antusias perubahan layanan dari tatap muka langsung menjadi layanan menggunakan media online, meskipun beberapa layanan publik misalnya pemberian rekomendasi SKI dan SKE memang telah dilakukan secara full online sejak beberapa tahun lalu.

Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha antara lain dengan melakukan sosialisasi atau komunikasi terkait peraturan-peraturan terbaru sehingga pelaku usaha dapat memahami peraturan dan prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut. Forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan Lintas Sektor diadakan rutin setiap tahun dengan mengundang instansi pemerintah terkait SKI/SKE, importir, eksportir dengan tujuan menyamakan persepsi dan pemahaman yang sama saat melakukan permohonan penerbitan SKI/SKE. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19. Pelaksanaan secara daring juga tidak dilakukan karena adanya pemotongan anggaran sehingga kegiatan ini ditiadakan.

Komunikasi melalui layanan WA, telepon, maupun email tetap dilakukan dengan tujuan memberikan layanan terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, memberikan informasi terbaru mengenai peraturan terkait serta tata cara permohonan penerbitan SKI/SKE. Sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan akses di saat

mengalami kendala, memenuhi persyaratan yang diperlukan dan dapat memperoleh *output* layanan lebih cepat.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Dari hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan dan mempertahankan capaian atas unsur pelayanan yang sudah mendapat kategori A (sangat baik) serta melakukan upaya untuk peningkatan hasil survei agar tetap A (sangat baik). Antara lain :
  - Perlu terus dilakukan upaya branding tentang "kemudahan pelayanan" di BBPOM Makassar, agar masyarakat tahu dan mau mendaftarkan setiap produknya untuk diuji.
  - Mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan yang professional dan penguaasan materi sehingga mutu kwalitas produk pelaku usaha bisa bersaing dengan produk luar di bawah pengawasan BPOM RI;
  - Mempertahankan Pelayanan yg sangat memuaskan;
  - Pemberian informasi lebih di tingkatkan;
  - Menerapkan standarisasi pelayanan publik khususnya agar pengusaha dapat terbantu dalam menerapkan cara produksi pangan dengan benar.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan per Semester sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
- Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP
- Meskipun masyarakat merasa kurang nyaman dan puas dengan layanan melalui media sosial, namun masyarakat menyadari bahwa kondisi pandemic memang memaksa kita semua merubah paradigma dan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah demikian drastis. Masyarakat menyambut baik dan antusias perubahan layanan dari tatap muka langsung menjadi layanan menggunakan media online, meskipun beberapa layanan publik misalnya pemberian rekomendasi SKI dan SKE memang telah dilakukan secara full online sejak beberapa tahun lalu.
- Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha antara lain dengan melakukan sosialisasi atau komunikasi terkait peraturan-peraturan terbaru sehingga pelaku usaha dapat memahami peraturan dan prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut.

- Forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan Lintas Sektor diadakan rutin setiap tahun dengan mengundang instansi pemerintah terkait SKI/SKE, importir, eksportir dengan tujuan menyamakan persepsi dan pemahaman yang sama saat melakukan permohonan penerbitan SKI/SKE. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19. Pelaksanaan secara daring juga tidak dilakukan karena adanya pemotongan anggaran sehingga kegiatan ini ditiadakan.
- Komunikasi melalui layanan WA, telepon, maupun email tetap dilakukan dengan tujuan memberikan layanan terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, memberikan informasi terbaru mengenai peraturan terkait serta tata cara permohonan penerbitan SKI/SKE. Sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan akses di saat mengalami kendala, memenuhi persyaratan yang diperlukan dan dapat memperoleh *output* layanan lebih cepat.

Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	6 Indeks Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Target 87 Realisasi 68,19 Capaian 78,37 %

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Target 55 Realisasi 51,91 Capaian 94,39 %

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 46 Realisasi 47,81 % Capaian 103,93 %

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 55 Realisasi 72,95 Capaian 132,64 %

Indeks Pelayanan Publik
Target 3,51 Realisasi 3,48 Capaian 99,15

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 5 indikator antara lain :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 70,27 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah 559 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 792 dengan realisasi 68,19 %. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 87 %

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	68,19	78,37	Cukup

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah 78,37 dengan kriteria cukup.

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras ataur ekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindaklanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
2) Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
3) Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada triwulan keempat adalah 792 keputusan/rekomendasi terdiri atas 291 keputusan/rekomendas diwilayah kerja BBPOM di Makassar dan 501 keputusan/rekomendasi di wilayah kerja Loka POM di Palopo , dari 792 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut hanya 559 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 607, Tindak lanjut = 496
    - Obat 226 keputusan/rekomendasi, 187 Tindak lanjut
    - Obat Tadisional; 37 keputusan/rekomendasi, 35 Tindak lanjut
    - Suplemen Kesehatan; 14 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
    - Kosmetik; 72 keputusan/rekomendasi, 63 Tindak lanjut
    - Pangan; 258 keputusan/rekomendasi, 199 Tindak lanjut

- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 31, Tindak lanjut = 21
    - Obat 3 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut
    - Obat Tadisional; 20 keputusan/rekomendasi, 10 Tindak lanjut
    - Suplemen Kesehatan; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
    - Kosmetik; 6 keputusan/rekomendasi, 6 Tindak lanjut
    - Pangan; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 146, Tindak lanjut = 34
    - Obat 29 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
    - Obat Tadisional; 31 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
    - Suplemen Kesehatan; 34 keputusan/rekomendasi, 7 Tindak lanjut
    - Kosmetik; 29 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
    - Pangan; 23 keputusan/rekomendasi, 7 Tindak lanjut
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 8, Tindak lanjut = 8
    - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
    - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
    - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
    - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
    - Pangan; 8 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.36. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	87	68,19	78,37	Cukup

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	95	68,19	71,78	Cukup

indikator indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.38
Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspkeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	87	68,19	78,37	Cukup
BBPOM di Semarang	87	82,98	95,38	Baik
BBPOM di Surabaya	87	88,22	101,40	Baik
BBPOM di Bandung	87	96,85	111,33	Sangat Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang sama yaitu 87, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di BBPOM Makassar dengan nilai 78,37 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020 sebagai berikut :

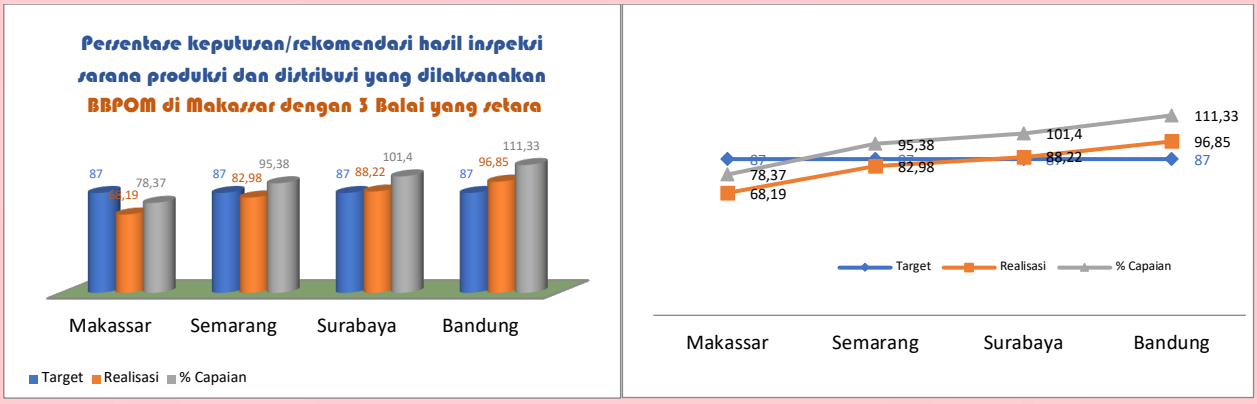

Gambar 3.17
Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kurang disebabkan pada 792 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan hanya terdapat 559 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Merupakan IKU yang pertama di tahun 2020 sehingga belum tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada tahun selanjutnya
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19.
- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sector untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan kategori cukup antara lain :

- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- Selama tahun 2020 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 792 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusanr/ekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
  - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 607, Tindak lanjut = 496, capaian 81,71 %
  - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 31, Tindak lanjut = 21,capaian 67,74 %
  - Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 146, Tindak lanjut = 34, capaian 23,29 %
  - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 8, Tindak lanjut = 8, capaian 78,29 %

  Dimana capain terendah adalah pada jenis Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain , capaian 23,29 %.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar, Loka POM di Palopo yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan kombinasi antara lain

menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan protocol Kesehatan dan analisa resiko sarana.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan keempat tahun 2020 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 51,91 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada tahun 2020 adalah 263 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 491 dengan realisasi 51,91 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 55 %

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Tahun 2020 adalah 94,39 % dengan kriteria Baik.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	51,91	94,39	Baik

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/ Rekomendasi hasili nspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/ respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan keempat adalah 491 keputusan/rekomendasi terdiri atas 236 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar dan 255 keputusan/rekomendasi di wilayah kerja Loka POM di Palopo , dari 491 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 263 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 457, Tindak lanjut = 246
  - Obat 170 keputusan/rekomendasi, 94 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 35 keputusan/rekomendasi, 13 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 12 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 63 keputusan/rekomendasi, 31 Tindak lanjut
  - Pangan; 177 keputusan/rekomendasi, 100 Tindak lanjut
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 34, Tindak lanjut = 17
  - Obat 12 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 22 keputusan/rekomendasi, 5 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	55	51,91	94,39	Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.41. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	75	51,91	69,21	Cukup

indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.42

Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspkeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	55	51,91	94,39	Baik
BBPOM di Semarang	77,6	78,01	100,53	Baik
BBPOM di Surabaya	53,80	53,49	99,42	Baik
BBPOM di Bandung	56,90	51,89	91,19	Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang sama yaitu 87, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di BBPOM Makassar dengan nilai 78,37 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2020 sebagai berikut :

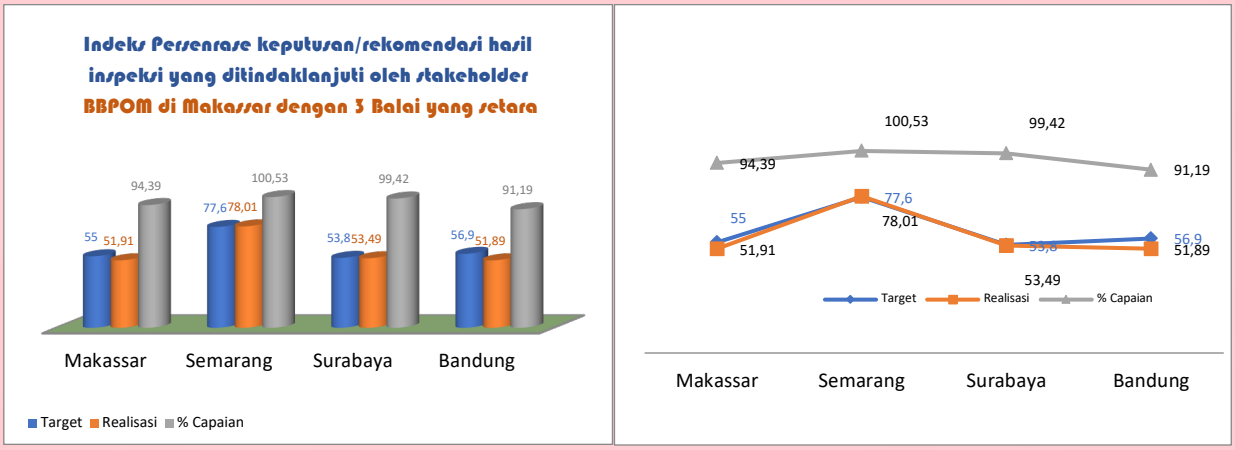

Gambar 3.18

Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Makassar sangat kurang disebabkan pada belum ada Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian untuk sarana pemerintah (PKM, RS dan GFK/IFK) kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran yang disiapkan oleh APBD.
- Untuk sarana IRTP masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran disebabkan oleh lesunya perekonomian selama masa pandemi covid-19

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)
- Meningkatkan koordinasi dengan stokeholder terkait.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder kategori Baik antara lain :

- Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
- Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
- Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2020
- Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

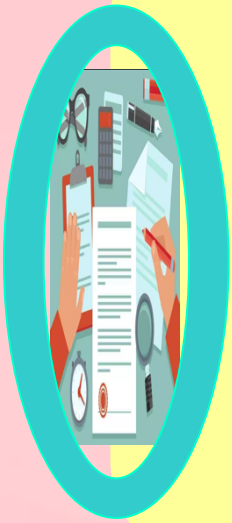

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan.
yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Capaian indkator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebesar 96,43 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan penilaiaan Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 adalah 113,45 % dengan realisasi sebesar 96,43 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 85 % dengan kriteria Sangat baik.

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	96,43	113,45	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada tahun 2020 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 351 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun 2020 sebanyak 364 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 351 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 24
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 73
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 102
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 152

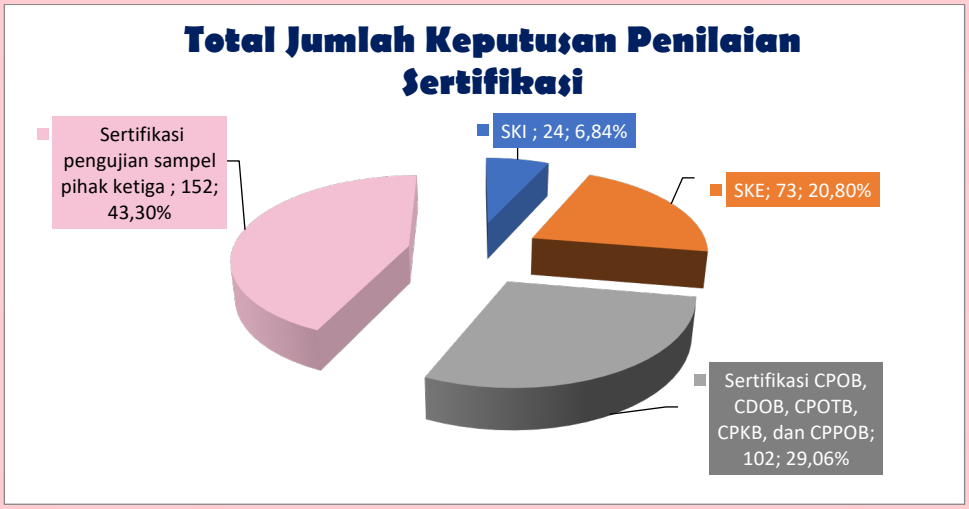

Gambar 3.19.
Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun 2020

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.
- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.44. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	83	83,87	101,05	Baik
Tahun 2020	85	96,43	113,45	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2020 dibanding tahun 2019 dari nilai 88,87 menjadi 96,43, capaiannya mengalami peninngkatan 12,56 point, pada kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.45. Perbandingan realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	97	96,43	113,45	Baik

indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.46
Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase keputusan Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	85	96,43	113,45	Sangat Baik
BBPOM di Semarang	85	99,09	116,57	Sangat Baik
BBPOM di Surabaya	95	98,61	98,61	Baik
BBPOM di Bandung	85	86,51	103,80	Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM di Bandung berada pada angka yang sama yaitu 85 berbeda dengan BBPOM di Surabaya barada pada target yang berbeda yaitu 95, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai 113,45 tertinggi kedua setelah BBPOM di Semarang dan capaian BBPOM Makassar diatas dari capaian BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut

ini perbandingan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 3.20
Capaian Kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Faktor Pendukung Capaian kinerja .

Hal yang mempengaruhi capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan kategori sangat baik disebabkan :

- Capaian kinerja persentase kepetusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 211 jumlah pemohon terdapat 199 Jumlah rekomendasi/

sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 94,31 % yang sesuai dengan time line

- Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian serrtifikasi diatas dari target yang diperjanjikan adalah Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang sesuai dengan timeline yaitu 152 dari 153 jumlah pemohon atau mencapai 99,34 % sesuai timeline. Hal ini juga sejalan dengan semakin meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Makassar yang mencapai 93,31
- Pelaksanaan Bimtek Percepatan Penerapan Mandatori CDOB dan Pelayanan *Desk* CAPA
- Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha tentang kesiapan dan komitmennya dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB.
- Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu sarana dalam membuat CAPA
- Petugas melakukan fasilitasi/pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sarana produksinya.

Alternatif Solusi

- Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebjakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomuikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian.
- Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi
- Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi

- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan sarana akan lebih ditingkatkan

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori Sangat Baik antara lain :

a) Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai

b) Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan

c) Dengan adanya masa darurat COVID-19, tetap dilakukan upaya peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang GMP dan registrasi melalui webinar (secara online)

d) Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
- Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada tahun 2020

- Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
-Untuk sarana produksi IOT tidak memennuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
   - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
   - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
   - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada Tahun 2020 BBPOM di Makassar telah optimal Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 47,81 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Makassar	46	47,81	103,93	Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 adalah 103,93 % dengan realisasi sebesar 47,81 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

di wilayah kerja BBPOM di Makassar di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 46 % dengan kriteria Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 106 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 228 sarana.

Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
  a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
  b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
  a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
  b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B

  - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan keempat adalah 228 sarana terdiri atas 159 sarana produksi diwilayah kerja BBPOM di Makassar dan 69 sarana di wilayah kerja Loka POM di Palopo yang selesai diperiksa, dari 228 sarana tersebut terdapat 119 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 5 Sarana
- Industri Pangan : 55 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 59 Sarana

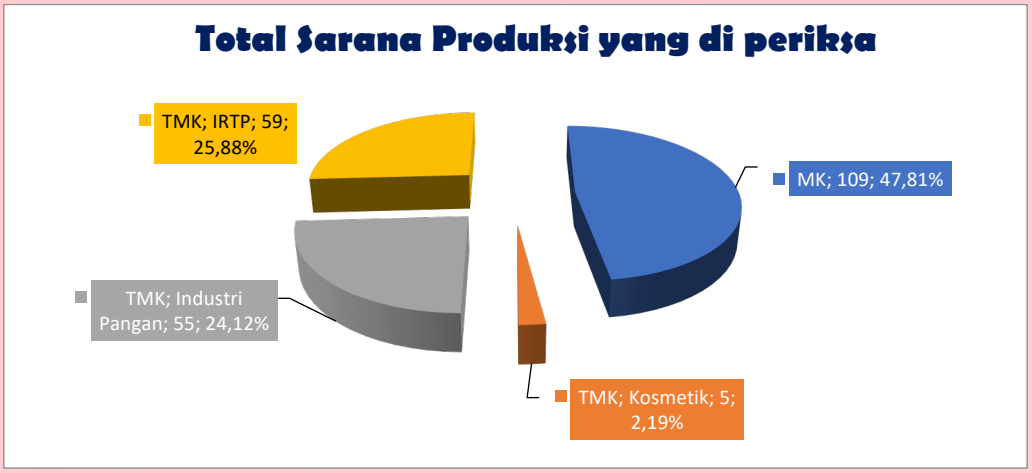

Gambar 3.21
Jumlah Sarana Produksi nyang diperiksa Tahun 2020

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.48. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	55	40,43	73,5	Cukup
Tahun 2020	46	47,81	103,93	Baik

Terdapat penurunan target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 berdasarkan hasil reviuw baseline capaian data realisasi persentase sarana produksi Obat an Makanan yang memenuhi ketentuan.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, terjadi kenaikan sebesar 7,38 point yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.49. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	67	47,81	71,35	Cukup

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.50
Capaian Kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	46	47,81	103,93	Baik
BBPOM di Semarang	46	48,16	104,69	Baik
BBPOM di Surabaya	46	51,24	111,39	Sangat Baik
BBPOM di Bandung	50	56,59	113,17	Sangat Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, masing-masing berada pada angka yang sama yaitu 46 kecuali BBPOM Bandung yaitu 50 , adapun hasil capaian realisasi kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja di BBPOM Makassar dengan nilai 103,93 % terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 3.22
Capaian Kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian kinerja dan alternatif solusi

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik disebabkan 228 sarana industri pangan olahan sejumlah 106 sarana yang memenuhi ketentuan dan sisanya sebanyak 119 sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB (untuk Produsen pangan olahan). Penyebab sarana produksi pangan olahan tidak dapat memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan CPPOB antara lain :

- Pelaku usaha sarana produksi pangan olahan tidak konsisten dalam menerapkan CPPOB
- Tidak semua karyawan yang bekerja di sarana produksi memahami CPPOB

Alternatif Solusi

- Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygine sanitasi pada sarana produksi industri pangan diwilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik antara lain :

Pada tahun 2020 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Mengawal ketat perencanaan pemeriksaan sarana secara daring dan luring setiap bulannya dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran, pencapaian target dan protokol kesehatan, serta kebijakan pemerintah setempat dan induk organisasi terkait pengendalian penyebaran Covid-19.

- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan terutama pemeriksaan secara luring terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi.

2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.
Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan dicapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 72,95 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020 adalah 132,64 % dengan realisasi sebesar 72,95 % sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 55 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.51
Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,95	132.64	Tidak dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 971 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 1.331 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksaa yaitu :

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.
f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada triwulan keempat tahun 2020 adalah 72,95 % diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 55 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan .

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan keempat adalah 1.331 sarana terdiri atas 1.036 sarana distribusi diwilayah kerja BBPOM di Makassar dan 295 sarana di wilayah kerja Loka POM di Palopo yang selesai diperiksa, dari 1.331 sarana tersebut terdapat 360 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 2 Sarana
- Apotik : 109 Sarana
- Toko Obat : 25 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 7 Sarana
- Rumah Sakit (RS) : 11 Sarana
- Puskemas : 27 Sarana
- Klinik : 9 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 30 sarana
- Fasilitas Distribusi Suplemen : 3 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 50 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 87 sarana

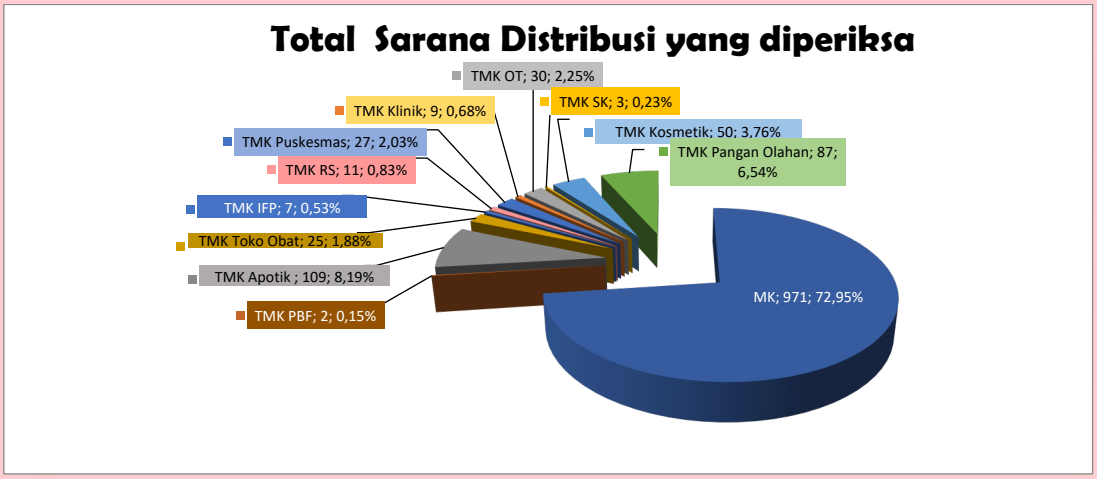

Gambar 3.23
Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa Tahun 2020

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.52. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	70	81,55	116,50	Sangat Baik
Tahun 2020	55	72,95	132.64	Tidak dapat disimpulkan

Terdapat penurunan target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 berdasarkan hasil reviuw baseline capaian data realisasi persentase sarana distribusi Obat an Makanan yang memenuhi ketentuan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, terjadi kenaikan sebesar 16,14 point yang berarti bahwa BBPOM di Makassar di telah berhasil meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.53. Perbandingan realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	80	72,95	91,18	Baik

indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.54

Capaian Kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	55	72,95	132.64	Tidak dapat disimpulkan
BBPOM di Semarang	55	58,66	106,65	Baik
BBPOM di Surabaya	55	48,43	88,06	Cukup
BBPOM di Bandung	76,00	73,69	96,96	Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang sama yaitu 55, kecuali BBPOM Surabaya yaitu 76,00 adapun hasil capaian realisasi kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di BBPOM Makassar dengan nilai 132,64 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020 sebagai berikut :

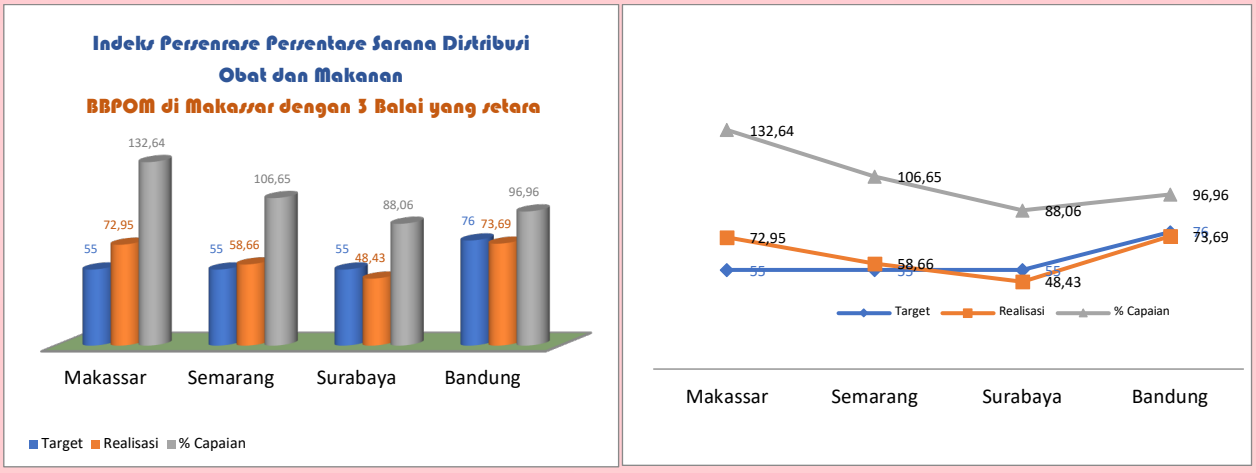

Gambar 3.24

Capaian Kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung Capaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori tidak dapat disimpulkan :

- Pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 1.331 sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Toko Obat). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 971 sarana (72,95%) memenuhi ketentuan dan 360 sarana (27,05%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 55% adalah toko obat (26,47%) dan rumah sakit (52,17%). Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.
- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada tahun 2020 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 742 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 572 sarana (77,08 %) memenuhi ketentuan dan 170 sarana (22,92%) tidak memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 55% adalah distribusi obat tradisional (79,17%), distribusi kosmetik (94,74%), distribusi pangan olahan (72,07%). Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran. Selama tahun 2020 berdasarkan laporan BBPOM Makassar telah ditemukan produk obat tradisional dan suplemen Kesehatan TIE/

kedaluwarsa sebanyak 330 item (64.944 pcs) dengan nominal Rp. 844.510.459,-. Produk tersebut diamankan oleh petugas Balai

Alternatif Solusi

- Dikarenakan terjadinya pandemic Covid 19, pada tahun 2020 terjadi penurunan target sarana distribusi obat dan makanan sebesar 12,11 % dari target awal 1.478 sarana menjadi 1.299 sarana. Penuruan target ini juga menyebabkan tejadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (online inspection). Pada awal terjadinya pandemic (Maret-April), pemeriksaan sarana dilakukan secara online inspection saja dan menyebabkan penuruan capaian sarana. Oleh karena itu mulai bulan Mei-Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara onsite ke sarana yang memiliki tingkat penularan covid 19 *low-medium risk*. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung kesarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksaanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

Penuruan target ini juga menyebabkan tejadinya penyesuaian cara pemeriksaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (online inspection). Pada awal terjadinya pandemic (Maret-April), pemeriksaan sarana dilakukan secara online inspection saja dan menyebabkan penuruan capaian sarana. Oleh karena itu mulai bulan Mei-Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara onsite ke sarana yang memiliki tingkat penularan covid 19 *low-medium risk*. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung kesarana, kita dapat melihat langsung

kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksaanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian pemeriksaan Sarana distribusi, maka mulai bulan Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan juga secara onsite (pemeriksaan langsung) kesarana distribusi obat dan makanan dalam jumlah yang lebih banyak daripada triwulan sebelumnya
- Balai Besar POM di Makassar melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2020 telah diundang menjadi narasumber pada kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Organisasi Profesi, memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaaan obat yang benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para pelaku usaha megetahui bagaimana cara mengelola obat yang benar sehingga akan meningkatkan persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
- Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, BBPOM di Makassar juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk obat dan makanan yang aman. Diharapkan melalui KIE masyarakat dapat memilih obat dan makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE (Tanpa Ijin Edar).
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

- **Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);**
- **Profesionalitas SDM (18%);**
- **Sarana Prasarana (15%);**
- **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);**
- **Konsultasi dan Pengaduan (15%);**
- **Inovasi (7%).**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah 3,51. Capaian Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 112,54 % dengan kriteria "Sangat Baik".

Tabel 3.55
Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2020, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks Pelayanan Publik dan Pada triwulan ketiga tahun 2020 realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar adalah 3,49 dengan persentase capaian 99,15 kategori Baik.

Sedangkan Pada triwulan keempat tahun 2020 realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar mengalamia peningkatan yaitu 3,38 diatas dari target 3,51 dengan persentase capaian 112,54 kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.56. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	3,33	-	-
Tahun 2020	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator indeks pelayanan publik, namun penilaian unit penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan pada tahun 2019. Terdapat peningkatan realisasi indeks pelayanan publik tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,62 point, hal ini disebabkan karena beberapa aspek pelayanan publik sudah dapat dipenuhi dengan baik misalnya aspek kebijakan, aspek profesionalisme SDM, system informasi pelayanan publik serta aspek konsultasi dan pengaduan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.57. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,51	3,95	87,58	Cukup

indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Indeks Pelayanan Publik**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik
BBPOM di Semarang	3,51	4,14	117,95	Sangat Baik
BBPOM di Surabaya	4,31	4,11	95,36	Baik
BBPOM di Bandung	3,7	4,20	113,51	Sangat Baik
Nasional	3,53	4,04	114,44	Sangat Baik

Target kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik di BBPOM Makassar dengan nilai 112,54 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Surabaya, lebih rendah dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang dan BBPOM di Bandung. Serta Hanya BBPOM Makassar yang berada dibawah capaian nasional, ketiga Balai lain yang setara sudah berada di atas capaian nasional.

Berikut ini perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

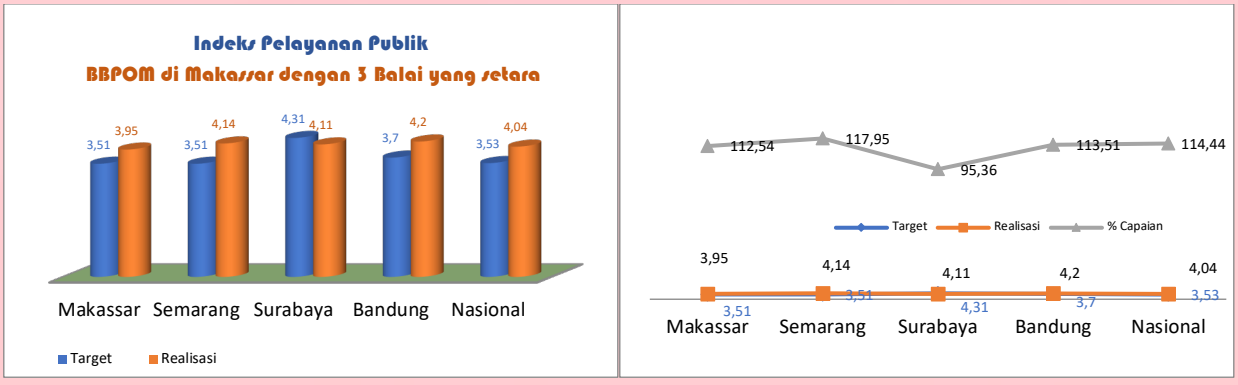

Gambar 3.25
Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar kategori Sangat baik antara lain :

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2020 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 3,95 bagi BBPOM di Makassar menunjukkan masih banyak aspek yang belum maksimal. Aspek Kebijakan Pelayanan, Prosfesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi merupakan aspek aspek yang masih harus ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain sbb :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme reward and punishment untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Makassar, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Makassar misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan

peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel.
Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Makassar ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Makassar

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pelayanan publik BBPOM Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun dan mereview Standar Pelayanan Publik BBPOM Makassar dengan melibatkan stake holder terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dll
- Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan reward untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih employee of the month pelayanan public.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain aplikasi telusur pihak ketiga, Sistem Tamu Digital, Sistem Registrasi dan Sertifikasi. Selain itu BBPOM Makassar akan mereview kebijakan pelayanan publik yang lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dari BBPOM Makassar.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan renovasi ruang layanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Namun terjadi penurunan indeks pelayanan publik dari tahun sebelumnya disebabkan karena masih ada beberapa aspek yang belum ditangani secara maksimal. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain sbb :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.
- Pemanfaatan system informasi di semua aspek tersebut merupakan kunci peningkatan pelayanan publik BBPOM di Makassar. Mau tidak mau terutama pada masa pandemic seperti saat ini, system informasi merupakan solusi untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan renovasi ruang layanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Sehingga terjadi peningkatan nilai indeks pelayanan publik dari tahun sebelumnya namun masih ada beberapa aspek yang belum ditangani secara maksimal. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.

Pemanfaatan system informasi di semua aspek tersebut merupakan kunci peningkatan pelayanan publik BBPOM di Makassar. Mau tidak mau terutama pada masa pandemic seperti saat ini, system informasi merupakan solusi untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Menyusun dan mereview Standar Pelayanan Publik BBPOM Makassar dengan melibatkan stake holder terkait.
- Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan *reward* untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan public.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, akan dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu BBPOM Makassar akan mereview kebijakan pelayanan publik yang lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dari BBPOM Makassar.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.
- Akan dikembangkan layanan *live chat* di website BBPOM di Makassar sehingga masyarakat dapat terlayani lebih baik.

Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

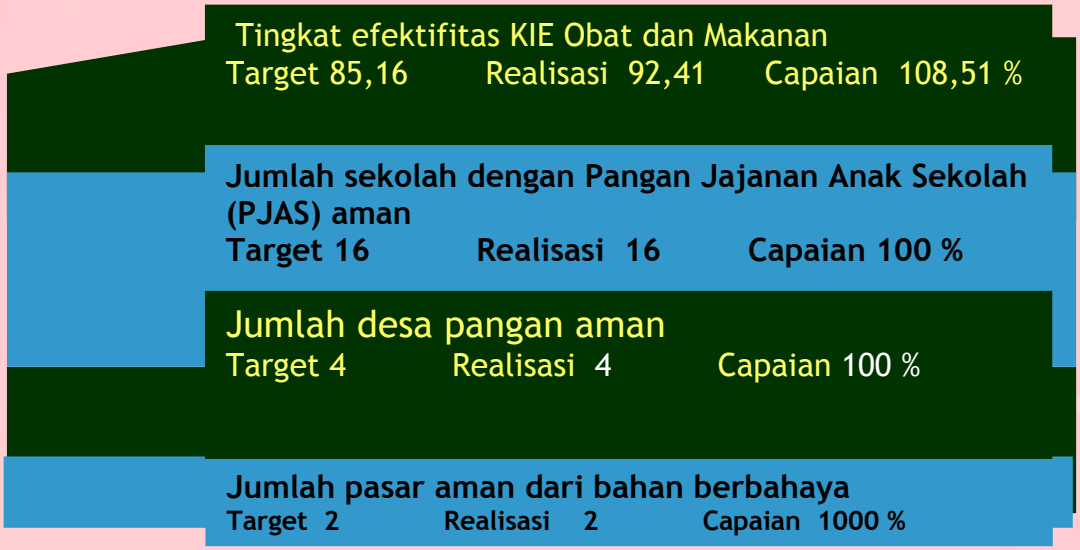

Pada sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik
- KIE langsung ke masyarakat dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *faceto face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar , menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Target Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan untuk Tahun 2020 adalah 85,16. Capaian Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,51 % dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.59
Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	92,41	108,51	Baik

Perhitungan Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan IV merupakan hasil rata-rata dari Balai dan Loka serta hasil rata-rata realisasi pada triwulan II hingga triwulan IV. Pada triwulan IV tahun 2020, Balai Besar POM di Makassar telah menerima hasil penilaian dari Biro HDSP dengan responden sebanyak 32 orang menghasilkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,41. Loka POM Palopo mendapat nilai 89,03 dengan 44 responden. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 108,51 % dengan kriterian "Baik".

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 32 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	85,16	92,41	108,51	Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.61. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	85,16	92,18	92,41	100,25	Baik

indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2020 **mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh

kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	85,16	92,41	108,51	Baik
BBPOM di Semarang	84,31	91,39	108,39	Baik
BBPOM di Surabaya	89,31	93,87	105,11	Baik
BBPOM di Bandung	87,43	90,70	103,74	Baik
Nasional	88,80	91,56	103,10	Baik

Target kinerja Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 108,51 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

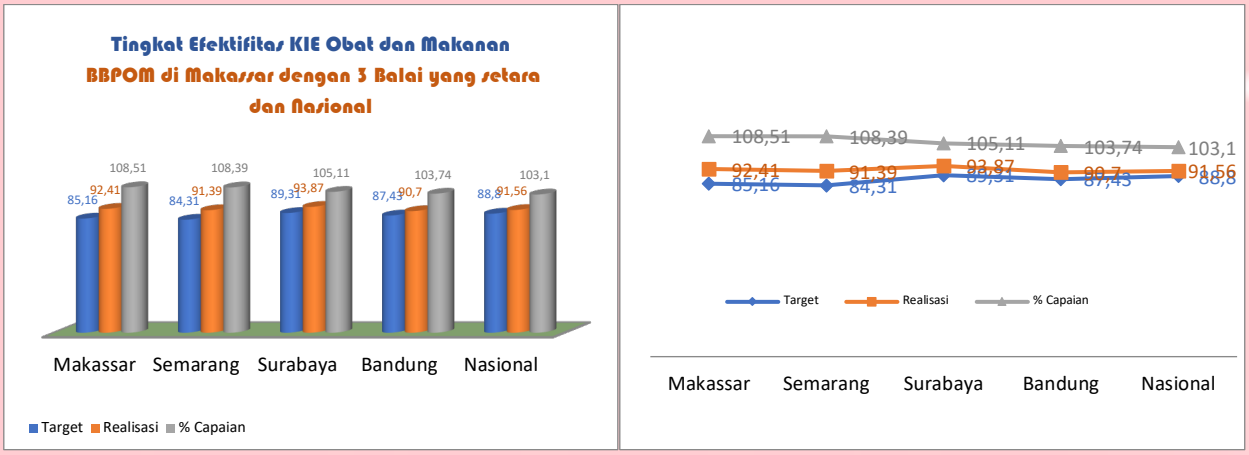

Gambar 3.26
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan baik antara lain :

- Meningkatnya frekuensi KIE tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat maupun KIE Pola Baru pada bulan Oktober sampai Desember 2020 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pada Tahun 2020 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 90 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- Pembuatan konten KIE di media social dalam berbagai bentuk seperti infografis dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
- Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah Work From Home (WFH), sehingga pelayanan public yang dilakukan mayoritas melalui aplikasi WhatsApp
- Selama masa pandemic dibuka layanan informasi melalui media sosial untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan pemahamanan masyarakat tentang keamanan

dan mutu Obat dan Makanan sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan
- Layanan informasi melalui media social ditingkatkan (facebook, Instagram, tweeter)

Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 orang. Indeks efektifitas KIE pada Tahun 2020 sebesar 92,41 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 93,90; aspek pemahaman 92,45; aspek manfaat 94,53 dan aspek minat 85,94. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Makassar untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang jauh melebihi target merupakan hasil kerja keras selama triwulan I, II, III dan IV tahun 2020. Namun BBPOM Makassar harus tetap konsisten melaksankan program intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Makassar tetap terjalin
- Pelayanan informasi melalui media lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan Ig Live dan Webwinar
- Pada Tahun 2020 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 90 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 orang. Indeks efektifitas KIE pada triwulan IV sebesar 92,41 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 93,90; aspek pemahaman 92,45; aspek manfaat 94,53 dan aspek minat 85,94.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Nilai indikator "Pemahaman" sebagai kontribusi terbesar pada pencapaian indeks tahun 2020 dapat disebabkan beberapa hal yaitu:
  a. Meningkatnya KIE secara daring dalam bentuk webinar di masa pandemi.
  b. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
  c. Pada triwulan 4 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
  d. Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar (*goody bag*).
- Kontributor kedua pada pencapaian indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "Manfaat", yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE.
- Jenis media KIE yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE BPOM, untuk jenis penyuluhan, Virtual (Webinar/seminar online/daring), Media Sosial (Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), Telegram) memiliki indeks yang lebih tinggi dibanding media yang lain. Hal ini disebabkan karena Jenis media penyuluhan dan Virtual memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara BBPOM di Makassar dengan masyarakat/ audiens.
- Mayoritas masyarakat 'Berminat" dan "sangat berminat" mengikuti kegiatan KIE BPOM. Informasi/topik yang paling banyak diminati adalah Pangan Olahan, karena terkait dengan kebutuhan pokok, topik berikutnya yang diminati adalah mengenai Obat dan Kosmetik. Topik lainnya yang diminati masyarakat diantaranya mengenai tata cara registrasi, informasi tentang air minum isi ulang, Alkes dan PKRT, isu terkini, informasi COVID-19, dll.
- Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat,

apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hal ini di lakukan agar kehadiran BBPOM di Makassar dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target merupakan hasil kerja keras selama tahun 2020 baik dari Tim BBPOM Makassar maupun Tim Tokoh Masyarakat. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat BBPOM di Makassar lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM di Makassar tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM di Makassar sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).
- Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM Makassar akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi tentang obat dan makanan.
- Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial.
- Mempertahankan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS
   Advokasi PJAS bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pemetaan Kantin Sekolah.
   Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi.
   Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.
3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam

penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai *agent of change* implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya
5. Audit Surveilan PBKPKS.
   Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilan PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilan dan Pengawalan PBKPKS di daerah diharapkan dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilan dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Pada Tahun 2020 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi level I, realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada triwulan IV tahun 2020 adalah sebanyak 16 sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria “Baik”.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Pada triwulan I , II dan III tahun 2020 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I, II dan III tahun 2020.

Tabel 3.63
Target Kinerja Indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	% Capaian	Kriteria
sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	16	16	100 %	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	16	16	100	Baik

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.65. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	104	16	15,38	Sangat Kurang

indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat kurang. karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024. Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.66
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020

Indikator Kinerja **Jumlah sekolah dengan (PJAS) Aman**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	16	16	100	Baik
BBPOM di Semarang	16	18	112,50	Sangat Baik
BBPOM di Surabaya	16	16	100	Baik
BBPOM di Bandung	16	16	100	Baik
Nasional	506	-	-	-

Target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang sama, adapun hasil capaian realisasi kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di BBPOM Makassar dengan nilai 100 sama apabila dibandingkan dengan BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan 3 BBPOM Makassar, BBPOM Bandung dan BBPOM Surabaya. Berikut ini perbandingan capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

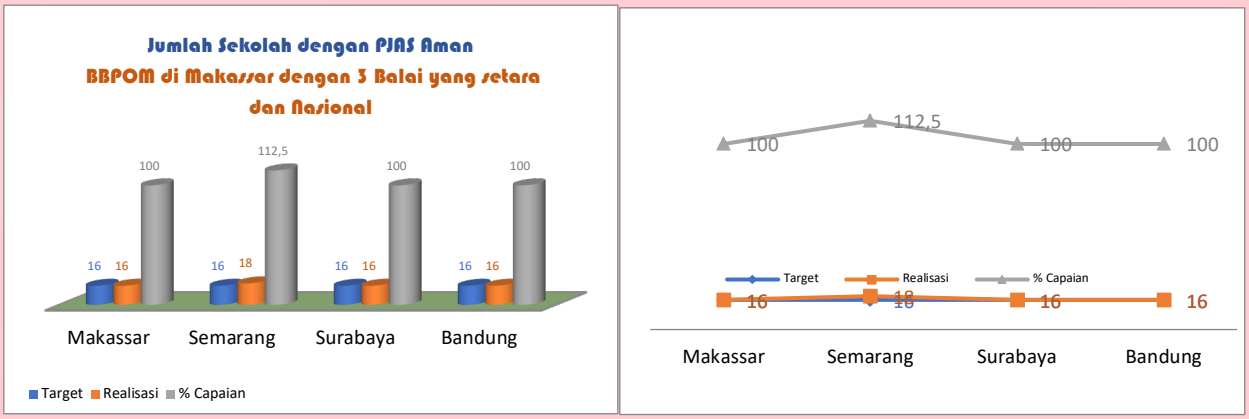

Gambar 3.27
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman disebabkan oleh :

1. Setiap tahapan intervensi dilaksanakan sesuai rencana dengan mematuhi prokes
2. Sekolah yang diintervensi sudah diseleksi yang berkomitmen
3. Komitmen stakeholder (Dinas Pendidikan) ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan intervensi
4. Telah dilakukan pengurangan target terhadap intervensi sekolah dengan PJAS aman, dari 20 sekolah menjadi 16 sekolah pada 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan sampai pada akhir Tahun 2020 adalah audiensi, survey kantin sekolah, advokasi secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di 2 (dua) Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan di Sekolah, serta Sertifikasi Level I.
5. Adanya situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini menyebabkan kendala tersendiri bagi terlaksananya kegiatan intervensi PJAS aman, sehingga telah dilakukan beberapa penyesuaian tahapan kegiatan diantaranya beberapa tahapan kegiatan yang semula direncanakan untuk dilaksanakan secara langsung menjadi harus dilaksanakan secara daring. Selain itu, beberapa tahapan kegiatan intervensi seperti audit sarana dan prasarana kantin sekolah juga tidak bisa dilakukan sehingga untuk kegiatan intervensi PJAS di tahun 2020 hanya dilakukan sampai tahapan sertifikasi level I berupa self assessment yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan diverifikasi oleh petugas BBPOM di Makassar.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Sekolah dasar di kabupaten umumnya belum memiliki kantin sekolah atau hanya kantin sekolah darurat;
3. Kegiatan harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan mengumpulkan banyak orang.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan *physical/social distancing* yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan peserta dalam satu tempat.

Alternatif Solusi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas khususnya dalam intervensi kantin sehat.
2. Jika pandemi masih berlanjut, bahan promosi akan dikirimkan ke sekolah yang diintervensi.
3. Merevisi target Balai Besar POM di Makassar yang semula 20 sekolah menjadi 16 Sekolah di 2 kabupaten
4. Melakukan advokasi lintas sektor secara sinergis untuk kabupaten/kota yang akan diintervensi PJAS, Desa, dan pasar
5. MoU sebagai komitmen Pemda untuk mensukseskan program
6. Pendampingan secara lebih aktif agar dapat mengikuti kompetisi nasional

Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan adanya berbagai macam penyesuaian dalam tahapan intervensi kegiatan PJAS aman sehingga mengakibatkan adanya tahapan yang tidak bisa dilakukan di tahun 2020. Untuk itu BBPOM di Makassar akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah Tahapan audit sarana dan prasarana kantin sekolah yang belum bisa dilakukan di tahun 2020 selanjutnya akan dilakukan di tahun 2021.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kondisi pandemic mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Kegiatan bimtek yang seharusnya dilaksanakan secara langsung harus dilaksanakan secara online, demikian juga tahapan kegiatan yang harus disesuaikan seperti telah dibahas di atas. Namun demikian, komitmen dari kepala sekolah, guru, pengelola kantin yang tetap mendukung pelaksanaan program ini mengakibatkan program dapat tetap dilaksanakan. Pemberian paket edukasi dan paket

untuk kader sekolah membuat komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Jumlah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan adanya berbagai macam penyesuaian dalam tahapan intervensi kegiatan PJAS aman sehingga mengakibatkan adanya tahapan yang tidak bisa dilakukan di tahun 2020. Untuk itu BBPOM di Makassar akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah. Tahapan audit sarana dan prasarana kantin sekolah yang belum bisa dilakukan di tahun 2020 selanjutnya akan dilakukan di tahun 2021.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata
Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman. Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. *Gap Asessment* merupakan penilaian awal terhadap pengetahuan kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan dan kemampuannya dalam melaksanakan praktek keamanan pangan.

Gap asessment dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Dalam rangka *gap asessment* Gerakan Keamanan Pangan Desa, Tim GKPD BBPOM di Makassar bersama fasilitator lapangan dan 6 enumerator melaksanakan survei terhadap kader dan komunitas desa yang berlokasi di 4 desa yang akan diintervensi program gerakan keamanan pangan desa. Responden yang diambil datanya merupakan calon kader dan calon komunitas desa/usaha pangan desa yang akan mengikuti bimtek dan fasilitasi keamanan pangan. Hasil *gap assessment* dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan)

Setelah diperoleh data *baseline* pengetahuan komunitas desa yang akan diintervensi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan). Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan.

Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan yang dilatih di bidang keamanan pangan . Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan kader yang dilatih

4. Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan dilingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas

dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan diintervensi. Bimtek keamanan pangan dilakukan terhadap komunitas masyarakat yang terlebih dahulu telah diambil datanya pada kegiatan *gap assessment*. Komunitas masing-masing terdiri dari 10 orang. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan data nilai *pre-test* dan *post-test* peserta Bimteknkomunitas desa dan usaha pangan desa, dapat dilihat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah mengikuti Bimtek ini.

5. Fasilitasi keamanan pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas BBPOM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter pengujian *Methanyl yellow, Rhodamine B, Boraks dan Formalin.* Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya.

Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan apresiasi dalam Desa Pangan Aman *Award* yang diumumkan pada puncak perayaan ulang tahun Badan POM RI setiap tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan GKPD di Kabupaten yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya, dilaksanakan pengambilan data dalam rangka Monev dilaksanakan secara langsung terhadap seluruh kader keamanan pangan desa dan komunitas desa yang diintervensi di setiap desa/kelurahan. Kader dan komunitas desa (masyarakat desa maupun usaha pangan desa) yang telah diintervensi diambil data mengenai pengetahuan, persepsi dan perilaku tentang penerapan prinsip keamanan pangan selama menangani pangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan dalam melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program GKPD tahun berikutnya.

Selain Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pula kegiatan. Pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi dalam rangka pembentukan Desa Paman

Pratama agar dapat dikembangkan menjadi Desa Paman Madya dan selanjutnya menjadi Desa Paman Mandiri. Kegiatan pengawalan ini dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Makassar agar desa menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pada akhir triwulan Tahun 2020 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada Tahun 2020 adalah sebanyak 4 (empat) desa. Capaian Jumlah desa pangan aman telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.67
Jumlah desa pangan aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	4	4	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.68. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Jumlah desa pangan aman	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	4	4	100	Baik

Realisasi Tingkat Jumlah desa pangan aman Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.69. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4	32	4	12,5	Sangat Kurang

indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat kurang. karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024. Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Jumlah desa pangan aman **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Jumlah desa pangan aman BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Jumlah desa pangan aman**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	4	4	100	Baik
BBPOM di Semarang	6	6	94,10	Baik
BBPOM di Surabaya	6	6	100	Baik
BBPOM di Bandung	6	6	100	Baik
Nasional	158	157	99,36	Baik

Target kinerja Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Jumlah desa pangan aman di BBPOM Makassar , BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung dengan nilai 100 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

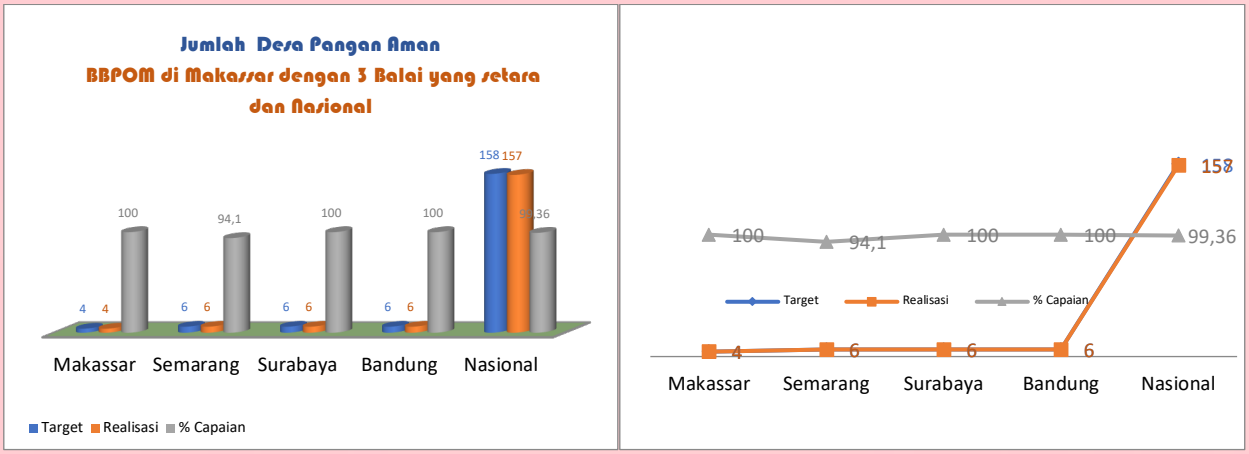

Gambar 3.28
Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan di wilayahnya;
2. Adanya sikronisasi program desa dalam rangka penanganan stunting yang sejalan dengan program kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa;

3. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

Telah dilakukan pengurangan target terhadap intervensi desa pangan aman dari 6 desa menjadi 4 desa di 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar. Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada akhir tahun 2020 adalah audiensi dan advokasi secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan II, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Tidak adanya kordinator lapangan yang dapat memantau jalannya program di desa yang diintervensi;
4. Kegiatan harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan mengumpulkan banyak orang.
Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan *physical / social distancing* yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan peserta dalam satu tempat.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Merevisi target BBPOM di Makassar yang semula 6 desa menjadi 4 desa
2. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan adanya berbagai macam penyesuaian dalam tahapan intervensi kegiatan Desa Pangan Aman. Untuk itu BBPOM di Makassar akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman dalam memperluas cakupan intervensi di komunitasnya. Diperlukan komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan

pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

3. Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada tahun 2020 adalah audiensi dan advokasi secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan II, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya pencapaian indicator Desa Pangan Aman di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Adanya komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen berkontribusi secara positif pada pencapaian target Desa pangan aman.
- Komitmen dari Kepala Desa, aparat desa dan kader keamanan pangan desa sehingga semua tahapan pelaksanakan kegiatan berjalan lancar
- Peran serta dari lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, sebagai pendamping desa dan yang memiliki wilayah, sehingga bisa mengajak warga desa untuk berperan aktif dalam penerapan keamanan pangan.

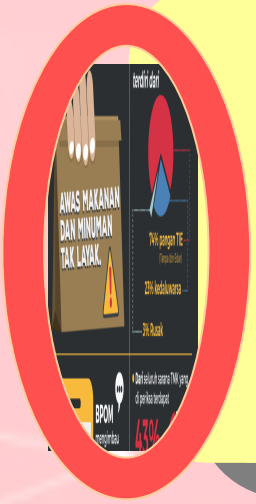

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.
Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan
peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :
1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I, II dan III tahun 2020 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I, II dan III tahun 2020.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :
1. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

2. Advokasi
Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.
Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Penyuluhan komunitas pasar
Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

5. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan lab keliling, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai Besar/Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar.

Petugas Balai Besar/Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti mobil laboratorium keliling, media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai Besar/Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta
memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F
riteria Pasar Aman meliputi :

1) *Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
2) *Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
3) *Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tahun 2020 jumlah realisasi pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 2 (dua) pasar. Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.71
Target Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Makassar	2	2	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.72. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	2	2	2	Baik

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.73. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	23	2	8,69	Sangat Kurang

indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat kurang. karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024. Perlu percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.74
Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja ***Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	2	2	100	Baik
BBPOM di Semarang	3	3	100	Baik
BBPOM di Surabaya	4	4	100	Baik
BBPOM di Bandung	2	2	100	Baik
Nasional	64	66	103,12	Baik

Target kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di BBPOM Makassar dengan nilai 108,51 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di

Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

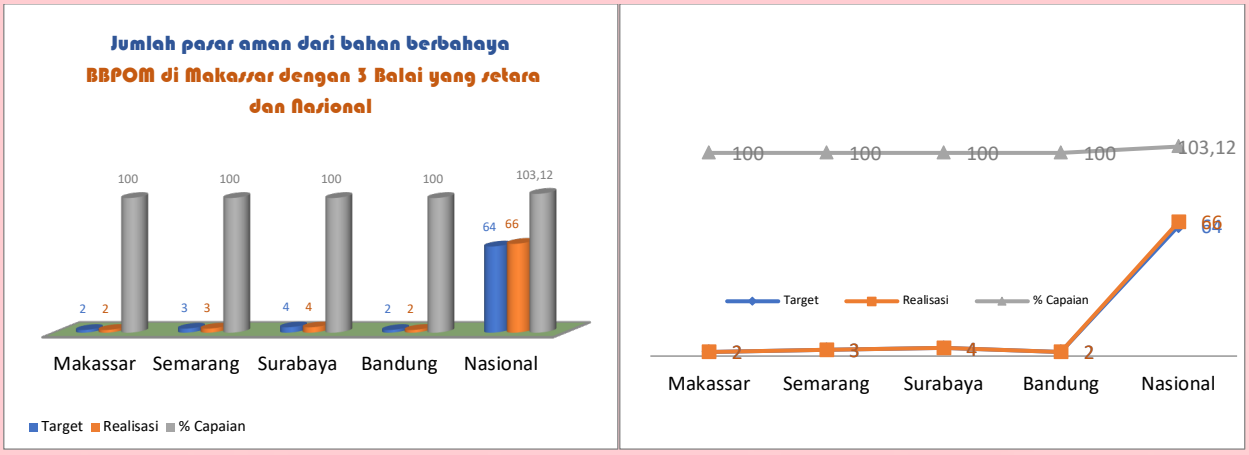

Gambar 3.29
Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan di wilayahnya;
2. Adanya sikronisasi program desa dalam rangka penanganan stunting yang sejalan dengan program kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa;
3. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

Telah dilakukan pengurangan target terhadap intervensi pasar aman dari bahan berbahaya dari 4 pasar menjadi 2 pasar di 4 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar. Kegiatan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah dilakukan sampai pada triwulan IV tahun 2020 adalah audiensi, survey pasar, advokasi

secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan kepada komunitas pasar, serta tahap Monitoring dan Evaluasi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Tidak adanya kordinator lapangan yang dapat memantau jalannya program di pasar yang diintervensi;
4. Kegiatan harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan mengumpulkan banyak orang. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan *physical / social distancing* yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan peserta dalam satu tempat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

4. Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas di pasar yang diintervensi untuk menggantikan peran kordinator lapangan;
5. Merevisi target BBPOM di Makassar yang semula 4 pasar menjadi 2 Pasar

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan beberapa tahapan intervensi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya harus dilakukan secara daring. Meskipun demikian, hal ini tidak sampai menjadi hambatan yang berarti dalam terus menyampaikan intervensi terkait keamanan pangan di komunitas pasar. BBPOM di Makassar akan terus melakukan pengawalan terhadap Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang telah diintervensi di tahun 2020, selain itu juga diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja di atas adalah:

- Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar

belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain

- Kegiatan KIE disertai sampling dan uji menggunakan mobil laboratorium keliling yang telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan sasaran pasar non intervensi, sehingga program tidak hanya dirasakan di pasar intervensi saja.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya pencapaian indicator Pasar Aman Bahan Berbahaya di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan beberapa tahapan intervensi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya harus dilakukan secara daring. Meskipun demikian, hal ini tidak sampai menjadi hambatan yang berarti dalam menyampaikan intervensi terkait keamanan pangan di komunitas pasar. BBPOM di Makassar akan terus melakukan pengawalan terhadap Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang telah diintervensi di tahun 2020.
- Diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Diharapkan agar Pemerintah Daerah mereplikasi program Pasar Aman Bahan Berbahaya ke pasar pasar lain.

Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1 **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

2 **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Pada sasaran strategis keenam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang diperjanjikan untuk Tahun 2020.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 95,21 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%
B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 adalah 112,96 % dengan realisasi sebesar 95,21 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.75
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,21	112,01	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.858 sampel dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 1.616 terhadap Jumlah target sampel Obat selama tahun 2020 sebesar 1.860 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76
Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	584	501
Obat Tradisional	382	315
Suplemen Kesehatan	127	125
Kosmetik	765	675
Total	**1.858**	**1.616**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.77. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	85	95,21	112,01	Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.78 Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	90	95,21	105,79	Baik

indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.79
Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	85	95,21	112,01	Sangat Baik
BBPOM di Semarang	92	100	108,70	Baik
BBPOM di Surabaya	80	94,52	118,16	Sangat Baik
BBPOM di Bandung	82	89,75	109,45	Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM Makassar dengan nilai 112,01 tertinggi kedua setelah BBPOM di Surabaya apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

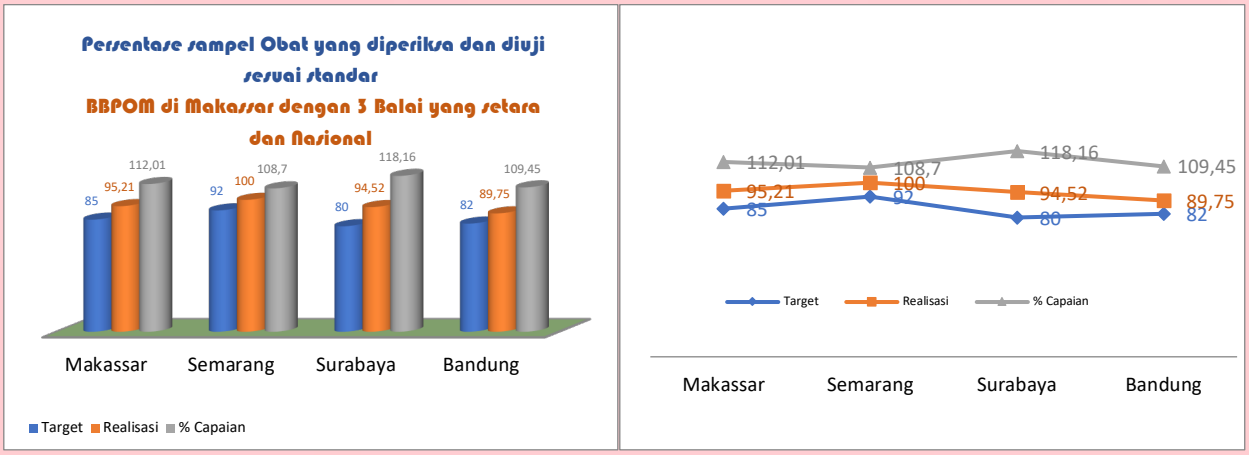

Gambar 3.30
Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori sangat baik antara lain :

- Adanya penurunan target pemenuhan parameter standar sampai 20%, penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2020. Di masa pandemi covid-19 ini BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain seperti Univeritas dan Provider Pelatihan. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.
- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi

anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2020, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2021 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2021 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 92,57 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan i Diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 adalah 123,43 % dengan realisasi sebesar 92,57 % Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2020.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	92,57	123,43	Tidak Dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 882 sampel dan Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 739 terhadap Jumlah target sampel Makanan selama tahun 2020 sebesar 889 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81
Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020

Komoditi	diperiksa	diuji
Makanan	882	739
Total	**882**	**739**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.82. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	75	92,57	123,43	Tidak Dapat disimpulkan

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.83. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	85	92,57	108,90	Baik

indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja ***Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	75	92,57	123,43	Tidak Dapat disimpulkan
BBPOM di Semarang	92	100	108,70	Baik
BBPOM di Surabaya	82	99,76	121,65	Tidak Dapat disimpulkan
BBPOM di Bandung	90	100	111,11	Sangat Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM Makassar dengan nilai 123,43 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Surabaya, BBPOM Semarang dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

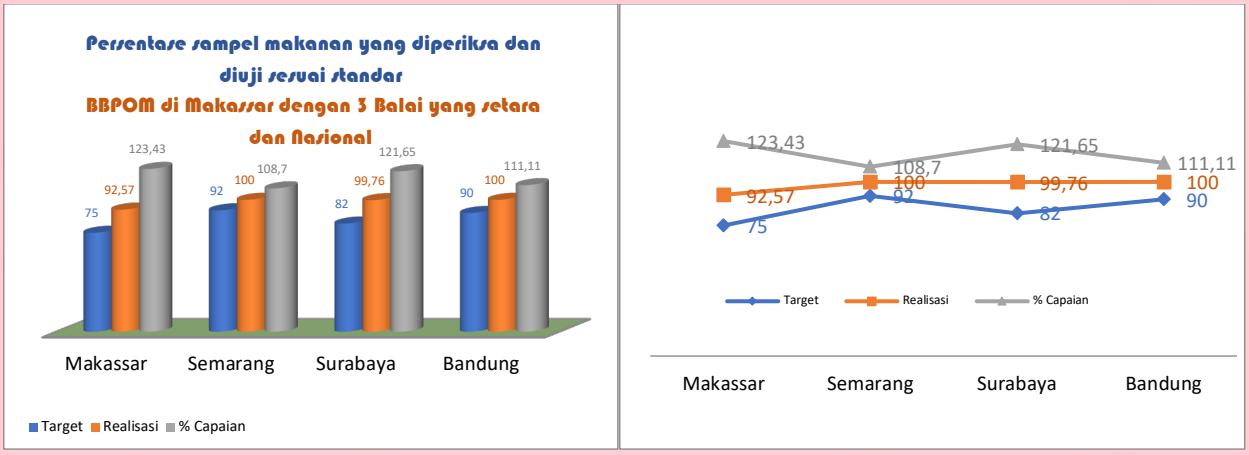

Gambar 3.31
Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori sangat baik antara lain :

- Adanya penurunan target pemenuhan parameter standar sampai 20%, penurunan target dilakukan dalam rangka mengantisipasi metode sampling acak yang akan diterapkan di semua komoditi pada tahun 2020. Di masa pandemi covid-19 ini

BBPOM Makassar tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan time line pengujian serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

- ❖ Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia
- ❖ Kompetensi analis dalam melakukan parameter uji sesuai yang ditetapkan dalam pedoman sampling juga merupakan penyebab keberhasilan pencapaian target
- ❖ Pada triwulan keempat kegiatan sampling dan pengujian sempat terhambat dengan adanya pandemi Covid- 19. Dengan kondisi pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir terdapat protokol yang harus di patuhi seperti pembatasan jumlah staf yang hadir perhari. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BBPOM di Makassar. Tugas tambahan laboratorium untuk menguji sampel covid-19 sedikit banyak juga berpengaruh terhadap penyelesaian sampel.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- ❖ Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- ❖ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.

h. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Selama masa pandemi, seluruh kegiatan bimtek internal yang direncanakan pada tahun 2021 oleh oleh BBPOM di Makassar ditiadakan, namun kegiatan pengembangan kompetensi tetap dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan

secara daring maupun luring baik yang diselenggarakan oleh PPPOMN maupun oleh pihak lain. Tidak adanya Bimtek internal cukup berpengaruh khususnya untuk menerapkan metode analisis baru yang belum pernah dilakukan.

- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2020 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 17025:2017
- Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2020, maka perlu dilakukan review terhadap target indikator pada tahun 2021 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru. Untuk tahun 2021 juga telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.

Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Tools

Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada Tahun 2020 BBPOM di Makassar telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 98,04 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ perkara}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan keempat tahun 2020 adalah 146,33 % dengan realisasi sebesar 98,04 % perkara yang diselesaikanI d wilayah kerja BBPOM di Makassar. Diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 67 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.85
Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	67	98,04	146,33	Tidak Dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.86
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020

s.d TW IV (Jan - Des)										
Target		**Realisasi**		**Koefisien Tahun Berjalan**	**Koefisien Carry Over**	**Bobot**	**Nilai Realisasi**	**Total Nilai Realisasi**	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	**Perkara Carry Over**	**Perkara s.d Triwulan n**	**Perkara Carry Over**							
8	7	0		1,00		0,15	15,00%	97,95%	100,00%	97,95%
		0	0	1,00	0,47	0,4	40,00%			
		0	3	1,00	0,47	0,3	30,00%			
		8	4	1,00	0,27	0,15	12,95%			
8	7	8	7							
1	0			1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		0		1,00	0,00	0,4	40,00%			
		0		1,00	0,00	0,3	30,00%			
		1		1,00	0,00	0,15	15,00%			
1	0	1	0							
	0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
				0	0	0,4	0%			
				0	0	0,3	0%			
				0	0	0,15	0%			
0	0	0	0							
9	7	0		1,00		0,15	15,00%	98,04%	100,00%	98,04%
		0	0	1,00	0,44	0,4	40,00%			
		0	3	1,00	0,44	0,3	30,00%			
		9	4	1,00	0,25	0,15	13,04%			
9	7	9	7							

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.87. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	67	98,04	146,33	Tidak Dapat disimpulkan

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.88. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	90	98,04	108,93	Baik

indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020 **mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.89
Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	67	98,04	146,33	Tidak Dapat disimpulkan
BBPOM di Semarang	70	71,39	101,99	Baik
BBPOM di Surabaya	61	66,52	109,05	Baik
BBPOM di Bandung	74	62,33	84,23	Cukup
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 146,33 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

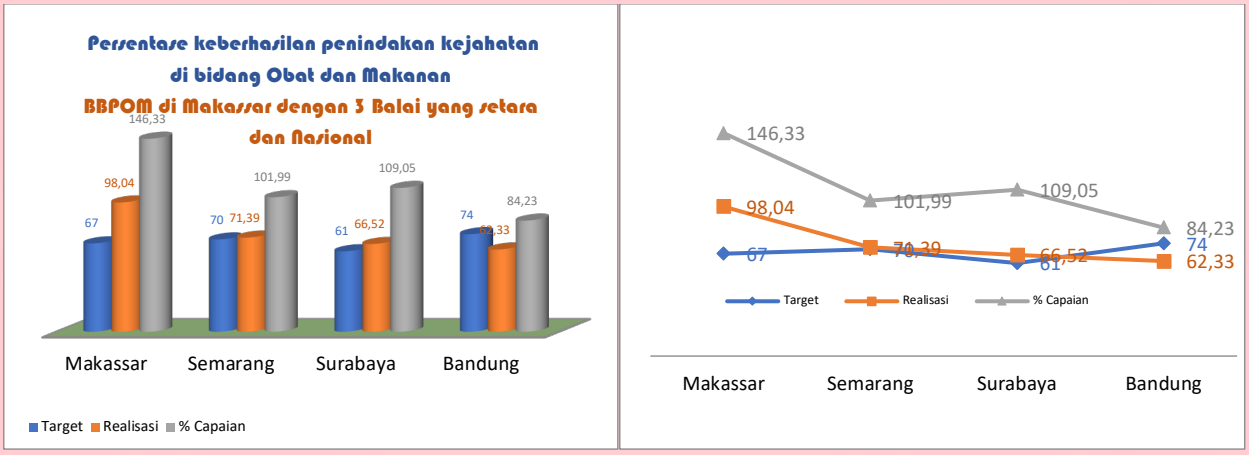

Gambar 3.32
Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung ketercapaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor pendukung :

- koordinasi lintas sektor, melalui: Penandatanganan perjanjian kerjasama/MoU antara Balai Besar POM di Makassar dengan lintas sektor terkait (Bea cukai, Kepolisian dan Kejaksaan)
- Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara.
- Hubungan kerjasama antara penyidik Balai Besar POM dengan jaksa penuntut umum sehingga perkara dapat diselesaikan sampai tahap 2.

- Kerjasama tim yang solid
- Informasi pengiriman Paket obat dari Direktorat Intelejen Badan POM
- yang segera ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Makassar, sehingga menjadi berkas perkara.
- Pihak Expedisi yang dipakai oleh pengirim paket sangat kooperatif dengan BBPOM di Makassar, sehingga sangat membantu tertangkapnya penerima paket obat.
- Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
- Sebagian besar Tersangka kooperatif sehingga tahap II dapat dilaksanakan dengan baik.

Alternatif Solusi :

- Koordinasi yang secara kontinu dan berkelanjutan dengan lintas sektor terkait, utamanaya dengan kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan kejaksaan
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Penindakan
- Pada UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, PPNS tidak mempunyai kewenangan penggeledahan, sehingga sehingga BBPOM Makassar harus bekerja sama dengan korwas PPNS Polda Sulawesi-Selatan untuk melakukan penggeledahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pengembangan perkara tidak maksimal.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Meningkatkan komunikasi dengan kelompok substansi Infokom dan kelompok substansi Pemeriksaan (pihak internal) BBPOM di Makassar terkait informasi awal adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan.
- Memperdalam investigasi sehingga mendapatkan data dan fakta lapangan yang memperkuat dan menunjang dalam proses penindakan, penyidikan dan pemberkasan.
- Melakukan pengawasan daring / patroli siber untuk mengawasi dan menindaklanjuti penjualan obat dan makanan secara online yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya.
- Meningkatkan kompetensi PPNS BBPOM di Makassar.

- Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Criminal Justice System sehingga upaya pemberantasan kejahatan obat dan makanan dapat tertangani dengan lebih baik.
- Menjalin hubungan yang kontinyu dan berkelanjutan dengan informan yang berperan dalam menginformasikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan proses pemberkasan perkara.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan semakin baik.
- Koordinasi dengan pihak kejaksaan yang semakin baik, sehingga banyak perkara yang menjadi P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) tanpa melalui P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) dan perkara yang carry over juga langsung P21 dan bisa dilanjutkan ke tahap II.
- Meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan, antara lain dengan pihak Asperindo (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), yaitu dengan perusahaan jasa ekspedisi.
- Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor pemerintah terkait dalam hal operasi bersama terkait penertiban Obat dan makanan ilegal yang selama ini sudah terjalin antara lain dengan adanya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, yang anggotanya dari berbagai lintas sektor antara lain Kejaksaan Tinggi Makassar, BNNP Makassar , Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas dan Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
   Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

Tabel 3.90
Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 3.91
Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.92
Target Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Makassar	85	50,45	59,35	Kurang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2020, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB BBPOM di Makassar .

Penilaian indeks RB yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebesar 50,45 belum mencapai target akhir tahun yaitu 85. Capaian akhir tahun adalah 59,35% dengan kategori "kurang"

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.93. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks RB UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	85	50,45	59,35	Kurang

Realisasi Indeks RB UPT tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.94. Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB UPT Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks RB UPT	85	95	50,45	53,10	Kurang

indikator Indeks RB UPT tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara sistematih dan berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks RB UPT **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Indeks RB UPT BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.95
Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja ***Indeks RB UPT***	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	85	50,45	59,35	Kurang
BBPOM di Semarang	91	84,76	93,14	Baik
BBPOM di Surabaya	91	81,06	89,08	Cukup
BBPOM di Bandung	91	80,15	88,08	Cukup
Nasional	81	-	-	-

Target kinerja Indeks RB UPT BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks RB UPT di BBPOM Makassar dengan nilai 59,35 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar tidak mencapai target Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Indeks RB UPT BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 3.96
Capaian Kinerja Indikator Indeks RB UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung kegagalan/penurunan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Nilai RB Kategori Kurang. Dengan diperolehnya nilai RB dari Inspektorat Utama pada bulan September 2020, dimana Nilai BBPOM di Makassar adalah nilai terendah untuk seluruh UPT, hal ini disebabkan antara lain :

- Belum menetapkan target prioritas Pembangunan ZI.
- Sosialisasi Pembangunan ZI kepada stakeholder belum dilakukan berkala
- Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan ZI tahun 2020, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan penempatan pegawai hasil rekruitmen.

- Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Pembangunan ZI tahun 2019 belum ditindaklanjuti.
- Belum terdapat upaya penerapan budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai.
- Seluruh SOP utama belum dievaluasi dan ditindaklanjuti
- Upaya pengembangan kompetensi belum kepada seluruh pegawai.
- Public campaign pengendalian gratifikasi belum dilakukan berkala.
- SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
- Belum seluruh area perubahan terdapat inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan stakeholder
- Kurangnya komitmen Tim Pembangunan ZI dalam pemenuhan data dukung.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil indicator indeks RB semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Dikarenakan adanya perubahan evaluasi penilaian berdasar Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM oleh KemenPANRB di bagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2019. Dari konversi tersebut (0,875) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar adalah 52,46 menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar sebesar **50,45** sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.
- BBPOM di Makassar akan melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan dan memutakhirkan data dukung sesuai kondisi terkini

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Pada tahun 2020 telah direncanakan untuk melaksanakan kegiatan pertemuan RB dengan seluruh pegawai, namun dikarenakan pandemi covid, maka pertemuan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian pertemuan RB tetap dilakukan.

- Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai Besar POM di Makassar sebesar 52,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.97. Capaian Rincian bobot komponen pengungkit penilaian BBPOM di Makassar

No	Komponen Pengungkit	Nilai Standar	Reviu TPI	Min 60 %	Ket
A	Proses (60)				
1	Manajemen Perubahan	8,0	2,82	35,22	TMS
2	Penataan Tatalaksana	7,0	1,14	16,24	TMS
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,0	1,10	10,96	TMS
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10,0	5,91	59,08	TMS
5	Penguatan Pengawasan	15,0	4,19	27,95	TMS
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10,0	0,94	9,36	TMS
	Total Pengungkit		**16,09**		**TMS**
B	Hasil (40)				
	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (20)		18,97	95	MS
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15	14,06	93,75	
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5	4,92	98,24	
	Kualitas Pelayanan (20)		17,40	87	
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20	17,40	87	MS
	Total Hasil		**36.37**	**90,94**	**MS**
	Nilai Evaluasi RB		52,46		

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Nilai indeks RB BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Menetapkan target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan ZI
- Melakukan sosialisasi Pembangunan ZI kepada stakeholder secara berkala.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pembangunan ZI tahun 2020, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penempatan pegawai hasil rekruitmen.
- Menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan evaluasi atas rencana kerja Pembangunan ZI Tahun 2019.
- Melaksanakan sosialisasi dalam upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai
- Melakukan evaluasi SOP utama secara keseluruhan dan menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut.
- Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
- Melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi secara berkala.
- Melaksanakan sosialisasi SPI kepada seluruh pihak terkait.
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
- Meningkatkan komitmen Tim Pembangunan ZI dalam pemenuhan data dukung.

2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

- **Perencanaan Kinerja**
- **Pengukuran Kinerja**
- **Pelaporan Kinerja**
- **Evaluasi Kinerja**
- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
    a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
    b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
    a. Pemenuhan pengukuran (5%)
    b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
    c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
    a. Pemenuhan pelaporan (3%)
    b. Kualitas pelaporan (7,5%)
    c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
    a. Pemenuhan evaluasi (2%);
    b. Kualitas evaluasi (5%);
    c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
    a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
    b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
    c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tahun 2020 jumlah realisasi Nilai AKIP adalah 77,27. Capaian Nilai AKIP telah mencapai target yaitu 95,40 dengan kriteria “Baik”.

Tabel 3.98
Target Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	77,27	95,40	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.99. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Nilai AKIP UPT	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	81	76,61	94,58	Baik
Tahun 2020	81	77,27	95,40	Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar tahun 2020 dibanding tahun 2019 dari nilai 76,61 menjadi 77,27, capaian mengalami peningkatan 0,82 point, berada pada kategori baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.100. Perbandingan realisasi Indikator Nilai AKIP UPT Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	92	81	77,27	83,98	Cukup

indikator Nilai AKIP UPT tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Nilai AKIP UPT **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Nilai AKIP UPT BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.101
Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Nilai AKIP UPT**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	81	77,27	95,40	Baik
BBPOM di Semarang	81	77,49	95,67	Baik
BBPOM di Surabaya	81	81,11	100,14	Baik
BBPOM di Bandung	81	80,54	99,43	Baik
Nasional	81	77,24	95,35	Baik

Target kinerja Nilai AKIP UPT BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang sama, adapun hasil capaian realisasi kinerja Nilai AKIP UPT di BBPOM Makassar dengan nilai 95,40 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Nilai AKIP UPT BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

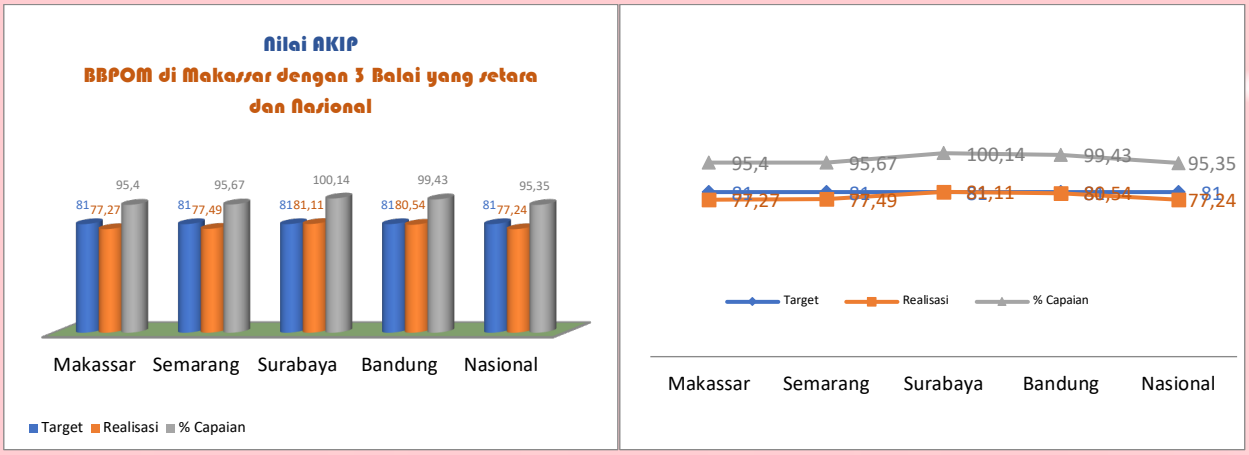

Gambar 3.33
Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

Pada tahun 2019, BBPOM di Makassar mendapatkan nilai AKIP BB, sehingga perlu beberapa upaya konkrit untuk mencapai target nilai A. Berdasarkan rekomendasi dari APIP terhadap implementasi SAKIP BBPOM di Makassar pada tahun 2019 maka tealah dilakukan perbaikan di tahun 2020 berupa: penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Renja, menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan draft Renstra 2020-2024, pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan yang berdasarkan Balance Scorecard dan pengukuran kinerja cascading dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Makassar hingga pejabat eselon 3 dan 4, mengintegrasikan e-performance dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu, revisi SOP mikro monitoring dan evaluasi, penyusunan Perjanjian Kinerja individu bagi seluruh pegawai berdasarkan cascading kinerja, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum

rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Makassar telah dilakukan pada bulan Juli 2020 pada aplikasi simolekdesi.
Renstra 2020-2024 telah selesai disusun pada triwulan II tahun 2020, didalamnya telah memuat beberapa perubahan kebijakan dan perubahan pengukuran indikator hasil evaluasi kinerja tahun 2019 yang diharapkan dapat mengukur kinerja secara lebih tepat. Penyesuaian dokumen PK, RAPK, RKT,dan IKU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 juga telah diselesaikan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar adalah:

Berdasarkan evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP atas implementasi SAKIP 2019. Sedangkan hasil rekomendasi APIP atas impelementasi SAKIP BBPOM di Makassar tahun 2020 akan diterapkan di tahun 2021 sebagai upaya perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai sesuai target Renstra.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

Berdasarkan rekomendasi Inspektorat , BBPOM di Makassar akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

- Perencanaan
  Mencantumkan sub kegiatan/ komponen secara rinci pada dokumen RENSTRA 2020-2024 yang akan di review dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/ kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
- Pengukuran
  - Menyelaraskan petapkan target kinerja atas perjanjian kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu, serta menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai;
  - Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit sebagai dasar pemberian reward and punishment;
  - Membuat SOP dan mekanisme pengumpulan data kinerja secara transparan dan akuntabel

- Pelaporan
  - Menyajikan pembandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dengan target IKU Badan POM, realisasi atau capaian tahun berjalan dengan capaian satker lain yang memiliki indikator sejenis;
  - Analisis efisiensi pengukuran kinerja kegiatan per sasaran;
  - Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- Evaluasi Internal
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
  - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
- Capaian Kinerja
  - Melakukan pengawalan terhadap pencapaian target indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan;
  - Membuat sistem informasi kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan yang valid dan didukung dengan sumber data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan untuk meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap triwulan/perbulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya pencapaian indikator Nilai AKIP di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat yaitu Melakukan perbaikan, menyampaikan dan mensosialisasikan kepada seluruh komponen penanggung jawab bidang masing-masing atas saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah di BBPOM Makassar sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
- Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat evaluasi nasional.

Sasaran 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatusr Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :
a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar tahun 2020 berdasarkan hasil penilaian pusat adalah 73,49. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN BBPOM di Makassar dan Loka POM di Palopo dibagi total jumlah pegawai di BBPOM di Makassar serta loka. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,99 % dan mendapat kriteria “baik”.

Tabel 3.102
Target Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.103. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks Profesionalitas ASN	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	75	73,49	97,99	Baik

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.104. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	85	75	73,49	86,45	Cukup

indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.105
Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Indeks Profesionalitas ASN**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99	Baik
BBPOM di Semarang	77	85,57	111,13	Sangat Baik
BBPOM di Surabaya	75	85,09	113,45	Sangat Baik
BBPOM di Bandung	75	78,58	104,77	Baik
Nasional	75	82,88	110,50	Sangat Baik

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang sama kecuali BBPOM di Semarang, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN di BBPOM Makassar dengan nilai 97,99 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih rendah dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 3.34
Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar disebabkan oleh :
Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan IV tahun 2020 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I dan II. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar adalah:
Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja di atas adalah:

Selama tahun 2020 telah direncanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun

beberapa kegiatan peningkatan kompetensi tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi covid. Namun demikian, kegiatan peningkatan kompetensi masih dapat dilaksanakan secara daring sehingga target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP perorang dapat tercapai.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :
Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

Sasaran 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

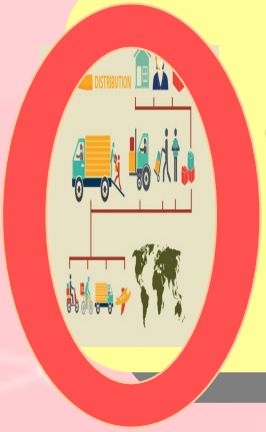

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembanagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tahun 2020 telah dilaksanakan audit GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dengan pemenuhan GLP sebesar 70,60 % dari target yang direncanakan sebesar 78,8 % Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah belum mencapai target sebesar 89,59 % dengan kriteria "Cukup".

Tabel 3.106
Target Kinerja Indikator Persentase Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	70,60	89,59	Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pada tahun 2020, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.107. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	78,50	-	-
Tahun 2020	78,8	70,60	89,59	Cukup

Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020 serta adanya pebedaan penilaian dari P3OMN.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.108. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	90	70,60	78,44	Cukup

indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.109
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	78,8	70,60	89,59	Cukup
BBPOM di Semarang	82,00	75,20	91,71	Baik
BBPOM di Surabaya	80,00	76,10	95,13	Baik
BBPOM di Bandung	76,00	71,50	94,08	Baik
Nasional	71	72,6	102,25	Baik

Target kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di BBPOM Makassar dengan nilai 108,51 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

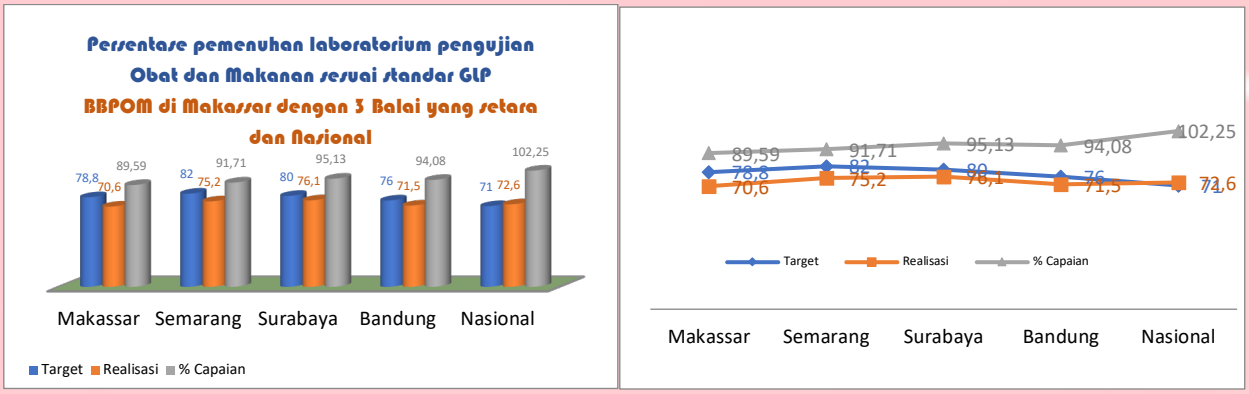

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung/kendala ketercapaian kinerja

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP disebabkan oleh :

- Personal Lab yang tetap di lab selama lebih dari 5 - 10 tahun tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengujian parameter selain di lab nya. Dan mengutamakan pengujian dengan metode lama.
- Baseline SRL tidak sesuai dengan Pedoman Sampling
- Pemeliharaan/perbaikan alat memerlukan waktu yang lama atau spare part yang dibutuhkan tidak tersedia di Indonesia.
- Pedoman sampling terbit pada bulan Februari-April tahun berjalan sehingga perencanaan reagen dan media, suku cadang tertunda hingga ketersediaannya ada di akhir tahun (proses lelang)
- Berdasarkan hasil penilaian pencapaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP barada dibawah target karena nilai persentase pemenuhan standar peralatan capaiannya adalah 66, 2 serta Persentase pemenuhan standar Ruang Lingkup capaiannaya 67,2 sehingga nilai rata-rata pemuhan menjadi rendah atau dibawah target.

Tabel 3.110. Capaian penilaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

No	Bidang/Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1.	Kimia Obat danNappza	50,4	78,2	60,3
2.	Kimia OTSK	74,6		
3.	Kimia Kosmetik	67,6		
4.	Kimia Pangan dan Air	71,0		
5.	Mikrobiologi	72,6	78,3	72,0
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		67.2	78.3	66.2
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium		70.6		

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembuatan rencana atau road map pengembangan kompetensi personal
2. Pembuatan Road Map 5 tahun mengacu baseline standar ruang lingkup
3. Penyediaan sparepart consumable yang lebih optimal
4. Pengusulan kepada P3OMN untuk menyediakan baku pembanding terutama untuk parameter ruang lingkup dan pedoman sampling
5. Disarankan agar pedoman sampling terbit dan disahkan paling lambat bulan januari tahun berjalan.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah:

- Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap metode analisis pada tahun 2020, namun karena standar penilaian audit GLP mengalami pembaruan sehingga banyak SRL baru yang belum diverifikasi atau dilakukan uji
- Sebagian staf pengujian telah memiliki kompetensi terhadap instrumen yang berteknologi tinggi seperti HPLC, GC, AAS, bahkan LC-MSMS, GC-MS maupun ICP-MS, namun belum pernah mendapatkan sertifikat resmi tentang kompetensi laboratorium dasar. Pemenuhan pengembangan kompetensi telah direncanakan di tahun 2020 dengan menyisipkan pengetahuan mengenai materi laboratorium dasar

pada BImtek Internal, namun dengan adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19, bimtek internal ditiadakan.

- Pemenuhan alat labiratorium pada tahun 2020 juga mengalami hambatan, adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19 pengadaan alat laboratorium ditiadakan. Namun telah dilakukan beberapa pemenuhan alat penambah nilai berupa pembelian assesoris alat laboratorium.
- Pengadaan suku cadang pada output Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice dengan dengan nilai kontrak sebesar Rp.584.599.972, dengan masa kontrak dari tanggal 16 Juli 2020 sampai tanggal 12 Desember 2020 ,tidak terlaksana karena penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan dan dikenakan wanprestasi. Telah dilakukan pengendalian kontrak dan penyedia menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan PPK melakukan pengontrolan ke distributor.Tetapi sampai batas akhir pekerjaan penyedia tidak mampu menyelesaikan.
- Operasional pengelolaan pengujian dan beberapa reagen yang sudah dibuatkan surat pesanan tetapi indent sampai batas akhir tahun 2020

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Agar pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian yang sesuai standar GLP dapat meningkat perlu dialokasikan anggaran untuk pemenuhan baku pembanding, perencanaan. Pemenuhan SRL untuk GLP dan ruang lingkup untuk ISO 17025 perlu dialokasikan dalam perencanaan sampling, dan perencanaan pelatihan internal disesuaikan dengan materi pengujian SRL yang belum terpenuhi.
- Pemenuhan standar peralatan sesuai GLP diupayakan dengan memprioritaskan pengadaan alat tahun 2021 untuk pemenuhan standar peralatan sesuai GLP dan kebutuhan uji laboratorium. Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.
- Saran dan tindak lanjut dari P3OMN

Strategi pemenuhan Ruang Lingkup di Balai POM

- Menyusun *Road map* pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian sebagai upaya monitoring pemenuhan target
- PPPOMN memberikan masukan kepada Kedeputian untuk mencantumkan parameter uji yang belum terdapat pada Pedoman Sampling

Strategi Pemenuhan Peralatan

- Perencanaan pengadaan peralatan menunggu penetapan regionalisasi laboratorium dengan spesifik peralatan yang dibutuhkan sesuai penunjukan tugas balai.
- Memenuhi kebutuhan peralatan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan

Startegi Pemenuhan Kompetensi

- Bersinergi dengan PPSDM untuk pemenuhan kompetensi personel laboratorium di Balai POM
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik untuk dilakukan di internal Balai POM.
- Menyusun program pelatihan terstruktur

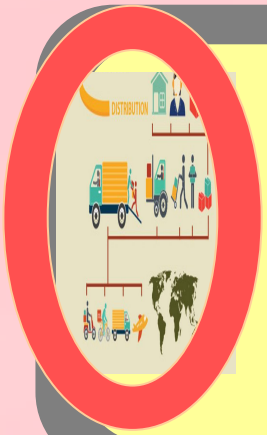

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
   - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan makanan oleh pimpinan
   - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
     1) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
     2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   - Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pada Tahun 2020 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 1,32. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar belum mencapai target dengan capaian 87,42 dengan kriteria Cukup.

Tabel 3.111
Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,32	87,42	Cukup

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.112. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	1,51	1,32	87,42	Cukup

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.113. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	3	1,32	44	Kurang

indikator Indeks Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Kurang. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.114
Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	1,51	1,32	87,42	Cukup
BBPOM di Semarang	1,51	1,82	120,53	Tidak dapat disimpulkan
BBPOM di Surabaya	1,51	2,52	167,22	Tidak dapat disimpulkan
BBPOM di Bandung	1,51	2	132,45	Tidak dapat disimpulkan
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang sama, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di BBPOM Makassar dengan nilai 87,42 terendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM

Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

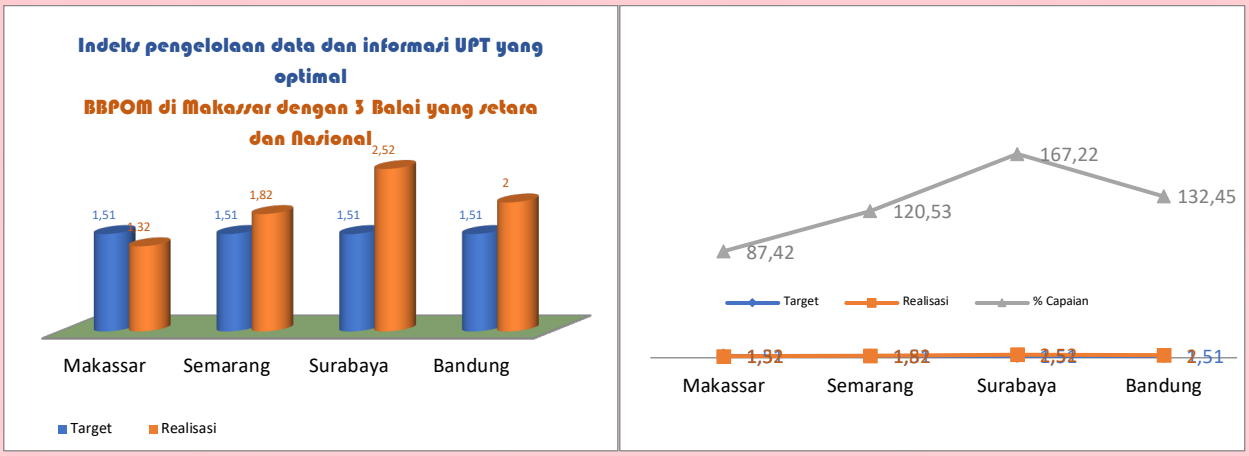

Gambar 3.35
Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar kategori cukup antara lain :

- email personal belum dimanfaatkan

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ❖ Akan dilakukan update email personal, dan akan dibantu oleh tim IT, uuntuk instal di mobile masing-masing personal untuk pemanfaatan email
- ❖ Koordinasi antara tim IT dan bidang-bidang, agar email BBPOM di Makassar yang digunakan sebagai informasi ke bagian-bagian terkait, kemudian akan di cc ke email bidang sehingga akan nampak pemanfaatan email balai.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan untuk pencapaian indeks pengeloaan data dan informasi capaian kinerja di atas adalah :

- Hasil penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar tahun 2020 mencapai 1,32 dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemutakhiran data : = 2,4
    - data SIPT (80 %) = 2,4
      adalah Persentase terhadap Jumlah data yang terkirim ke pusat tepat waktu di bandingkan dengan jumlah total target sampling dan sarana dengan kriteria :
      - Tidak dimanfaatkan (< 55 %) indeks 0
      - Kurang dimanfaatkan (55 % - 69 %) indeks 1
      - Dimanfaatkan (70 % - 85 %) indeks 2
      - Sangat dimanfaatkan (86 % - 100 %) indeks 3

    - SPIMKer (20 %) = 0
      - *Data kasus keracunan yang diverifikasi adalah data kasus keracunan yang diverifikasi oleh Balai Besar/Balai maksimal 30 Hari Kerja (1 Bulan) dari tanggal input di aplikasi SPIMKer KLB-KP*
      - *Data kasus keracunan yang diinput adalah data kasus keracunan dari rumah sakit yang diinput ke aplikasi SPIMKer KLB-KP baik oleh rumah sakit maupun oleh Balai Besar/Balai*

  - Pemanfaatan Sistem = 0,25
    - memanfaatkan sharing folder = 0
      - *Jumlah Balai Besar/Balai yang memanfaatkan sharing folder dalam waktu 1 (satu) Bulan*

      dengan kriteria : Jumlah akses dalam sebulan
      - Kurang dimanfaatkan (< = 63 sebulan) indeks 1
      - Dimanfaatkan (64 – 100 sebulan) indeks 2
      - Sangat dimanfaatkan (> = 100 sebulan) indeks 3

- Upload berita aktual = 1
  - *Jumlah Upload berita actual terkait kegiatan Balai Besar/Balai POM dalam waktu 1 (satu) Bulan*
  - Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal seperti KIE, Talkshow, BimTek, Workshop, dsb

  dengan kriteria :
  - Kurang dimanfaatkan (0-4 sebulan) indeks 1
  - Dimanfaatkan (5-9 sebulan) indeks 2
  - Sangat dimanfaatkan (> = 10 sebulan) indeks 3

- Pemutakhiran data dashboard BOC = 0

  Cara perhitungan :

  (*Jumlah akun login Unit/Balai ke dashboard BOC + Jumlah akun login dan mengakses dashboard BOC*) x 100%

  Dengan ketentuan
  - *Jumlah akun login dihitung dalam 1 (satu) bulan (20 hari kerja, minimal 1 kali dalam 1 hari)*
  - *Jumlah akun login dan mengakses dashboard dilihat dari aktivitas akses dashboard*

  Pembobotan :

  Aspek login = 40 %

  Aspek pemanfaatan unit/Balai = 60 %

- Pemanfaatan E-Mail = 0

  Cara perhitungan :

  (*Jumlah akun email Unit dan individu yang aktif /*
  Jumlah total akun email unit/Balai dan individu) x 100%

  Dengan ketentuan
  - *Akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email*

  Pembobotan :
  - Aspek login = 30 %
  - Aspek pemanfaatan unit/Balai = 40 %
  - Aspek pemanfaatan individu = 30 %

  dengan kriteria :

- Tidak dimanfaatkan (< 55 %) indeks 0
- Kurang dimanfaatkan (55 % - 69 %) indeks 1
- Dimanfaatkan (70 % - 85 %) indeks 2
- Sangat dimanfaatkan (86 % - 100 %) indeks 3

dengan rincian sebagai berikut :

- Belum adanya data dan informasi yang dimutakhirkan pada *data kasus keracunan dari rumah sakit yang diinput ke aplikasi SPIMKer KLB-KP baik oleh rumah sakit maupun oleh Balai Besar/Balai*
- Belum adanya Pemanfaatan system informasi email berupa *Jumlah akun email Unit dan individu yang aktif (tidak diperoleh Akun email yang aktif dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email)*
- Belum adanya Pemanfaatan system informasi sharing folder *(belum ada yang memanfaatkan sharing folder dalam waktu 1 (satu) Bulan)*
- Belum adanya Pemanfaatan system informasi pada Dashboard BCC berupa *(Jumlah akun login dihitung dalam 1 (satu) bulan (20 hari kerja, minimal 1 kali dalam 1 hari) dan Jumlah akun login dan mengakses dashboard dilihat dari aktivitas akses dashboard)*

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Hasil penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi Tahun 2020 hanya berada pada nilai 1,32 atau 87,42 % capaian ini merupakan capaian terendah kedua untuk kategori UPT, maka BBPOM di Makassar harus terus berupaya untuk menigkatkan capaian indeks tersebut dengan melakukan antara lain memutahirkan data SIPT dan SPIMKer, memanfaatkan sharing folder, pemanfaatan subsite dengan upload berita aktual, memanfaatkan E-mail corporate dan memanfaatkan dashboard BOC.

Sasaran 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

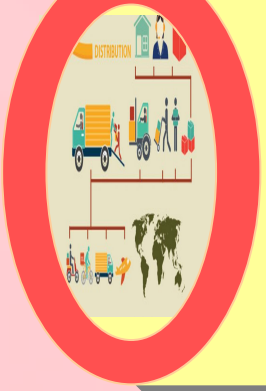

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Acuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluas iKinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan

aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1) Revisi DIPA
    2) DeviasiHalaman III DIPA
    3) Pengelolaan UP
    4) Rekon LPJ Bendahara
    5) Data Kontrak
    6) PenyelesaianTagihan
    7) PenyerapanAnggaran
    8) Retur SP2D
    9) Perencanaan Kas (Renkas)
    10) Pengembalian/Kesalahan SPM
    11) DispensasiPenyampaian SPM
    12) Pagu Minus
    13) Konfirmasi Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020 adalah 100,08 % dengan realisasi sebesar 93,07 %, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 93 dengan kriteria Baik.

Tabel 3.115
Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	93,07	100.08	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 %

Tabel 3.116
Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020

Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Bobot	Hasil
EKA	92,24	60%	55,34
IKPA	94,33	40%	37,73
Total		100%	**93,07**

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2020 sebesar 93,07 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % = 55,34
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 % = 37,73

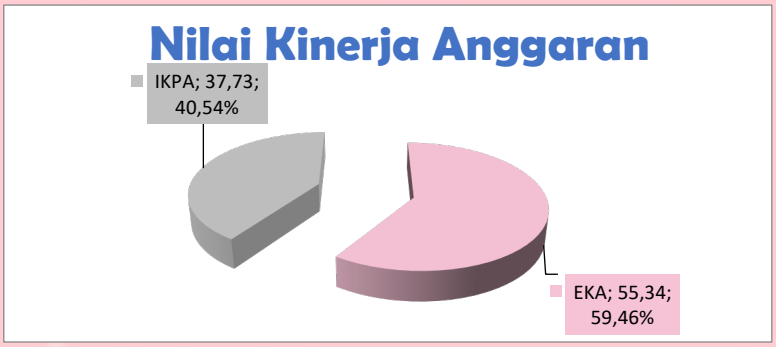

Gambar 3.36
Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun 2020

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian *output*.

Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L saat ini serta sebagai bentuk relaksasi kebijakan penilaian IKPA belanja K/L tahun 2020 dalam rangka mendukung kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk percepatan

penanganan Covid-19, maka Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan Triwulan kedua, selanjutnya pada Triwulan ketiga dan keempat dilakukan penilaian.
Sehingga perhitungan nilai kinerja anggaran pada triwulan IV tahun 2020 digunakan nilai IKPA sesuai dengan data capaian dengan menggunakan 13 indikator penilaian.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada aplikasi OM-SPAN, disampaikan bahwa : Dalam rangka memasuki tatanan normal baru (new normal), menjaga tata kelola (governance) pelaksanaan anggaran, serta mendorong akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka kebijakan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) K/L Tahun 2020 yang sebelumnya 'tidak dilakukan penilaian' sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dinyatakan akan 'dilakukan penilaian kembali' mulai triwulan III tahun 2020.
Kebijakan ini diberlakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggai 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni. Untuk mendukung akselerasi belanja tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

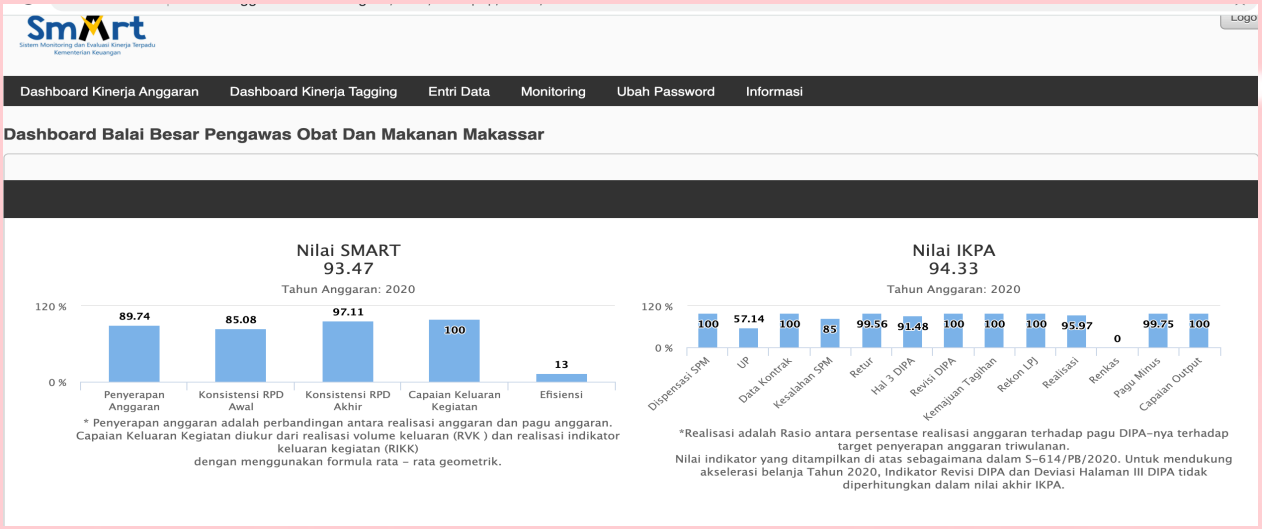

Gambar 3.37
Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA Tahun 2020

Dari gambar di atas, dapat dilihat Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar tahun 2020 sebesar 92,24 Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian *output* kegiatan BBPOM di Makassar.
- Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Selain itu akan dilakukan revisi penghematan anggaran terkait pandemi Covid-19; dan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19, yaitu Output :
    - Sampel makanan yang diperiksa;
    - Sarana distribusi makanan, makanan tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa;
    - Sarana produksi makanan, makanan tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa;
    - Sampel makanan, makanan tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa;
    - Sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS);
    - Desa pangan aman

- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) terhadap belanja penanganan pandemi Covid-19 yang tidak menggunakan akun-akun khusus Covid-19;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.117. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	93	93,07	100.08	Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.118. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	93	97	93,07	95,94	Baik

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.119
Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Nilai Kinerja Anggaran**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	93	93,07	100.08	Baik
BBPOM di Semarang	94	91,24	97,07	Baik
BBPOM di Surabaya	93	99,18	106,65	Baik
BBPOM di Bandung	93	95,13	102,30	Baik
Nasional	93	-	-	Baik

Target kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Makassar, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang sama kecuali BBPOM Semarang, adapun hasil capaian realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran di BBPOM Makassar dengan nilai 100,08 terendah kedua apabila dibandingkan dengan BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung, Target BBPOM di Makassar sama dibandingkan dengan Target Nasional. Berikut ini perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

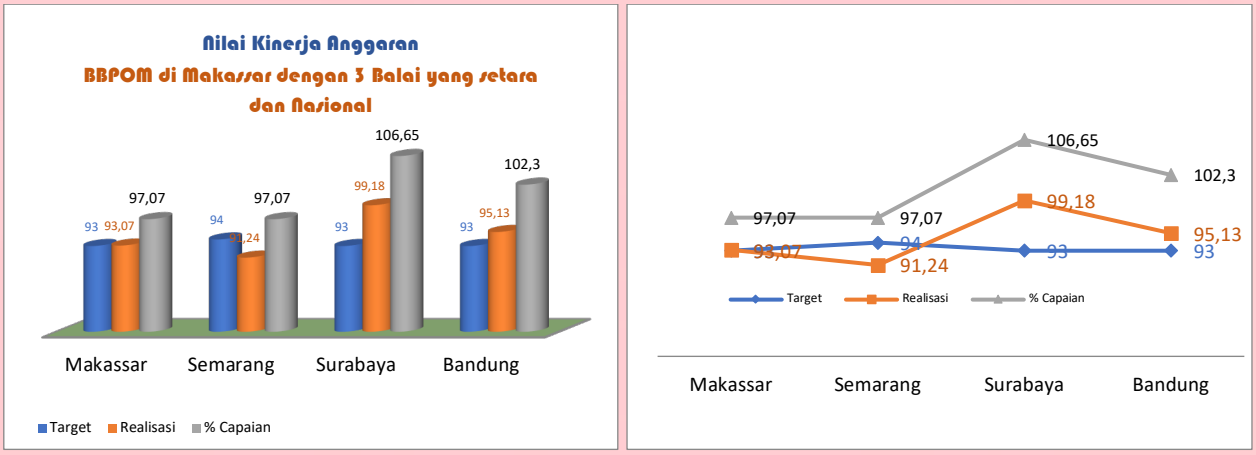

Gambar 3.38
Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Tahun 2020 sebesar 92,24
   ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu
   Realisasi anggaran = 89,74
   Konsistensi RPD awal = 85,08
   Konsistensi RPD akhir = 87,11
   Capaian keluaran kegiatan = 100
   Efisiensi = 11,28
   dari kelima indikator tersebut yang paling berkontribusi adalah nilai capaian keluaran kegiatan dengan bobot 43,5% dan Efisiensi dengan bobot 28,6 % sedangkan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2 % serta Penyerapan anggaran 9,7 %
2. Pencapaian Nilai EKA pada indikator nilai capaian keluaran dimana capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran dan realisasi indikator keluaran terdapat beberapa output dimana rata-rata realisasi indikator keluaran pada tahun 2020 sudah mencapai target.
3. Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada tahun 2020 sebesar Rp 41,272,184,951,- (89,74%) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 44.216.042.000,- dan masih dibawah dari target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL pada Tahun 2020 sebesar 96 %.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

1. Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
2. Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan-Prioritas Nasinal serta Penanganan pandemi akibat Covid-19

3. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
4. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
5. Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) terhadap belanja penanganan pandemi Covid-19 yang tidak menggunakan akun-akun khusus Covid-19;
6. Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;.
7. Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode tahun kedua Renstra 2020-2024
8. Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
9. Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2020 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar II dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2020 oleh DJPB

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya nilai kinerja anggaran pada triwulan 1 dan 2 disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, maka telah dilakukan percepatan penyerapan anggaran

pada triwulan 3 dan 4, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan oleh Kepala BBPOM di Makassar dan di masing-masing bidang untuk memastikan semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai, selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, diantaranya revisi untuk penambahan pelaksanaan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat.

- Telah dilakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.
- Realiasasi capaian per output kegiatan BBPOM di Makassar bisa tercapai sesuai dengan target yang direncanakan .

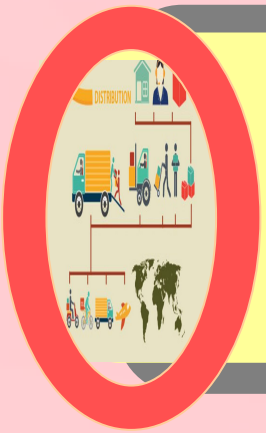

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.

a. Kriteria:
   1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1

Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar Tahun 2020 adalah 113,64 % dengan realisasi sebesar 100, diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 88 dengan kriteria sangat baik.

Tabel 3.120
Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	100	113,64	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari range nilai dari perbandingan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi

Tabel 3.121.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

Indikator Kinerja **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**	% Capaian	IE	SE	TE	Range
Input	89,74	1,16	1	0,16	**0 - 0,2: 100% → Efisien**
Output	103,99				

Nilai tingkat efisiensi kegiatan BBPOM di Makassar pada Tahun 2020 sebesar 100% (Efisien).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.122. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2019	-	-	-	-
Tahun 2020	88	100	113,64	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini baru diukur pada tahun 2020.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.123. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator	Target 2020	Target 2024	Realisasi 2020	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	90	88	100	111,11	Sangat Baik

indikator Indeks Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 **mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Sangat Baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tetap dipertahankan sebagai kategori Sangat Baik.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran **BBPOM di Makassar** dan dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung serta target dan realisasi Tahun 2020 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini **:**

Tabel 3.124.
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020 serta seacara Nasional

Indikator Kinerja **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran**	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	88	100	113,64	Sangat Baik
BBPOM di Semarang	90	100	111,11	Sangat Baik
BBPOM di Surabaya	92	100	108,70	Sangat Baik
BBPOM di Bandung	92	100	108,70	Sangat Baik
Nasional	-	-	-	-

Target kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM Makassar, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM di Bandung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di BBPOM Makassar dengan nilai 113,31 tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung. Berikut ini perbandingan capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 3.39
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung tahun 2020.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja realisasi anggaran disebabkan oleh :
Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Makassar sudah tercapai dan melebihi target. Hal ini disebabkan karena dari 28 indikator 10 indikator yang memiliki realisasi dibawah 100%, sisanya 18 indikator memiliki realisasi diatas 100%. Sedangkan realisasi anggaran dari 28 indikator 15 diantaranya diatas 90% dan dibawah 100% sedangkan 13 indikator sisanya berada dibawag 90 %, sehingga menghasilkan efisiensi karena dengan anggaran yang terbatas bisa menghasilkan output/outcome yang melebihi target. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 28 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran. Beberapa indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target dipantau secara intensif sejak triwulan 1 namun perlu pengawalan terhadap. Indicator yang capaianya cukup yaitu indicator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; Indeks RB UPT; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan

informasi UPT yang optimal agar ke empat indicator ini kedepan capaiannya termasuk dalam kategori Baik .

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
4. Melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19;
5. Melakukan revisi penghematan anggaran terkait pandemi Covid-19;
6. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;
7. Mengoptimalkan hasil pelaporan kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi untuk periode selanjutnya;
8. Memperkuat monitoring periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja;

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;

- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
- Pelaksanaan kegiatan/output dilaksanakan sesuai dengan target dan segera melakukan proses keuangan sehingga deviasi antara capaian output dan capaian anggaran tidak terlalu jauh;
- Melakukan revisi target output untuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan efisiensi penggunaan anggaran BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka rencana aksi yang telah dilakukan hingga tahun 2020 adalah melakukan pemantauan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target agar efisiensi penggunaan anggaran dapat efisien.
- Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2020 oleh DJPB
- Melakukan Monitoring Evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
- Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan subkegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja pada rencana aksi, yang diwujudkan dalam dokumen Plan of Action;

3.3 Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2020, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 50.047.323.000,-. Namun terdapat revisi DIPA pertama tanggal 02 Maret 2020 dalam rangka penambahan anggaran untuk kegiatan KIE sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 50.544.323.000 kemudian Pada Tanggal 30 April terbit Revisi DIPA kedua Rp. 44.216.042.000 dalam rangka refocussing penanggulangan covid 19, selanjutnya revisi anggaran revisi DIPA keempat tanggal 13 Oktober 2020 dalam rangka penambahan anggaran pada output 3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman menggunakan Pola baru sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 45.992.042.000.

Realisasi anggaran Tahun 2020 adalah Rp. 41.272.184.951,- atau 89,74 %,. Jumlah Pagu Anggaan per jenis belanja beserta realisasinya hingga akhir Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.50 di bawah ini

Tabel 3.125
Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

No	Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	BALAI BESAR PENGAWAS MAKANAN DAN MAKANAN MAKASSAR	PAGU	21.776.025.000	21,939.321.000	2.276.696.000	**45.992.042.000**
		REALISASI	19.979.634.659	19.058.431.257	2.234.119.035	**41.272.184.951**
		PERSENTASE	(91,75 %)	(86,87 %)	(98,13 %)	**(89,74 %)**
		SISA	1.796.390.341	2.880.889.743	42.576.965	**4.719.857.049**

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

Tabel 3.126
Data Sasaran Strategis dan Realisasi Penyerapan Anggaran TW I,TW II , TW III dan TW IV tahun 2020 Balai Besar POM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator	Target Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	% Capaian Anggaran TW I	Realisasi Anggaran TW II	% Capaian Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	% Capaian Anggaran TW III	Realisasi Anggaran TW IV	% Capaian Anggaran TW IV
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	470.071.306	107.415.905	22,85	167.080.999	35,54	325.904.606	69,33	452.069.243	96,17
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	137.275.677	20.623.167	15,02	33.449.331	24,37	94.001.392	68,48	124.686.401	90,83
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	112.276.694	25.656.326	22,85	39.907.354	35,54	77.842.428	69,33	107.976.895	96,17
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	46.789.323	7.029.243	15,02	11.400.939	24,37	32.039.627	68,48	42.498.368	90,83
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	346.890.000	114.161.960	32,91	114.161.960	32,91	172.056.710	49,60	308.712.210	88,99

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	71.312.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65.616.470	92,01
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	98.825.000	22.999.400	23,27	28.384.100	28,72	33.931.500	34,33	84.252.894	85,25
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	59.746.000	22.200.600	37,16	22.200.600	37,16	29.298.600	49,04	33.589.600	56,22
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80.759.000	12.523.350	15,51	12.523.350	15,51	31.685.850	39,24	74.979.128	92,84
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	34.611.000	5.367.150	15,51	5.367.150	15,51	13.579.650	39,24	32.133.912	92,84
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	231.191.000	67.152.000	29,05	67.752.000	29,31	115.792.000	50,08	227.139.478	98,25
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	347.825.000	35.775.000	10,29	45.093.000	12,96	144.737.000	41,61	312.818.208	89,94

		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1.310.394.000	248.065.700	18,93	441.583.246	33,70	674.815.289	51,50	1.246.041.605	95,09
		14	Indeks Pelayanan Publik	6.911.000	0	0,00	5.741.500	83,08	5.741.500	83,08	5.741.500	83,08
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	5.209.999.000	511.508.517	9,82	956.226.517	18,35	1.486.997.513	28,54	4.484.421.570	86,07
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	345.832.000	2.440.800	0,71	34.239.800	9,90	168.258.650	48,65	302.050.650	87,34
		17	Jumlah desa pangan aman	587.620.000	0	0,00	32.010.000	5,45	347.882.400	59,20	548.225.370	93,30
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	214.600.000	7.390.000	3,44	28.730.000	13,39	73.868.000	34,42	141.921.500	66,13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.433.882.093	20.496.481	1,43	171.521.225	11,96	354.372.679	24,71	972.324.169	67,81
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	969.747.907	10.691.104	1,10	89.466.640	9,23	413.382.696	42,63	733.383.341	75,63
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	796.433.000	169.451.000	21,28	234.567.550	29,45	460.288.550	57,79	742.870.710	93,27

8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	24.674.274.000	4.837.425.629	19,61	10.807.504.922	43,80	16.553.982.546	67,09	22.640.597.856	91,76
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	169.935.000	150.923.100	88,81	166.871.300	98,20	166.871.300	98,20	166.871.300	98,20
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	611.234.000	267.716.761	43,80	324.020.011	53,01	351.437.011	57,50	548.118.123	89,67
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1.452.295.000	135.479.959	9,33	603.188.290	41,53	1.118.497.559	77,02	1.357.096.829	93,44
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	596.359.000	25.118.000	4,21	50.231.699	8,42	130.963.394	21,96	502.129.154	84,20
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5.466.378.000	679.771.678	12,44	1.831.337.683	33,50	2.793.042.575	51,09	4.907.797.868	89,78
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	108.576.000	34.860.499	32,11	84.400.599	77,73	103.270.599	95,11	106.120.599	97,74
Total				**45.992.042.000**	**7.542.243.329**	**16,40**	**16.408.961.765**	**35,68**	**26.274.541.624**	**57,13**	**41.272.184.951**	**89,74**

Berdasarkan table 3.51, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran yang paling besar adalah Sasaran Strategis kedelapan yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal (94,98 %) yaitu pada Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar dan indikator Indeks RB BBPOM di Makassar dengan persentase capaian 98,20 dan 91,76. Sedangkan persentase penyerapan anggaran terendah adalah untuk sasaran kegiatan keenam, yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 71,72 %

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat Efisiensi Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 127. Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar Tahun 2020

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Sampel Makanan yang Diperiksa	0,04	EFISIEN
2.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0.26	EFISIEN
3.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	0.09	EFISIEN
4.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	0.24	EFISIEN
5.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.36	EFISIEN
6.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan	0.07	EFISIEN
7.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	0.04	EFISIEN
8.	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	0.21	EFISIEN
9.	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	0,20	EFISIEN
10.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	0.04	EFISIEN
11.	KIE Obat dan Makanan Aman	0.23	EFISIEN
12.	Desa Pangan Aman	0.15	EFISIEN
13.	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0.51	EFISIEN
14.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0.03	EFISIEN
15.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	0.13	EFISIEN
16.	Layanan Perkantoran	0.09	EFISIEN

Pada tahun 2020 BBPOM di Makassar melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 16 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,03 sampai 0,51. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahayamempunyai TE tertinggi karena output tercapai sesuai target dengan penyerapan anggaran rendah.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Makassar mampu menghasilkan kinerja yang optimal

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Pada tahun 2020, dari Dari 28 indikator yang mendukung pencapaian 11 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar, berdasarkan Tabel 5.13 terdapat empat indikator kinerja Tahun 2020 yang Tidak Efisien serta ada 24 indikator yang Efisien dengan Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,02 sampai 0,86. Nilai TE tertinggi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Makassar (TE = 0,86) dan Nilai TE terendah adalah Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (TE = 0,02). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Makassar TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

Tabel 3.128
Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,17	109,02	1,13	1	EFISIEN	0,13
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,83	110,08	1,21	1	EFISIEN	0,21
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,17	103,50	1,08	1	EFISIEN	0,08
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,83	99,26	1,09	1	EFISIEN	0,09
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	88,99	103,19	1,16	1	EFISIEN	0,16
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,01	99,40	1,08	1	EFISIEN	0,08
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,25	107,16	1,26	1	EFISIEN	0,26
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	56,22	104,84	1,86	1	EFISIEN	0,86
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,84	78,38	0,84	1	TIDAK EFISIEN	-0,16
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,84	94,38	1,02	1	EFISIEN	0,02
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,25	113,45	1,15	1	EFISIEN	0,15
	12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89,94	103,93	1,16	1	EFISIEN	0,16

	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	95,09	132,64	1,39	1	EFISIEN	0,39
	14	Indeks Pelayanan Publik	83,08	99,15	1,19	1	EFISIEN	0,19
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,07	108,51	1,26	1	EFISIEN	0,26
	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	87,34	100,00	1,14	1	EFISIEN	0,14
	17	Jumlah desa pangan aman	93,30	100,00	1,07	1	EFISIEN	0,07
	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	66,13	100,00	1,51	1	EFISIEN	0,51
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67,81	112,01	1,65	1	EFISIEN	0,65
	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,63	123,43	1,63	1	EFISIEN	0,63
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93,27	146,33	1,57	1	EFISIEN	0,57
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	91,76	59,35	0,65	1	TIDAK EFISIEN	-0,35
	23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	98,20	95,40	0,97	1	TIDAK EFISIEN	-0,03
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	89,67	97,99	1,09	1	EFISIEN	0,09
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93,44	89,59	0,96	1	TIDAK EFISIEN	-0,04
	26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	84,20	87,42	1,04	1	EFISIEN	0,04
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	89,78	100,08	1,11	1	EFISIEN	0,11
	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	97,74	113,64	1,16	1	EFISIEN	0,16
Total			**89,74**	**103,29**	**1,15**	**1**	**EFISIEN**	**0,15**

Tabel 129. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	TE	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,14	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,16	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,40	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,13	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,25	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,76	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	0,57	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-0,19	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	0,09	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	0,00	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	0,14	Efisien

Gambar 3.40. Pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020

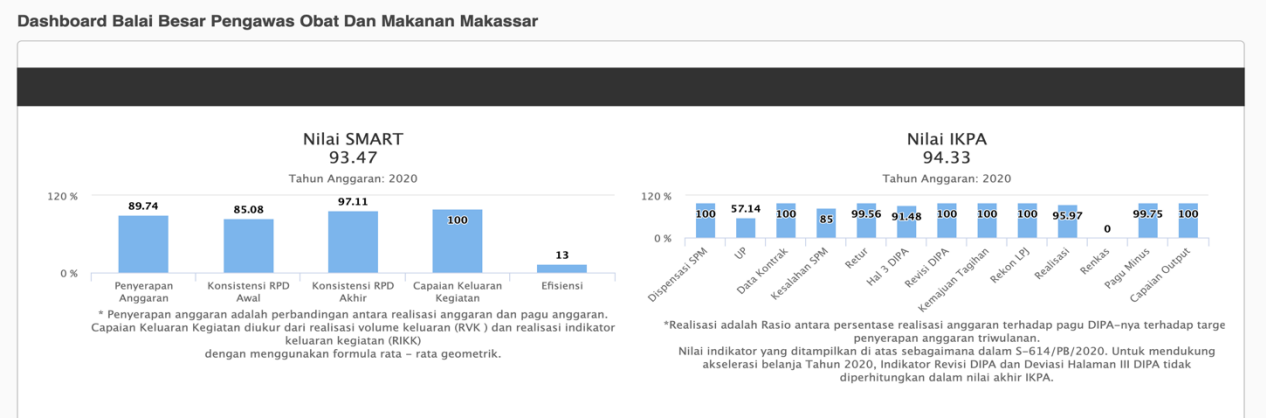

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja BBPOM di Makassar triwulan keempat tahun 2020 sebesar 93,47 dari perhitungan secara otomastis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Agenda Prioritas
Realisasi Anggaran
Kinerja Lain
Evaluasi Internal

Bab 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. SARAN

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 belum sepenuhnya dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Tahun 2020 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2020 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. tahun 2020 ini evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2020 yang

mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2020. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 28 indikator tersebut, telah dilakukan 16 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh 1 sasaran strategis memperoleh capaian "Sangat Baik", 7 sasaran strategis memperoleh capaian "Baik", 1 sasaran strategis memperoleh capaian "Tidak Dapat Disimpulkan" dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian "Cukup".
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 105,46 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
    - Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 103,19 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
    - Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 103,80 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
    - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 103,65 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
    - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 102,13 % dengan kriteria "Baik", hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada tahun 2020;

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 117,72 % dengan kriteria "Sangat Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 146,33% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan", menunjukkan penetapan target triwulan IV tahun 2020 yang tidak tepat pada sasaran keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar pada tahun 2020;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 77,37 % dengan kriteria "Cukup" , menunjukkan belum berhasilnya BBPOM di Makassar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal pada tahun 2020;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan sebesar 97,99 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal pada tahun 2020;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 88,51 % dengan kriteria "Cukup", hal ini menunjukkan belum berhasilnya BBPOM Makassar dalam mewujudkan sasaran menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020;
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,86 % dengan kriteria "Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mengelola keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel pada tahun 2020.

3. Dari 16 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan efisien.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga dapat memberikan alternative perbaikan.
- Dilakukan reviu untuk menaikkan target 3 indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan, yaitu indikator ke-13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (132,64 %), indikator ke-20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (123,43 %), dan indikator-21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (146,33 %).
- Perlu direncanakan upaya dan langkah-langkah nyata di tahun 2021 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2020 untuk mencapai target 10 indikator yang belum tercapai di tahun 2020 yaitu pada indikator ke-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,26 %), indikator ke-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (99,40 %), indikator ke-9 keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (78,38 %), indikator ke-10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (94,38 %), indikator ke-14 Indeks Pelayanan Publik (99,15 %), indikator ke-22 Indeks RB BBPOM di Makassar (59,35 %), indikator ke-23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar (95,40 %), indikator ke-24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar (97,99 %), indikator ke-25 persentase pemenuhan laboratorium pengujian

Obat dan Makanan sesuai standar GLP (89,59 %), dan indikator ke-26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal (87,42 %).

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar/BPOM yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
9	Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK UPT yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Makassar yang baik
12	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase obat yang memenuhi syarat	89,10
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55,00
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	70,00
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	84,00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	70,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00
		Jumlah desa pangan aman	6,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar/BPOM yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00
9	Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,00
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81,00
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77,00
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK UPT yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Makassar yang baik	70,00
12	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93,40
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88 %)

Lampiran 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase obat yang memenuhi syarat	89,10
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70,70
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88,80
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73,00
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi	55,00
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	70,00
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74,00
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	84,00
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	70,00
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00
		Jumlah desa pangan aman	6,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar/BPOM yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50,00
9	Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,00
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81,00
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77,00
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK UPT yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Makassar yang baik	70,00
12	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93,40
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88 %)

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp. 45.992.042.000,-

Lampiran 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 TRIWULAN IV
BBPOM DI MAKASSAR

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi	% Capaian	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	88,09	109,02	105,46	Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	85,86	110,08		
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,42	103,50		
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	77,42	99,26		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	74	76,36	103,19	103,19	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	82,50	99,40	103,80	Baik
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	73,94	107,16		
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	93,31	104,84		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	68,19	78,38	103,65	Baik
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51,91	94,38		
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	96,43	113,45		
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	47,81	103,93		
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,95	132,64		
		14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,48	99,15		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan	85,16	92,41	108,51	102,13	Baik
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16,00	100,00		
		17	Jumlah desa pangan aman	4	4,00	100,00		
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2,00	100,00		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,21	112,01	117,72	Sangat Baik
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	92,57	123,43		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	98,04	146,33	146,33	Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar	85	50,45	59,35	77,37	Cukup
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	77,27	95,40		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	73,49	97,99	97,99	Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	70,60	89,59	88,51	Cukup
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	1,32	87,42		
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	93,07	100,08	106,86	Baik
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88,00	100,00	113,64		

Lampiran 5

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TW IV TAHUN 2020
BBPOM DI MAKASSAR

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Input : Dana	Rp	470.071.306	452.069.243	96,17
			Output : Persentase sample yang	Persentase	80,80	88,09	109,02
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Input : Dana	Rp	137.275.677	124.686.401	90,83
			Output : Persentase sample yang	Persentase	78,00	85,86	110,08
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	Rp	112.276.694	107.976.895	96,17
			Output : Persentase sample yang	Persentase	80,60	83,42	103,50
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	Rp	46.789.323	42.498.368	90,83
			Output : Persentase sample yang	Persentase	78,00	77,42	99,26
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	346.890.000	308.712.210	88,99
			Output : Nilai Indeks	Indeks	74,00	76,36	103,19
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	71.312.000	65.616.470	92,01
			Output : Nilai Indeks	Indeks	83,00	82,50	99,40
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	98.825.000	84.252.894	85,25
			Output : Nilai Indeks	Indeks	69,00	73,94	107,16
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Input : Dana	Rp	59.746.000	33.589.600	56,22
			Output : Nilai Indeks	Indeks	89,00	93,31	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Input : Dana	Rp	80.759.000	74.979.128	92,84
			Output : Persentase keputusan/rekomendasi	Persentase	87,00	68,19	-
		10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil	Input : Dana	Rp	34.611.000	32.133.912	92,84

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Output : Persentase keputusan/rekomendasi	%	55,00	51,91	-
		11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Input : Dana	Rp	231.191.000	227.139.478	98,25
			Output : Persentase keputusan penilaian sertifikasi	Persentase	85,00	96,43	-
		12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	Rp	347.825.000	312.818.208	89,94
			Output : Persentase sarana produksi Obat	Persentase	46,00	47,81	103,93
		13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana	Rp	1.310.394.000	1.246.041.605	95,09
			Output : Persentase sarana distribusi Obat	Persentase	55,00	72,95	132,64
		14 Indeks Pelayanan Publik	Input : Dana	Rp	6.911.000	5.741.500	83,08
			Output : Nilai Indeks	Indeks	3,51	3,48	99,15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5.209.999.000	4.484.421.570	86,07
			Output : Jumlah KIE	KIE	85,16	92,41	-
		16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana	Rp	345.832.000	302.050.650	87,34
			Output : Jumlah Sekolah	Sekolah	16,00	16,00	-
		17 Jumlah desa pangan aman	Input : Dana	Rp	587.620.000	548.225.370	93,30
			Output : Jumlah Desa	Desa	4,00	4,00	-
		18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Input : Dana	Rp	214.600.000	141.921.500	66,13
			Output : Jumlah Pasar	Pasar	2,00	2,00	-
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	Rp	1.433.882.093	972.324.169	67,81
			Output : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji	Persentase	85,00	95,21	112,01
		20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	Rp	969.747.907	733.383.341	75,63
			Output : Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji	Persentase	75,00	92,57	123,43

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	796.433.000	742.870.710	93,27
			Output : Persentase keberhasilan penindakan	Persentase	67,00	98,04	146,33
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22 Indeks RB BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	24.674.274.000	22.640.597.856	91,76
			Output : Indeks RB	Indeks	85,00	50,45	-
		23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	169.935.000	166.871.300	98,20
			Output : Nilai AKIP	Nilai	81,00	77,27	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	611.234.000	548.118.123	89,67
			Output : Indeks ASN	Indeks	75,00	73,49	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Input : Dana	Rp	1.452.295.000	1.357.096.829	93,44
			Output : Persentase pemenuhan laboratorium	Persentase	78,80	70,60	-
		26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	Input : Dana	Rp	596.359.000	502.129.154	84,20
			Output : Indeks pengelolaan data	Nilai	1,51	1,32	87,42
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	5.466.378.000	4.907.797.868	89,78
			Output : Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	32,00	32,00	100,00
		28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Input : Dana	Rp	108.576.000	106.120.599	97,74
			Output : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Nilai	34,00	34,00	100,00

Lampiran 6

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TRIWULAN I TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,17	109,02	1,13	1	EFISIEN	0,13
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,83	110,08	1,21	1	EFISIEN	0,21
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,17	103,50	1,08	1	EFISIEN	0,08
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,83	99,26	1,09	1	EFISIEN	0,09
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	88,99	103,19	1,16	1	EFISIEN	0,16
3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,01	99,40	1,08	1	EFISIEN	0,08
	7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,25	107,16	1,26	1	EFISIEN	0,26
	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	56,22	104,84	1,86	1	EFISIEN	0,86
4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,84	78,38	0,84	1	TIDAK EFISIEN	-0,16
	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,84	94,38	1,02	1	EFISIEN	0,02
	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,25	113,45	1,15	1	EFISIEN	0,15
	12 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	89,94	103,93	1,16	1	EFISIEN	0,16
	13 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	95,09	132,64	1,39	1	EFISIEN	0,39
	14 Indeks Pelayanan Publik	83,08	99,15	1,19	1	EFISIEN	0,19
5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,07	108,51	1,26	1	EFISIEN	0,26
	16 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	87,34	100,00	1,14	1	EFISIEN	0,14
	17 Jumlah desa pangan aman	93,30	100,00	1,07	1	EFISIEN	0,07
	18 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	66,13	100,00	1,51	1	EFISIEN	0,51

Sasaran Strategis	Indikator	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	67,81	112,01	1,65	1	EFISIEN	0,65
	20 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,63	123,43	1,63	1	EFISIEN	0,63
7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja	21 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93,27	146,33	1,57	1	EFISIEN	0,57
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22 Indeks RB BBPOM di Makassar	91,76	59,35	0,65	1	TIDAK EFISIEN	-0,35
	23 Nilai AKIP BBPOM di Makassar	98,20	95,40	0,97	1	TIDAK EFISIEN	-0,03
9 Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	89,67	97,99	1,09	1	EFISIEN	0,09
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93,44	89,59	0,96	1	TIDAK EFISIEN	-0,04
	26 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang	84,20	87,42	1,04	1	EFISIEN	0,04
11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	89,78	100,08	1,11	1	EFISIEN	0,11
	28 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	97,74	113,64	1,16	1	EFISIEN	0,16
Total		**89,74**	**103,29**	**1,15**	**1**	**EFISIEN**	**0,15**

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com, Email : bpom_makassar@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR OR.05.01.114.1141.05.20.1257B TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada Balai Besar POM di Makassar;
- bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama (IKU) Balai Besar POM di Makassar.

Mengingat :

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7841, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

- Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.05.20.1257A Tahun 2020 tentang Recana Strategis Indikator Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Besar POM di Makassar untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024;

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Makassar serta penetapan RS, RKT, RKA dan PK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Balai Besar POM di Makassar;

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2020 – 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 29 Mei 2020

PLT. K E P A L A,

Dra. Sriyani Rasyid, Apt.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
Jl. Baji Minasa No.2 Makassar 90126, Telp. (0411) 872021, Fax. (0411) 873496
Email : bbpomdimakassar@gmail.com, Email : bpom_makassar@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
NOMOR OR.05.01.114.1141.05.20.1257B
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

1.	Nama Organisasi	:	**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR**
2.	Tugas	:	Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di Propinsi Kalimantan Selatan.
3.	Fungsi	:	• Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan; • Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; • Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; • Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas prodiksi dan/ atau distibusi Obat dan Makanan; • Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; • Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; • Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; • Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; • Pelaksanan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	5 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Makassar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		14	Indeks Pelayanan Publik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		17	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Makassar
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Makassar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Makassar
		23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan BBPOM di Makassar	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar sesuai standar GLP
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar

PLT. K E P A L A,

Dra. Sriyani Rasyid, Apt.

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 90126,Tlp. (0411) 871115,Fax. (0411)873496
email : ulpkmks@yahoo.com. kepeg_bbpommks@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR OR.05.01.114.1141.05.20.1257b TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR OR.05.01.114.1141.11.19.5414a TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.11.19.5414a Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Nomor OR.05.01.114.1141.11.19.5414a Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR NOMOR OR.05.01.114.1141.11.19.5414a TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 29 Mei 2020

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

(Sriyani Rasyid)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

NOMOR OR.05.01.114.1141.05.20.1257b TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR OR.05.01.114.1141.11.19.5414a TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang	67

	Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Obat dan Makanan	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	85
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPTBBPOM di Makassar	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)

Plt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

(Sriyani Rasyid)

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Jl. Baji Minasa No. 2 Makassar 90126,Tlp. (0411) 871115,Fax. (0411)873496
email : ulpkmks@yahoo.com. kepeg_bbpommks@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

(BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sriyani Rasyid, Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 29 Mei 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P	Dra. Sriyani Rasyid, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	55

		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di ng wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	85
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	Efisien (88%)

Kegiatan	**Anggaran**
1 Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 44.216.042.000

Makassar, 29 Mei 2020

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P

Plt. Kepala BBPOM di Makassar

Dra. Sriyani Rasyid, Apt

Lampiran 10

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020
BBPOM DI MAKASSAR

	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Sampel Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	652.423.000	625.331.869	95,85
		Output : Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa	sampel	889,00	882,00	99,21
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	425.485.000	374.079.598	87,92
		Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Sarana	206,00	228,00	110,68
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	1.446.929.000	1.362.725.072	94,18
		Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Sarana	1299,00	1331,00	102,46
4	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	8.680.000	7.009.710	80,76
		Output : Jumlah Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Laporan	4,00	4,00	100,00
5	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	Rp	2.914.926.000	2.150.143.039	73,76
		Output : Jumlah Laboratorium	Laboratorium	1,00	1,00	100,00
6	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan	Input : Dana	Rp	787.753.000	735.861.000	93,41
		Output : Jumlah Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Perkara	9,00	9,00	100,00
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	1.054.989.000	1.011.180.338	95,85
		Output : Jumlah Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang	Sampel	1860,00	1855,00	99,73

	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
8	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	155.438.000	128.575.630	82,72
		Output : Jumlah Penguatan Kelembagaan	UPT	1,00	1,00	100,00
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	345.832.000	288.575.150	83,44
		Output : Jumlah Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Sekolah	16,00	16,00	100,00
10	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Input : Dana	Rp	302.503.000	291.855.948	96,48
		Output : Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Jenis Keputusan	7,00	7,00	100,00
11	KIE Obat dan Makanan Aman	Input : Dana	Rp	5.623.546.000	4.770.133.343	84,82
		Output : Jumaah KIE Obat dan Makanan Aman	KIE	86,00	90,00	104,65
12	Desa Pangan Aman	Input : Dana	Rp	587.620.000	512.512.370	87,22
		Output : Jumlah Desa Pangan Aman	Desa	4,00	4,00	100,00
13	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	214.600.000	141.921.500	66,13
		Output : Jumlah Pasar yang Diintervensi	Pasar	2,00	2,00	100,00
14	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Input : Dana	Rp	1.487.463.000	1.445.326.855	97,17
		Output : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1,00	1,00	100,00
15	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Input : Dana	Rp	2.476.231.000	2.198.215.302	88,77
		Output : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1,00	1,00	100,00
16	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	27.507.624.000	25.228.738.227	91,72
		Output : Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100,00

Lampiran 11

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA KEGIATAN

No	Program/Kegiatan/ Output	Rata-rata % Capaian		IE	TE	Kategori	
		Input	Output				
1.	Sampel Makanan yang Diperiksa	95,85	99,21	1,04	0,04	Efisien	100 %
2.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	87,92	110,68	1,26	0,26	Efisien	95 %
3.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	94,18	102,46	1,09	0,09	Efisien	100 %
4.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	80,76	100,00	1,24	0,24	Efisien	95 %
5.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	73,76	100,00	1,36	0,36	Efisien	95 %
6.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan	93,41	100,00	1,07	0,07	Efisien	100 %
7.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	95,85	99,73	1,04	0,04	Efisien	100 %
8.	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	82,72	100,00	1,21	0,21	Efisien	95 %
9.	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	83,44	100,00	1,20	0,20	Efisien	100 %
10.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	96,48	100,00	1,04	0,04	Efisien	100 %
11.	KIE Obat dan Makanan Aman	84,82	104,65	1,23	0,23	Efisien	95 %
12.	Desa Pangan Aman	87,22	100,00	1,15	0,15	Efisien	100 %
13.	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	66,13	100,00	1,51	0,51	Efisien	92 %
14.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	97,17	100,00	1,03	0,03	Efisien	100 %
15	Layanan Dukungan Manajemen Satker	88,77	100,00	1,13	0,13	Efisien	100 %
16.	Layanan Perkantoran	91,72	100,00	1,09	0,09	Efisien	100 %

LAMPIRAN _11

CAPAIAN KINERJA

BALAI BESARR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

TAHUN 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi 2020			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaia
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective									
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	1294	1469	88,09	109,02	109,02
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	571	665	85,86	110,08	110,08
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	80,6	322	386	83,42	103,50	103,50
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	168	217	77,42	99,26	99,26
Capaian SS1								**105,46**	**105,46**
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	74	-	-	76,36	103,19	103,19
Capaian SS2								**103,19**	**103,19**
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	-	-	82,50	99,40	99,40
		IKSS7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	-	-	73,94	107,16	107,16
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89			93,31	104,84	104,84
Capaian SS3								**103,80**	**103,80**
Capaian Perspective sakeholder								**104,15**	**104,15**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaia
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Internal Process Perspective									
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	-	-	68,19	78,38	78,38
		IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	-	-	51,91	94,38	94,38
		IKSS11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	351	364	96,43	113,45	113,45
		IKSS12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	109	228	47,81	103,93	103,93
		IKSS13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	971	1331	72,95	132,64	120,00
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	-	-	3,48	99,15	99,15
Capaian SS4								**103,65**	**101,55**
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	-	-	92,41	108,51	108,51
		IKSS16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	-	-	16,00	100,00	100,00
		IKSS17	Jumlah desa pangan aman	4	-	-	4,00	100,00	100,00
		IKSS18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	-	-	2,00	100,00	100,00
Capaian SS5								**102,13**	**102,13**
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	-	-	95,21	112,01	112,01
		IKSS20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	-	-	92,57	123,43	120,00
Capaian SS6								**117,72**	**116,01**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaia
					2020				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	-	-	98,04	146,33	120,00
Capaian SS7								**146,33**	**120,00**
Capaian Internal Process Perspective								**117,46**	**109,92**
Learning & Growth Perspective									
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang	IKSS22	Indeks RB BBPOM di Makassar	85	-	-	50,45	59,35	59,35
		IKSS23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	81	-	-	77,27	95,40	95,40
Capaian SS8								**77,37**	**77,37**
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	75	-	-	73,49	97,99	97,99
Capaian SS9								**97,99**	**97,99**
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	IKSS25	Persentase pemenuhan	78,8		-	70,60	89,59	89,59
		IKSS26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	1,51	-	-	1,32	87,42	87,42
Capaian SS10								**88,51**	**88,51**
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS26	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	93	-	-	93,07	100,08	100,08
		IKSS27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	88	-	-	100,00	113,64	113,64
Capaian SS11								**106,86**	**106,86**
Capaian Learning & Growth Perspective								**92,68**	**92,68**
NPS TOTAL								**104,76**	**102,25**

Lampiran 13

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2020

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2020	Target triwulanan (kumulatif)			
						s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
Makassar	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	80,80%	80,80%	80,80%	80,80%
Makassar	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	78%	78%	78%	78%
Makassar	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%	80,60%
Makassar	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78%	78%	78%	78%	78%
Makassar	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja	74	-	-	-	74
Makassar	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	-	-	-	83
Makassar	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69	-	-	-	69

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2020	Target triwulanan (kumulatif)			
						s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
Makassar	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	-	-	-	89
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46%	46%	46%	46%	46%
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	55%	55%
Makassar	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Indeks Pelayanan Publik	3,51	-	-	3,51	3,51
Makassar	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	-	85,16	85,16	85,16

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2020	Target triwulanan (kumulatif)			
						s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
Makassar	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	-	-	-	16
Makassar	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah desa pangan aman	4	-	-	-	4
Makassar	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	-	-	-	2
Makassar	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	15	20	60	85
Makassar	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	10	15	30	75
Makassar	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67%	33%	43%	50%	67%
Makassar	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	85	-	-	-	85
Makassar	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	23	Nilai AKIP UPT	81	-	-	-	81

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2020	Target triwulanan (kumulatif)			
						s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
Makassar	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	-	-	-	75
Makassar	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	-	-	-	78,8
Makassar	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	-	0,4	0,9	1,51
Makassar	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	30	50	75	93
Makassar	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88%	88%	88%	88%	88%

JANJIAN KINERJA

	Indikator	Realisasi per Triwulan (Kumulatif)								
		s,d TW I			s,d TW II			s,d TW III		
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	120	135	88,89%	469	513	91,42%	875	971	90,11%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	2	0,00%	25	30	83,33%	224	239	93,72%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	32	41	78,05%	107	120	89,17%	193	237	81,43%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	41	52	78,85%	72	111	64,86%	109	153	71,24%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Indikator	Realisasi per Triwulan (Kumulatif)								
		s,d TW I			s,d TW II			s,d TW III		
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			49,66			54,14			74,30
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			18,50			29,76			46,43
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	50	107	46,73%	160	182	87,91%	222	258	86,05%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	12	38	31,58%	25	65	38,46%	56	144	38,89%
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183	297	61,62%	309	476	64,92%	610	888	68,69%
14	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	3,48	-	-	3,48
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	89,42	-	-	87,94

	Indikator	Realisasi per Triwulan (Kumulatif)								
		s,d TW I			s,d TW II			s,d TW III		
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	40,00%
17	Jumlah desa pangan aman	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	45,00%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,00	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	75,00%
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	18,91	-	-	34,39	-	-	62,38
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	11,17	-	-	21,70	-	-	50,69
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	46,67%	-	-	60,29%	-	-	85,29%
22	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Indikator	Realisasi per Triwulan (Kumulatif)								
		s,d TW I			s,d TW II			s,d TW III		
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	-	-	0,55	-	-	0,25
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	50,332	-	-	52,072	-	-	55,252
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	-	-	78%			90%			100%

JANJIAN KINERJA

	Indikator				Capaian terhadap target TW (kumulatif)			
		s,d TW IV			s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
		Pembilang	Penyebut	Realisasi				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1294	1469	88,09%	110,01%	113,15%	111,53%	109,02%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	571	665	85,86%	0,00%	106,84%	120,16%	110,08%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	322	386	83,42%	96,83%	110,63%	101,04%	103,50%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	168	217	77,42%	101,08%	83,16%	91,34%	99,26%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja	-	-	76,36	0	0	0	103,19%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	82,5	0	0	0	99,40%
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	73,94	0	0	0	107,16%

	Indikator				Capaian terhadap target TW (kumulatif)			
		s,d TW IV			s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
		Pembilang	Penyebut	Realisasi				
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	93,31	0	0	0	104,84%
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0		68,19	57,08%	62,23%	85,40%	78,37%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			51,91	33,64%	54,11%	84,42%	94,39%
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	351	364	96,43%	54,98%	103,43%	101,23%	113,45%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109	228	47,81%	68,65%	83,61%	84,54%	103,93%
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	971	1331	72,95%	112,03%	118,03%	124,90%	132,64%
14	Indeks Pelayanan Publik	-	-	3,48	0	0	99,15%	99,15%
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	92,41	0	105,00%	103,26%	108,51%

	Indikator				Capaian terhadap target TW (kumulatif)			
		s,d TW IV			s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
		Pembilang	Penyebut	Realisasi				
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	16	0	0	0	100,00%
17	Jumlah desa pangan aman	0	0	4	0	0	0	100,00%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	0	2	0	0	0	100,00%
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	95,35	126,06%	171,97%	103,96%	112,18%
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	92,57	111,71%	144,69%	168,96%	123,43%
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	98,04%	141,41%	140,22%	170,58%	146,33%
22	Indeks RB UPT	-	-	50,45	0	0	0	59,35%
23	Nilai AKIP UPT	-	-	77,27	0	0	0	95,40%

	Indikator				Capaian terhadap target TW (kumulatif)			
		s,d TW IV			s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
		Pembilang	Penyebut	Realisasi				
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	73,49	0	0	0	97,99%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	70,60	0	0	0	89,59%
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	1,32	0	137,50%	27,78%	87,42%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	93,076	167,77%	104,14%	73,67%	100,08%
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			100%	88,64%	102,27%	113,64%	113,64%

JANJIAN KINERJA

	Indikator	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)			
		s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	110,01%	113,15%	111,53%	109,02%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0,00%	106,84%	120,16%	110,08%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,83%	110,63%	101,04%	103,50%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	101,08%	83,16%	91,34%	99,26%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja	0	0	0	103,19%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	99,40%
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	107,16%

	Indikator	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)			
		s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0	104,84%
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	57,08%	62,23%	85,40%	78,37%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	33,64%	54,11%	84,42%	94,39%
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	54,98%	103,43%	101,23%	113,45%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,65%	83,61%	84,54%	103,93%
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	112,03%	118,03%	124,90%	132,64%
14	Indeks Pelayanan Publik	0	99,15%	99,15%	99,15%
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	105,00%	103,26%	108,51%

	Indikator	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)			
		s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5,00%	15,00%	40,00%	100,00%
17	Jumlah desa pangan aman	0,00%	3,00%	45,00%	100,00%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25,00%	25,00%	75,00%	100,00%
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,25%	40,46%	73,39%	112,18%
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14,90%	28,94%	67,59%	123,43%
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,65%	89,99%	127,30%	146,33%
22	Indeks RB UPT	0	0	0	59,35%
23	Nilai AKIP UPT	0	0	0	95,40%

	Indikator	Capaian terhadap target tahun (kumulatif)			
		s,d TW I	s,d TW II	s,d TW III	s,d TW IV
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	97,99%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	89,59%
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	36,42%	16,56%	87,42%
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	54,12%	55,99%	59,41%	100,08%
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88,64%	102,27%	113,64%	113,64%

UPT	No	Jenis Produk	UPT	Total															RAPK 2020
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
												MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Makassar	Sampel obat, Obat bahan ala																		
	1	Obat	Makassar	94	1	31	0	2	62	60	57	1	2	0	0	35	2	92	
			Kota Palopo	21	0	0	0	4	21	21	17	0	4	0	0	4	0	21	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Makassar	377	0	0	0	24	377	376	352	0	24	0	0	24	1	376	
			Kota Palopo	92	1	0	0	16	91	91	75	0	16	0	0	17	0	92	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	584	2	31	0	46	551	548	501	1	46	0	0	80	3	581	86,23
	2	Obat Tradisio	Makassar	93	0	0	0	7	93	93	90	1	2	0	0	3	0	93	
			Kota Palopo	22	0	0	0	7	22	22	15	0	7	0	0	7	0	22	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Makassar	215	20	0	0	2	195	195	185	1	9	0	0	30	0	215	
			Kota Palopo	52	0	0	0	27	52	52	25	2	25	0	0	27	0	52	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	382	20	0	0	43	362	362	315	4	43	0	0	67	0	382	82,46
	3	Suplemen	Makassar	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	
			Kota Palopo	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Makassar	99	0	0	0	0	99	99	99	0	0	0	0	0	0	99	
			Kota Palopo	21	0	0	0	2	21	21	19	0	2	0	0	2	0	21	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	127	0	0	0	2	127	127	125	0	2	0	0	2	0	127	98,43
	4	Kosmeti	Makassar	121	0	0	0	2	121	121	118	0	3	0	0	3	0	121	
			Kota Palopo	30	0	0	0	13	30	30	18	0	12	0	0	12	0	30	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Makassar	496	12	6	0	4	478	478	473	2	3	0	0	23	0	496	
			Kota Palopo	118	2	0	0	49	116	116	66	0	50	0	0	52	0	118	
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	765	14	6	0	68	745	745	675	2	68	0	0	90	0	765	88,24
		Total Obat		115	1	31	0	6	83	81	74	1	6	0	0	39	2	113	65,49
		Total Obat Tradisional		115	0	0	0	14	115	115	105	1	9	0	0	10	0	115	91,30
		Total Suplemen		7	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7	100,00
		Total Kosmetik		151	0	0	0	15	151	151	136	0	15	0	0	15	0	151	90,07
		Makassar		311	1	31	0	11	279	277	268	2	7	0	0	41	2	309	86,73
		Kota Palopo		77	0	0	0	24	77	77	54	0	23	0	0	23	0	77	70,13
		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total targeted Obat,		388	1	31	0	35	356	354	322	2	30	0	0	64	2	386	83,42
		Total Obat		469	1	0	0	40	468	467	427	0	40	0	0	41	1	468	91,24
		Total Obat Tradisional		267	20	0	0	29	247	247	210	3	34	0	0	57	0	267	78,65
		Total Suplemen		120	0	0	0	2	120	120	118	0	2	0	0	2	0	120	98,33
		Total Kosmetik		614	14	6	0	53	594	594	539	2	53	0	0	75	0	614	87,79
		Makassar		1187	32	6	0	30	1149	1148	1109	3	36	0	0	77	1	1186	93,51
		Kota Palopo		283	3	0	0	94	280	280	185	2	93	0	0	98	0	283	65,37
		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total Random Obat,		1470	35	6	0	124	1429	1428	1294	5	129	0	0	175	1	1469	88,09
		TOTAL Obat, OT, Sk		1858	36	37	0	159	1785	1782	1616	7	159	0	0	239	3	1855	87,12
	Sampel Makanan yang diperi																		

UPT	No	Jenis Produk	UPT	Total															RAPK 2020
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
												MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
	1	Pangan	Makassar	191	0	0	0	35	191	191	144	15	11	21	0	47	0	191	75,39
		0	Kota Palopo	26	1	0	0	17	25	25	24	0	0	1	0	2	0	26	92,31
		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		0	Makassar	554	20	1	0	2	533	533	498	33	0	2	0	56	0	554	89,89
		0	Kota Palopo	111	0	0	0	37	111	111	73	3	23	12	0	38	0	111	65,77
		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total Pangan		217	1	0	0	52	216	216	168	15	11	22	0	49	0	217	77,42
		Total Pangan		665	20	1	0	39	644	644	571	36	23	14	0	94	0	665	85,86
		TOTAL PANGAN		882	21	1	0	91	860	860	739	51	34	36	0	143	0	882	83,79
Total BB/BPOM	**Sampel obat, Obat bahan ala**																		
		Total Obat		2.599	7	32	0	220	2.560	2.548	2.346	35	154	13	0	241	12	2.587	90,68
		Total Obat Tradisional		2.727	15	2	0	413	2.710	2.706	2.158	126	374	49	0	565	4	2.723	79,25
		Total Suplemen		460	2	0	0	18	458	436	398	25	12	1	0	40	2	438	90,87
		Total Kosmetik		3.720	9	0	0	493	3.711	3.703	3.032	72	565	34	0	681	8	3.712	81,68
		Total Balai		7.809	27	33	0	906	7.749	7.720	6.519	220	901	81	0	1.262	29	7.780	83,79
		Total Loka 1		1.230	5	0	0	172	1.225	1.228	1.037	30	147	14	0	196	-4	1.232	84,17
		Total Loka 2		448	1	1	0	66	446	445	391	8	57	2	0	69	1	448	87,28
		Total targeted Obat,		9.506	33	34	0	1.144	9.439	9.393	7.934	258	1.105	97	0	1.527	26	9.460	83,87
		Total Obat		10.181	12	11	0	653	10.158	10.160	9.479	89	584	8	0	704	-2	10.183	93,09
		Total Obat Tradisional		6.600	93	7	0	890	6.500	6.496	5.393	197	840	65	0	1.202	4	6.596	81,76
		Total Suplemen		2.718	8	0	0	119	2.710	2.700	2.473	133	88	6	0	235	10	2.708	91,32
		Total Kosmetik		14.954	146	42	2	1.614	14.764	14.714	12.664	68	1.959	23	0	2.239	50	14.904	84,97
		Total Balai		27.993	220	55	2	2.497	27.716	27.662	24.423	394	2.753	88	0	3.512	54	27.939	87,42
		Total Loka 1		4.707	35	2	0	551	4.670	4.662	4.081	67	507	10	0	620	8	4.699	86,85
		Total Loka 2		1.753	4	3	0	228	1.746	1.746	1.505	26	211	4	0	248	0	1.753	85,85
		Total Random Obat,		34.453	259	60	2	3.276	34.132	34.070	30.009	487	3.471	102	0	4.380	62	34.391	87,26
		TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		43.945	292	94	2	4.423	43.557	43.463	37.943	745	4.576	199	0	5.907	88	43.851	86,53
	Sampel Makanan yang diperi																		
		Total Pangan		5.820	14	1	0	971	5.805	5.795	4.262	369	323	156	698	1.561	10	5.814	73,31
		Total Pangan		12.793	44	17	5	1.568	12.727	12.718	10.446	675	1.337	257	3	2.338	9	12.784	81,71
		TOTAL PANGAN		18.613	58	18	5	2.539	18.532	18.517	14.699	1.044	1.660	413	701	3.899	15	18.598	79,04
		TOTAL		62.558	350	112	7	6.962	62.089	61.980	52.642	1.789	6.236	612	701	9.806	103	62.449	84,30

Lampiran 15

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

Makassar

					kunci			kunci			kunci			kunci		
No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			April		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	8	8	0	0	0	0	0	0	0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Makassar	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Makassar	31	8	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0			0			0			0		
		Kota Palopo	0	0	0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Makassar	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Makassar	130	114	2	0	2	13	3	10	2	1	1	1	1	0
		Kota Palopo	20	20	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			April		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	150	134	2	0	2	13	3	10	3	1	2	1	1	0
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Makassar	1484	52	1	0	1	5	3	2	1	0	1	0	0	0
		Kota Palopo	346	41	2	0	2	6	2	4	4	2	2	0	0	0
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	1830	93	3	0	3	11	5	6	5	2	3	0	0	0
	Makassar		1667	185	3	0	3	19	7	12	3	1	2	1	1	0
	Kota Palopo		374	69	2	0	2	6	2	4	5	2	3	0	0	0
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		2041	254	5	0	5	25	9	16	8	3	5	1	1	0

Lampiran 15

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN M

			kunci			kunci			kunci			kunci			kunci		
			Mei			Juni			Juli			Agustus			September		
No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Makassar	0			0			0	0	0	2	2	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Makassar	0	0	0	2	0	2	2	0	2	2	1	1	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	2	0	2	2	0	2	2	1	1	0	0	0
11	Industri Pangan	Makassar	0	0	0	12	10	2	11	9	2	20	10	10	3	2	1
		Kota Palopo	0	0	0	4	2	2	2	0	2	6	0	6	2	0	2

No	Sarana Produksi	UPT	Mei			Juni			Juli			Agustus			September		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	16	12	4	13	9	4	26	10	16	5	2	3
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Makassar	0	0	0	0	0	0	8	2	6	4	0	4	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	8	0	8	7	2	5	3	0	3	7	3	4
		-	0			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	8	0	8	15	4	11	7	0	7	7	3	4
	Makassar		0	0	0	14	10	4	21	11	10	28	13	15	3	2	1
	Kota Palopo		0	0	0	12	2	10	9	2	7	9	0	9	9	3	6
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	0	0	26	12	14	30	13	17	37	13	24	12	5	7

Lampiran 15

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN M

			kunci			kunci			kunci			kunci	kunci	kunci
			Oktober			November			Desember			Total		
No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Makassar	0			0			0			1	1	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Makassar	0			0			3	3	0	5	5	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	5	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0			0			0			0	0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Makassar	0			0			0			6	1	5
		Kota Palopo	0			0			0			0	0	0
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5
11	Industri Pangan	Makassar	5	2	3	12	9	3	8	6	2	89	50	36
		Kota Palopo	4	0	4	1	1	0	2	0	2	22	3	19

No	Sarana Produksi	UPT	Oktober			November			Desember			Total		
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	9	2	7	13	10	3	10	6	4	111	53	55
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Makassar	23	18	5	4	4	0	12	9	3	58	36	22
		Kota Palopo	3	0	3	2	0	2	5	1	4	47	10	37
		-	0			0			0			0	0	0
		TOTAL	26	18	8	6	4	2	17	10	7	105	46	59
	Makassar		28	20	8	16	13	3	23	18	5	159	93	63
	Kota Palopo		7	0	7	3	1	2	7	1	6	69	13	56
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		35	20	15	19	14	5	30	19	11	228	106	119

Lampiran 15

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN M

318

kunci kunci kunci kunci kunci kunci kunci kunci

No	Sarana Produksi	UPT	RAPK s,d, TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s,d, TW 2 (Jan - Juni)				RAPK s,d, TW 3 (Jan	
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)
1	Industri Farmasi (IF)	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Makassar	1	1	0		1	1	0		1	1
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	1	1	0	100,00	1	1	0	100,00	1	1
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Makassar	0	0	0		0	0	0		2	2
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0		0	0	0		0	0
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Makassar	0	0	0		2	0	2		6	1
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0		0	0
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	0	0	0	0	2	0	2	0,00	6	1
11	Industri Pangan	Makassar	17	4	13		30	15	15		64	36
		Kota Palopo	1	0	1		5	2	3		15	2

No	Sarana Produksi	UPT	RAPK s,d, TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s,d, TW 2 (Jan - Juni)				RAPK s,d, TW 3 (Jan	
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	18	4	14	22,22	35	17	18	48,57	79	38
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Makassar	7	3	4		7	3	4		19	5
		Kota Palopo	12	4	8		20	4	16		37	9
		-	0	0	0		0	0	0		0	0
		TOTAL	19	7	12	36,84	27	7	20	25,93	56	14
	Makassar		25	8	17	32,00	40	19	21	47,50	92	45
	Kota Palopo		13	4	9	30,77	25	6	19	24,00	52	11
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		38	12	26	31,58	65	25	40	38,46	144	56

Lampiran 15

PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN M

			kunci		kunci	kunci	kunci	
			- Sept)		RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
No	Sarana Produksi	UPT	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Makassar	0		1	1	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	100,00	1	1	0	100,00
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Makassar	0		5	5	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	100,00	5	5	0	100,00
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Makassar	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Makassar	5		6	1	5	
		Kota Palopo	0		0	0	0	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	5	16,67	6	1	5	16,67
11	Industri Pangan	Makassar	28		89	53	36	
		Kota Palopo	13		22	3	19	

No	Sarana Produksi	UPT	- Sept)		RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	41	48,10	111	56	55	50,45
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Makassar	14		58	36	22	
		Kota Palopo	28		47	10	37	
		-	0		0	0	0	
		TOTAL	42	25,00	105	46	59	43,81
	Makassar		47	48,91	159	96	63	60,38
	Kota Palopo		41	21,15	69	13	56	18,84
	-		0	0	0	0	0	0
	TOTAL		88	38,89	228	109	119	47,81

Lampiran 16

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Makassar

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Januari			Februari			Maret			
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Makassar	101	34	6	6	0	3	2	1	1	1	0	0
		Kota Palopo	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	102	35	6	6	0	3	2	1	2	1	1	0
2	Apotek	Makassar	1191	333	25	8	17	47	37	10	8	4	4	0
		Kota Palopo	229	97	6	0	6	8	2	6	5	0	5	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	1420	430	31	8	23	55	39	16	13	4	9	0
3	Toko Obat	Makassar	59	11	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
		Kota Palopo	75	19	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	134	30	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Makassar	18	18	1	0	1	3	2	1	1	0	1	0
		Kota Palopo	7	7	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	25	25	1	0	1	4	2	2	1	0	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Makassar	50	46	2	1	1	6	6	0	2	1	1	0
		Kota Palopo	22	18	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	72	64	2	1	1	10	7	3	2	1	1	0
6	Puskemas	Makassar	327	57	3	1	2	10	8	2	1	0	1	0
		Kota Palopo	121	26	4	0	4	3	0	3	4	0	4	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	448	83	7	1	6	13	8	5	5	0	5	0
7	Klinik	Makassar	26	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		Kota Palopo	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	43	21	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Makassar			0			0			0			0
		Kota Palopo			0			0			0			0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Makassar	381	121	8	8	0	10	8	2	2	2	0	0
		Kota Palopo	73	28	0	0	0	4	2	2	1	1	0	0
		-			0			0			0			0

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Januari			Februari			Maret			
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa
		TOTAL	454	149	8	8	0	14	10	4	3	3	0	0
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Makassar	115	46	4	4	0	4	4	0	1	1	0	6
		Kota Palopo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	115	46	4	4	0	4	4	0	1	1	0	6
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Makassar	287	174	17	14	3	10	10	0	3	2	1	0
		Kota Palopo	90	39	0	0	0	2	0	2	4	1	3	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	377	213	17	14	3	12	10	2	7	3	4	0
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Makassar	1030	252	30	27	3	9	9	0	9	3	6	8
		Kota Palopo	221	91	8	5	3	7	0	7	3	0	3	0
		-			0			0			0			0
		TOTAL	1251	343	38	32	6	16	9	7	12	3	9	8
	Makassar		3585	1110	96	69	27	104	87	17	29	15	14	14
	Kota Palopo		856	329	18	5	13	32	5	27	18	2	16	0
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		4441	1439	114	74	40	136	92	44	47	17	30	14

Lampiran 16

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DA

No	Sarana Distribusi	UPT	April		Mei			Juni			Juli			Agustus		
			MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Makassar	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	Makassar	0	0	0	0	0	29	26	3	49	38	11	23	19	4
		Kota Palopo	0	0	5	2	3	13	4	9	6	0	6	6	1	5
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	5	2	3	42	30	12	55	38	17	29	20	9
3	Toko Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	7	0	7
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Makassar	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	4	3	1
5	Rumah Sakit (RS)	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	1	2
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	1	2
6	Puskemas	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	2	3	0	3
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	2	5	2	3
7	Klinik	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	2	2
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Makassar			0			0			0			0		
		Kota Palopo			0			0			0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Makassar	0	0	0	0	0	17	13	4	9	4	5	14	12	2
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	6	5	1	5	2	3	1	1	0
		-			0			0			0			0		

No	Sarana Distribusi	UPT	April		Mei			Juni			Juli			Agustus		
			MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
		TOTAL	0	0	0	0	0	23	18	5	14	6	8	15	13	2
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Makassar	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	8	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	8	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	14	5	9	11	5	6	26	23	3
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	6	3	3	1	0	1	8	6	2
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	20	8	12	12	5	7	34	29	5
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Makassar	6	2	41	41	0	13	9	4	12	10	2	40	37	3
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	14	1	13	12	8	4	13	9	4
		-			0			0			0			0		
		TOTAL	6	2	41	41	0	27	10	17	24	18	6	53	46	7
	Makassar		12	2	42	42	0	75	55	20	89	64	25	122	105	17
	Kota Palopo		0	0	5	2	3	43	15	28	33	12	21	40	19	21
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		12	2	47	44	3	118	70	48	122	76	46	162	124	38

Lampiran 16

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DA

No	Sarana Distribusi	UPT	September			Oktober			November			Desember			Total	
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Makassar	0	0	0	6	6	0	2	2	0	7	7	0	27	26
		Kota Palopo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			2	1
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	1	1	0	6	6	0	2	2	0	7	7	0	29	27
2	Apotek	Makassar	47	40	7	21	19	2	22	20	2	11	10	1	282	221
		Kota Palopo	6	3	3	4	3	1	4	0	4	0			63	15
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	53	43	10	25	22	3	26	20	6	11	10	1	345	236
3	Toko Obat	Makassar	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	6	1	15	8
		Kota Palopo	4	0	4	4	0	4	1	1	0	0			19	1
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	4	0	4	5	1	4	1	1	0	7	6	1	34	9
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Makassar	1	1	0	2	2	0	0			1	1	0	14	11
		Kota Palopo	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0			6	2
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	1	1	0	3	2	1	1	1	0	1	1	0	20	13
5	Rumah Sakit (RS)	Makassar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8
		Kota Palopo	3	0	3	0	0	0	1	1	0	0			13	4
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	3	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	23	12
6	Puskemas	Makassar	14	14	0	16	16	0	26	26	0	13	13	0	85	80
		Kota Palopo	2	0	2	3	1	2	2	0	2	0			26	4
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	16	14	2	19	17	2	28	26	2	13	13	0	111	84
7	Klinik	Makassar	1	1	0	1	1	0	2	1	1	10	8	2	20	16
		Kota Palopo	2	0	2	2	1	1	1	1	0	0			7	2
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	3	1	2	3	2	1	3	2	1	10	8	2	27	18
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Makassar	0			0			0			0			0	0
		Kota Palopo	0			0			0			0			0	0
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Makassar	12	12	0	21	15	6	19	17	2	4	4	0	116	95
		Kota Palopo	4	3	1	3	2	1	4	3	1	0			28	19
		-	0			0			0			0			0	0

No	Sarana Distribusi	UPT	September			Oktober			November			Desember			Total	
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK
		TOTAL	16	15	1	24	17	7	23	20	3	4	4	0	144	114
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Makassar	4	4	0	4	4	0	19	16	3	4	4	0	57	54
		Kota Palopo	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	4	4	0	4	4	0	19	16	3	4	4	0	57	54
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Makassar	9	9	0	10	9	1	27	23	4	12	8	4	139	108
		Kota Palopo	1	0	1	9	4	5	7	6	1	2	1	1	40	21
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	10	9	1	19	13	6	34	29	5	14	9	5	179	129
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Makassar	8	8	0	9	8	1	55	45	10	37	30	7	271	233
		Kota Palopo	9	5	4	13	5	8	7	5	2	5	4	1	91	42
		-	0			0			0			0			0	0
		TOTAL	17	13	4	22	13	9	62	50	12	42	34	8	362	275
	Makassar		96	89	7	91	81	10	172	150	22	106	91	15	1036	860
	Kota Palopo		32	12	20	39	16	23	28	18	10	7	5	2	295	111
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		128	101	27	130	97	33	200	168	32	113	96	17	1331	971

Lampiran 16

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DA

No	Sarana Distribusi	UPT		RAPK s,d, TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s,d, TW 2 (Jan - Juni)			
			TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Makassar	1								
		Kota Palopo	1								
		-	0								
		TOTAL	2	11	9	2	81,82	13	11	2	84,62
2	Apotek	Makassar	61								
		Kota Palopo	48	19	2	17		37	8	29	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	109	99	51	48	51,52	146	83	63	56,85
3	Toko Obat	Makassar	7	2	1	1		2	1	1	
		Kota Palopo	18	3	0	3		5	0	5	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	25	5	1	4	20,00	7	1	6	14,29
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Makassar	3	5	2	3		6	3	3	
		Kota Palopo	4	1	0	1		1	0	1	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	7	6	2	4	33,33	7	3	4	42,86
5	Rumah Sakit (RS)	Makassar	2	10	8	2		10	8	2	
		Kota Palopo	9	4	1	3		5	2	3	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	11	14	9	5	64,29	15	10	5	66,67
6	Puskemas	Makassar	5	14	9	5		14	9	5	
		Kota Palopo	22	11	0	11		12	1	11	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	27	25	9	16	36,00	26	10	16	38,46
7	Klinik	Makassar	4	1	1	0		1	1	0	
		Kota Palopo	5	0	0	0		0	0	0	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	9	1	1	0	100,00	1	1	0	100,00
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Makassar	0	0	0	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0	0	0	0		0	0	0	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Makassar	21	20	18	2		37	31	6	
		Kota Palopo	9	5	3	2		11	8	3	
		-	0	0	0	0		0	0	0	

No	Sarana Distribusi	UPT		RAPK s,d, TW 1 (Jan - Mar)				RAPK s,d, TW 2 (Jan - Juni)			
			TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
		TOTAL	30	25	21	4	84,00	48	39	9	81,25
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Makassar	3	9	9	0		15	15	0	
		Kota Palopo	0	0	0	0		0	0	0	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	3	9	9	0	100,00	15	15	0	100,00
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Makassar	31	30	26	4		44	31	13	
		Kota Palopo	19	6	1	5		12	4	8	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	50	36	27	9	75,00	56	35	21	62,50
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Makassar	38	48	39	9		110	95	15	
		Kota Palopo	49	18	5	13		32	6	26	
		-	0	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	87	66	44	22	66,67	142	101	41	71,13
	Makassar		176	229	171	58	74,67	360	280	80	77,78
	Kota Palopo		184	68	12	56	17,65	116	29	87	25,00
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		360	297	183	114	61,62	476	309	167	64,92

Lampiran 16

PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DA

No	Sarana Distribusi	UPT	RAPK s,d, TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Makassar								
		Kota Palopo								
		-								
		TOTAL	14	12	2	85,71	29	27	2	93,10
2	Apotek	Makassar								
		Kota Palopo	55	12	43		63	15	48	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	283	184	99	65,02	345	236	109	68,41
3	Toko Obat	Makassar	7	1	6		15	8	7	
		Kota Palopo	14	0	14		19	1	18	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	21	1	20	4,76	34	9	25	26,47
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Makassar	11	8	3		14	11	3	
		Kota Palopo	4	1	3		6	2	4	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	15	9	6	60,00	20	13	7	65,00
5	Rumah Sakit (RS)	Makassar	10	8	2		10	8	2	
		Kota Palopo	12	3	9		13	4	9	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	22	11	11	50,00	23	12	11	52,17
6	Puskemas	Makassar	30	25	5		85	80	5	
		Kota Palopo	21	3	18		26	4	22	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	51	28	23	54,90	111	84	27	75,68
7	Klinik	Makassar	7	6	1		20	16	4	
		Kota Palopo	4	0	4		7	2	5	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	11	6	5	54,55	27	18	9	66,67
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Makassar	0	0	0		0	0	0	
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Makassar	72	59	13		116	95	21	
		Kota Palopo	21	14	7		28	19	9	
		-	0	0	0		0	0	0	

No	Sarana Distribusi	UPT	RAPK s,d, TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
		TOTAL	93	73	20	78,49	144	114	30	79,17
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Makassar	30	30	0		57	54	3	
		Kota Palopo	0	0	0		0	0	0	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	30	30	0	100,00	57	54	3	94,74
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Makassar	90	68	22		139	108	31	
		Kota Palopo	22	10	12		40	21	19	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	112	78	34	69,64	179	129	50	72,07
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Makassar	170	150	20		271	233	38	
		Kota Palopo	66	28	38		91	42	49	
		-	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	236	178	58	75,42	362	275	87	75,97
	Makassar		667	538	129	80,66	1036	860	176	83,01
	Kota Palopo		221	72	149	32,58	295	111	184	37,63
	-		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		888	610	278	68,69	1331	971	360	72,95

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

	No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari	
					Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan
Makassar	1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	6	6	6	2	2
	2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	11	11	11	7	7
	3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	7	0	0	18	9
				Kota Palopo	1	0	0	0	0
				-					
	4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	1	0	0	1	2
				Kota Palopo	0	0	0	0	0
				-					
	Total			Makassar	25	17	17	28	20
				Kota Palopo	1	0	0	0	0
				-	0	0	0	0	0
				Total	26	17	17	28	20

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		Maret			April	
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	2	3	3	3	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	7	0	0	0	5	5
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	9	7	8	9	7	8
			Kota Palopo	0	2	0	0	0	1
			-						
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	2	41	1	1	22	43
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0
			-						
Total			Makassar	20	51	12	13	34	56
			Kota Palopo	0	2	0	0	0	1
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	20	53	12	13	34	57

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		Mei			Juni	
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	0	0	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	5	9	9	9	3	3
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	8	7	6	5	6	4
			Kota Palopo	1	0	0	0	0	0
			-						
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	43	12	23	23	4	9
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0
			-						
Total			Makassar	56	28	38	37	13	16
			Kota Palopo	1	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	57	28	38	37	13	16

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		Juli			Agustus	
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	0	0	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	3	7	7	7	11	11
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	4	10	5	5	13	14
			Kota Palopo	0	2	1	1	0	1
			-						
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	9	2	5	4	2	2
			Kota Palopo	0		0		0	0
			-						
Total			Makassar	16	19	17	16	26	27
			Kota Palopo	0	2	1	1	0	1
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	16	21	18	17	26	28

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		September			Oktober	
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	0	11	11	11	2	2
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	11	0	0	0	4	4
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	13	7	8	7	9	10
			Kota Palopo	1	1	0	0	0	1
			-						
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	2	10	0	0	24	0
			Kota Palopo	0	0	0	0		
			-						
Total			Makassar	26	28	19	18	39	16
			Kota Palopo	1	1	0	0	0	1
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	27	29	19	18	39	17

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		November			
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	2	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	4	12	12	12	4
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	10	11	12	12	6
			Kota Palopo	1	0	2	2	0
			-					
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	0	26	35	35	8
			Kota Palopo					
			-					
Total			Makassar	16	49	59	59	18
			Kota Palopo	1	0	2	2	0
			-	0	0	0	0	0
			Total	17	49	61	61	18

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Desember		Total			RAP
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar	0	0	24	24	24	
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar	4	4	73	73	73	
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	14	14	108	98	96	
			Kota Palopo	0	0	6	6	6	
			-			0	0	0	
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar	33	33	153	153	152	
			Kota Palopo			0	0	0	
			-			0	0	0	
Total			Makassar	51	51	358	348	345	50
			Kota Palopo	0	0	6	6	6	0
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	51	51	364	354	351	50

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	K s,d TW I (Jan - Mar)		RAPK s,d TW II (Jan - Juni)			RAPK
				Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar						
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar						
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
Total			Makassar	104	48,08	159	179	88,83	219
			Kota Palopo	3	0,00	1	3	33,33	3
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	107	46,73	160	182	87,91	222

Lampiran 17

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	s,d TW III (Jan - Sept)		RAPK s,d TW IV (Jan - Des)		
				Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor	Surat	Makassar					
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat	Makassar					
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar					
			Kota Palopo					
			-					
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Makassar					
			Kota Palopo					
			-					
Total			Makassar	252	86,90	345	358	96,37
			Kota Palopo	6	50,00	6	6	100,00
			-	0	0	0	0	0
			Total	258	86,05	351	364	96,43

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

	No	UPT	Target		Januari												T	
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara		
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19
Makassar	18	Makassar	Tahun n		3								188731055	3		3	
			Carry over *			7					1	2	1231199000				
	19	Kota Palopo	Tahun n														
			Carry over *														
		Total per masing2 UPT	Makassar	0	3	7	0	0	0	0	1	2	1419930055	3	0	3	0
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL SELURUH UPT		0	3	7	0	0	0	0	1	2	1.419.930.055	3	0	3	0

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Februari					Maret							
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n						56.751.000	3	3			3			
		Carry over *													2	1
19	Kota Palopo	Tahun n														
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	0	0	56.751.000	3	3	0	0	3	0	2	1
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	0	0	56.751.000	3	3	0	0	3	0	2	1

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	April												
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara		
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19
18	Makassar	Tahun n		57.464.370	1					3			13.010.850	1			
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n															
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	57.464.370	1	0	0	0	0	3	0	0	13.010.850	1	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	57.464.370	1	0	0	0	0	3	0	0	13.010.850	1	0	0	0

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Mei					Juni							
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n				3		39.000.000	6	2	2					
		Carry over *														
19	Kota Palopo	Tahun n														
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	3	0	39.000.000	6	2	2	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	3	0	39.000.000	6	2	2	0	0	0	0	0

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

Juli

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Juli											
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	SPDP
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				
18	Makassar	Tahun n		34.958.000					2					1	1	1
		Carry over *														
19	Kota Palopo	Tahun n												1	1	1
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	34.958.000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	34.958.000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Agustus						September							
				Tahap penanganan perkara					Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n				2			24.000.000	2	2	2		1			3
		Carry over *															1
19	Kota Palopo	Tahun n			0	0	0	0	16125000	0	0	0	0	1	0	0	0
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	2	0	0	24.000.000	2	2	2	0	1	0	0	4
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	16.125.000	0	0	0	0	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	2	0	0	40.125.000	2	2	2	0	2	0	0	4

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Oktober								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)				
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara										
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan		Jumlah kasus	Jumlah Perkara	SPDP	P18/P19
18	Makassar	Tahun n		92.811.000					1	2	1						
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n															
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	92.811.000	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	92.811.000	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		November					Desember								
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
18	Makassar	Tahun n		1		2			1					1	2		30.600.000
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n			1										1		
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	30.600.000
		Kota Palopo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	30.600.000

Lampiran 18

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Total								
				Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
						SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
18	Makassar	Tahun n		21	8	8	0	8	8	8	3	537.326.275
		Carry over *		0	7	0	0	0	0	3	4	1.231.199.000
19	Kota Palopo	Tahun n		1	1	1	0	1	1	1	0	16.125.000
		Carry over *		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	21	15	8	0	8	8	11	7	1.768.525.275
		Kota Palopo	0	1	1	1	0	1	1	1	0	16.125.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	22	16	9	0	9	9	12	7	1.784.650.275

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM di MAKASSAR

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret		April	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
	1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	21	21	15	15	11	11	0	0
				Kota Palopo	10	0	19	4	10	1	0	4
				-								
				TOTAL	31	21	34	19	21	12	0	4
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	2	2	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	4	2	1	1	0	0
				-								
				TOTAL	0	0	6	4	1	1	0	0
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Makassar	3	3	0	0	1	1	0	0
				Kota Palopo	0	0	2	0	4	1	0	0
				-								
				TOTAL	3	3	2	0	5	2	0	0
			Pangan	Makassar	6	6	12	12	8	8	2	2
				Kota Palopo	10	9	13	2	8	2	0	14
				-								
				TOTAL	16	15	25	14	16	10	2	16
				Makassar	30	30	29	29	20	20	2	2
				Kota Palopo	20	9	38	8	23	5	0	18
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	50	39	67	37	43	25	2	20
	2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	3	0	0	0	0	0
				-								
				TOTAL	0	0	3	0	0	0	0	0
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	1	0	0	0	0	1	5	0
				-								
				TOTAL	1	0	0	0	0	1	5	0
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	1	0
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	0
			Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	2	0
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	2	0

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret		April	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
Makassar			Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
				Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	1	0	3	0	0	1	8	0
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	1	0	3	0	0	1	8	0
	3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar	2	0	0	0	4	0	0	0
				Kota Palopo	2	0	2	0	2	0	0	0
				-								
				TOTAL	4	0	2	0	6	0	0	0
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	6	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	2	0	2	1	2	1	1	1
				-								
				TOTAL	2	0	8	1	2	1	1	1
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	12	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	2	0	2	1	2	1	1	1
				-								
				TOTAL	2	0	14	1	2	1	1	1
			Kosmetik	Makassar	0	0	3	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	2	0	2	0	2	1	1	1
				-								
				TOTAL	2	0	5	0	2	1	1	1
			Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	2	0	2	0	2	1	1	0
				-								
				TOTAL	2	0	2	0	2	1	1	0
				Makassar	2	0	21	0	4	0	0	0
				Kota Palopo	10	0	10	2	10	4	4	3
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	12	0	31	2	14	4	4	3
	4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0		
				Kota Palopo								
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0		
				Kota Palopo								
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0		
				Kota Palopo								
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	0		
				Kota Palopo								
				-								

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret		April	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	2	2
				Kota Palopo			1	1				
				-								
				TOTAL	0	0	1	1	0	0	2	2
				Makassar	0	0	0	0	0	0	2	2
				Kota Palopo	0	0	1	1	0	0	0	0
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	0	0	1	1	0	0	2	2
	TOTAL			**Makassar**	**32**	**30**	**50**	**29**	**24**	**20**	**4**	**4**
				Kota Palopo	**31**	**9**	**52**	**11**	**33**	**10**	**12**	**21**
				-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				total	**63**	**39**	**102**	**40**	**57**	**30**	**16**	**25**

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Mei		Juni		Juli		Agustus	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksan akan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	3	3	12	12	9	9
			Kota Palopo	5	16	17	17	15	12	18	0
			-								
			TOTAL	5	16	20	20	27	24	27	9
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	4	4	5	5	2	2
			Kota Palopo	0	2	4	3	4	0	0	0
			-								
			TOTAL	0	2	8	7	9	5	2	2
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	2	2	1	0	1	0
			-								
			TOTAL	0	0	2	2	1	0	1	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	11	11	8	8	4	4
			Kota Palopo	0	5	6	3	1	0	8	0
			-								
			TOTAL	0	5	17	14	9	8	12	4
		Pangan	Makassar	0	0	6	6	10	10	18	18
			Kota Palopo	0	2	26	3	21	2	22	**7**
			-								
			TOTAL	0	2	32	9	31	12	40	25
			Makassar	0	0	24	24	35	35	33	33
			Kota Palopo	5	25	55	28	42	14	49	7
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	5	25	79	52	77	49	82	40
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksan akan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	0	0		3		
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	3	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	2	2	0	0
			Kota Palopo	0	0	2	0	1	7	2	
			-								
			TOTAL	0	0	2	0	3	9	2	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	0	0		1		
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	2	2	1	1	0	0
			Kota Palopo	0	0	1	0		3		
			-								
			TOTAL	0	0	3	2	1	4	0	0

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Mei		Juni		Juli		Agustus	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
		Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	1	1
			Kota Palopo	0	0	0	0				
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	1
			Makassar	0	0	2	2	3	3	1	1
			Kota Palopo	0	0	3	0	1	14	2	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	5	2	4	17	3	1
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	2	0	2	0	2	0
			-								
			TOTAL	0	0	2	0	2	0	2	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	1	1	0	0
			Kota Palopo	1	0	2	0	2	1	2	1
			-								
			TOTAL	1	0	2	0	3	2	2	1
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	1	0	2	0	2	1	2	1
			-								
			TOTAL	1	0	2	0	2	1	2	1
		Kosmetik	Makassar	0	0	1	1	2	2	0	0
			Kota Palopo	1	2	2	2	2	1	2	0
			-								
			TOTAL	1	2	3	3	4	3	2	0
		Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	1	1
			Kota Palopo	1	0	2	0	2	3	2	2
			-								
			TOTAL	1	0	2	0	2	3	3	3
			Makassar	0	0	1	1	3	3	1	1
			Kota Palopo	4	2	10	2	10	6	10	4
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	4	2	11	3	13	9	11	5
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar								
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar								
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar								
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Makassar								
			Kota Palopo								
			-								

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Mei		Juni		Juli		Agustus	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Makassar								
			Kota Palopo					3	3		
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	3	3	0	0
			Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	0	0	3	3	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	3	3	0	0
TOTAL			**Makassar**	**0**	**0**	**27**	**27**	**41**	**41**	**35**	**35**
			Kota Palopo	**9**	**27**	**68**	**30**	**56**	**37**	**61**	**11**
			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			total	**9**	**27**	**95**	**57**	**97**	**78**	**96**	**46**

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	September		Oktober		November		Desem
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	10	10	2	2	3	3	4
			Kota Palopo	19	27	14	12	9	4	
			-							
			TOTAL	29	37	16	14	12	7	4
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	6	6	2	2	0
			Kota Palopo	0	4	1	1	2	1	
			-							
			TOTAL	0	4	7	7	4	3	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	3	3	0
			Kota Palopo	3	3	2	1	2	3	
			-							
			TOTAL	3	3	2	1	5	6	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	1	1	4	4	0
			Kota Palopo	1	10	9	4	7	7	2
			-							
			TOTAL	1	10	10	5	11	11	2
		Pangan	Makassar	1	1	9	9	13	13	12
			Kota Palopo	18	38	20	10	11	8	12
			-							
			TOTAL	19	39	29	19	24	21	24
			Makassar	11	11	18	18	25	25	16
			Kota Palopo	41	82	46	28	31	23	14
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	52	93	64	46	56	48	30
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo					5	0	2
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	5	0	2
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	September		Oktober		November		Desem
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*
		Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
			Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	0	0	5	0	2
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	5	0	2
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar	3	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	2	0	2		2		2
			-							
			TOTAL	5	0	2	0	2	0	2
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	2
			Kota Palopo	2	1	2		2		2
			-							
			TOTAL	2	1	2	0	2	0	4
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	2	1	2		2	0	2
			-							
			TOTAL	2	1	2	0	2	0	2
		Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	0	1
			Kota Palopo	2	0	2		2	2	2
			-							
			TOTAL	2	0	2	0	2	2	3
		Pangan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	2	0	2		2		2
			-							
			TOTAL	2	0	2	0	2	0	2
			Makassar	3	0	0	0	0	0	3
			Kota Palopo	10	2	10	0	10	2	10
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	13	2	10	0	10	2	13
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	September		Oktober		November		Desem
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Makassar							2
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	2
			Makassar	0	0	0	0	0	0	2
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL			**Makassar**	**14**	**11**	**18**	**18**	**25**	**25**	**21**
			Kota Palopo	**51**	**84**	**56**	**28**	**46**	**25**	**26**
			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			total	**65**	**95**	**74**	**46**	**71**	**50**	**47**

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	ber	Total		RAPK s,d TW I (Jan - Mar)			RAF
				TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	4	90	90				
			Kota Palopo		136	97				
			-		0	0				
			TOTAL	4	226	187				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	21	21				
			Kota Palopo		16	14				
			-		0	0				
			TOTAL	0	37	35				
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	3	3				
			Kota Palopo		11	9				
			-		0	0				
			TOTAL	0	14	12				
		Kosmetik	Makassar	0	32	32				
			Kota Palopo	1	40	31				
			-		0	0				
			TOTAL	1	72	63				
		Pangan	Makassar	12	97	97				
			Kota Palopo	5	161	102				
			-		0	0				
			TOTAL	17	258	199				
			Makassar	16	243	243	79	79	100,00	105
			Kota Palopo	6	364	253	22	81	27,16	93
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	22	607	496	101	160	63,13	198
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	0	0	0				
			Kota Palopo		3	3				
			-		0	0				
			TOTAL	0	3	3				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	2	2				
			Kota Palopo	0	18	8				
			-		0	0				
			TOTAL	0	20	10				
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0				
			Kota Palopo		1	1				
			-		0	0				
			TOTAL	0	1	1				
		Kosmetik	Makassar	0	3	3				
			Kota Palopo		3	3				
			-		0	0				
			TOTAL	0	6	6				

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	ber	Total		RAPK s,d TW I (Jan - Mar)			RAP
				TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)
		Pangan	Makassar	0	1	1				
			Kota Palopo		0	0				
			-		0	0				
			TOTAL	0	1	1				
			Makassar	0	6	6	0	0	0	2
			Kota Palopo	0	25	15	1	4	25,00	1
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	31	21	1	4	25,00	3
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar	0	9	0				
			Kota Palopo		20	0				
			-		0	0				
			TOTAL	0	29	0				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	9	1				
			Kota Palopo	1	22	7				
			-		0	0				
			TOTAL	1	31	8				
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	12	0				
			Kota Palopo	1	22	7				
			-		0	0				
			TOTAL	1	34	7				
		Kosmetik	Makassar	0	7	3				
			Kota Palopo		22	9				
			-		0	0				
			TOTAL	0	29	12				
		Pangan	Makassar		1	1				
			Kota Palopo		22	6				
			-		0	0				
			TOTAL	0	23	7				
			Makassar	0	38	5	0	27	0,00	1
			Kota Palopo	2	108	29	6	30	20,00	13
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	2	146	34	6	57	10,53	14
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar		0	0				
			Kota Palopo		0	0				
			-		0	0				
			TOTAL	0	0	0				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar		0	0				
			Kota Palopo		0	0				
			-		0	0				
			TOTAL	0	0	0				
		Suplemen Kesehatan	Makassar		0	0				
			Kota Palopo		0	0				
			-		0	0				
			TOTAL	0	0	0				
		Kosmetik	Makassar		0	0				
			Kota Palopo		0	0				
			-		0	0				

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	ber	Total		RAPK s,d TW I (Jan - Mar)			RAF
				TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)
			TOTAL	0	0	0				
		Pangan	Makassar	2	4	4				
			Kota Palopo		4	4				
			-		0	0				
			TOTAL	2	8	8				
			Makassar	2	4	4	0	0	0	2
			Kota Palopo	0	4	4	1	1	100,00	1
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	2	8	8	1	1	100,00	3
TOTAL			**Makassar**	**18**	**291**	**258**			50,00	
			Kota Palopo	**8**	**501**	**301**			43,04	
			-	**0**	**0**	**0**			#DIV/0!	
			total	**26**	**792**	**559**			49,66	

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	K s,d TW II (Jan - Juni)		RAPK s,d TW III (Jan - Sept)			RAPK s,d TW IV (Jan - D	
				Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Suplemen Kesehatan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Kosmetik	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Pangan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
			Makassar	105	100,00	184	184	100,00	243	243
			Kota Palopo	141	65,96	196	273	71,79	253	364
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	246	80,49	380	457	83,15	496	607
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Suplemen Kesehatan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Kosmetik	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	K s,d TW II (Jan - Juni)		RAPK s,d TW III (Jan - Sept)			RAPK s,d TW IV (Jan - D	
				Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
		Pangan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
			Makassar	2	100,00	6	6	100,00	6	6
			Kota Palopo	15	6,67	15	18	83,33	15	25
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	17	17,65	21	24	87,50	21	31
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Suplemen Kesehatan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Kosmetik	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Pangan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
			Makassar	28	3,57	5	35	14,29	5	38
			Kota Palopo	48	27,08	25	78	32,05	29	108
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	76	18,42	30	113	26,55	34	146
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Suplemen Kesehatan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
		Kosmetik	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	K s,d TW II (Jan - Juni)		RAPK s,d TW III (Jan - Sept)			RAPK s,d TW IV (Jan - D	
				Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
			TOTAL							
		Pangan	Makassar							
			Kota Palopo							
			-							
			TOTAL							
			Makassar	2	100,00	2	2	100,00	4	4
			Kota Palopo	1	100,00	4	4	100,00	4	4
			-	0	0	0	0	0	0	0
			Total	3	100,00	6	6	100,00	8	8
TOTAL			**Makassar**		75,89			78,57		
			Kota Palopo		49,93			71,79		
			-		#DIV/0!			#DIV/0!		
			total		54,14			74,30		

Lampiran 18

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

A, keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	es) % Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Suplemen Kesehatan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Kosmetik	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Pangan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
			Makassar	100,00
			Kota Palopo	69,51
			-	0
			Total	81,71
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Suplemen Kesehatan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Kosmetik	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	es) % Rek yang dilaksanakan (capaian)
		Pangan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
			Makassar	100,00
			Kota Palopo	60,00
			-	0
			Total	67,74
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Suplemen Kesehatan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Kosmetik	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Pangan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
			Makassar	13,16
			Kota Palopo	26,85
			-	0
			Total	23,29
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Suplemen Kesehatan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
		Kosmetik	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	es) % Rek yang dilaksanakan (capaian)
			TOTAL	
		Pangan	Makassar	
			Kota Palopo	
			-	
			TOTAL	
			Makassar	100,00
			Kota Palopo	100,00
			-	0
			Total	100,00
TOTAL			**Makassar**	78,29
			Kota Palopo	64,09
			-	#DIV/0!
			total	68,19

Lampiran 19

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM di MAKASSAR

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret		April	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
Makassar	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Makassar	17	0	12	0	4	1	0	0
				Kota Palopo	0	0	4	0	1	0	4	1
				-								
				TOTAL	17	0	16	0	5	1	4	1
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	2	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	2	0	1	0	0	
				-								
				TOTAL	0	0	4	0	1	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Makassar	3	0	0	0	1	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	1	0	0	0
				-								
				TOTAL	3	0	0	0	2	0	0	0
			Pangan	Makassar	5	0	10	4	7	2	2	2
				Kota Palopo	9	0	2	0	2	0	14	6
				-								
				TOTAL	14	0	12	4	9	2	16	8
				Makassar	25	0	24	4	12	3	2	2
				Kota Palopo	9	0	8	0	5	0	18	7
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	34	0	32	4	17	3	20	9
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Makassar	4	0	3	2	3	2	0	2
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0		
				-								
				TOTAL	4	0	3	2	3	2	0	2
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0		
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0		
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kosmetik	Makassar	0	0	0	0	0	0		

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Januari		Februari		Maret		April	
					Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0		
				-								
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pangan	Makassar	1	0	2	0	1	0	0	0
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0		
				-								
				TOTAL	1	0	2	0	1	0	0	0
				Makassar	5	0	5	2	4	2	0	2
				Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0
				-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	5	0	5	2	4	2	0	2
	TOTAL			**Makassar**	**30**	**0**	**29**	**6**	**16**	**5**	**2**	**4**
				Kota Palopo	**9**	**0**	**8**	**0**	**5**	**0**	**18**	**7**
				-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				total	**39**	**0**	**37**	**6**	**21**	**5**	**20**	**11**

Lampiran 19

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Mei		Juni		Juli		Agustus	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Makassar	0	1	3	1	12	5	9	9
			Kota Palopo	16	3	17	6	12	17		5
			-								
			TOTAL	16	4	20	7	24	22	9	14
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	4	0	5	2	2	1
			Kota Palopo	2		3	0		8		
			-								
			TOTAL	2	0	7	0	5	10	2	1
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo	0	0	2	0		2		
			-								
			TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	11	0	8	2	4	7
			Kota Palopo	5	0	3	1		4		
			-								
			TOTAL	5	0	14	1	8	6	4	7
		Pangan	Makassar	0	0	6	2	4	2	14	6
			Kota Palopo	2	0	3	0	2	12	7	1
			-								
			TOTAL	2	0	9	2	6	14	21	7
			Makassar	0	1	24	3	29	11	29	23
			Kota Palopo	25	3	28	7	14	43	7	6
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	25	4	52	10	43	54	36	29
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo					1	1	1	1
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	1	1	1	1
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Makassar								

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Mei		Juni		Juli		Agustus	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Makassar	0	0	0	0	6	3	0	1
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	6	3	0	1
			Makassar	0	0	0	0	6	3	0	1
			Kota Palopo	0	0	0	0	1	1	1	1
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	7	4	1	2
TOTAL			**Makassar**	**0**	**1**	**24**	**3**	**35**	**14**	**29**	**24**
			Kota Palopo	**25**	**3**	**28**	**7**	**15**	**44**	**8**	**7**
			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			total	**25**	**4**	**52**	**10**	**50**	**58**	**37**	**31**

Lampiran 19

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	September		Oktober		November		Desember	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Makassar	7	2	2	0	3	0	4	17
			Kota Palopo	27	12	12	11	4	3		
			-								
			TOTAL	34	14	14	11	7	3	4	17
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	6	0	2	0	0	0
			Kota Palopo	4		1	1	1	1		
			-								
			TOTAL	4	0	7	1	3	1	0	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	3	0	0	0
			Kota Palopo	3	3	1	1	3	2		
			-								
			TOTAL	3	3	1	1	6	2	0	0
		Kosmetik	Makassar	0	0	1	1	4	0	0	0
			Kota Palopo	10	5	4	4	7	6	1	1
			-								
			TOTAL	10	5	5	5	11	6	1	1
		Pangan	Makassar	1	1	4	0	13	0	9	16
			Kota Palopo	38	27	10	9	8	5	5	5
			-								
			TOTAL	39	28	14	9	21	5	14	21
			Makassar	8	3	13	1	25	0	13	33
			Kota Palopo	82	47	28	26	23	17	6	6
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	90	50	41	27	48	17	19	39
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Makassar	0	0	0	0	0	1	0	3
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	3
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Makassar								

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	September		Oktober		November		Desember	
				Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Makassar	4	0	5	0	0	0	3	1
			Kota Palopo								
			-								
			TOTAL	4	0	5	0	0	0	3	1
			Makassar	4	0	5	0	0	1	3	4
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	4	0	5	0	0	1	3	4
TOTAL			**Makassar**	**12**	**3**	**18**	**1**	**25**	**1**	**16**	**37**
			Kota Palopo	**82**	**47**	**28**	**26**	**23**	**17**	**6**	**6**
			-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			total	**94**	**50**	**46**	**27**	**48**	**18**	**22**	**43**

Lampiran 19

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Total		RAPK s,d TW I (Jan - Mar)			RAPK s,d TW II (Jan - Juni)		
				Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Makassar	73	36						
			Kota Palopo	97	58						
			-	0	0						
			TOTAL	170	94						
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	21	3						
			Kota Palopo	14	10						
			-	0	0						
			TOTAL	35	13						
		Suplemen Kesehatan	Makassar	3	0						
			Kota Palopo	9	8						
			-	0	0						
			TOTAL	12	8						
		Kosmetik	Makassar	32	10						
			Kota Palopo	31	21						
			-	0	0						
			TOTAL	63	31						
		Pangan	Makassar	75	35						
			Kota Palopo	102	65						
			-	0	0						
			TOTAL	177	100						
			Makassar	204	84	7	61	11,48	13	87	14,94
			Kota Palopo	253	162	0	22	0,00	17	93	18,28
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	457	246	7	83	8,43	30	180	16,67
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Makassar	10	10						
			Kota Palopo	2	2						
			-	0	0						
			TOTAL	12	12						
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar	0	0						
			Kota Palopo	0	0						
			-	0	0						
			TOTAL	0	0						
		Suplemen Kesehatan	Makassar	0	0						
			Kota Palopo	0	0						
			-	0	0						
			TOTAL	0	0						
		Kosmetik	Makassar	0	0						

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Total		RAPK s,d TW I (Jan - Mar)			RAPK s,d TW II (Jan - Juni)		
				Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
			Kota Palopo	0	0						
			-	0	0						
			TOTAL	0	0						
		Pangan	Makassar	22	5						
			Kota Palopo	0	0						
			-	0	0						
			TOTAL	22	5						
			Makassar	32	15	4	14	28,57	6	14	42,86
			Kota Palopo	2	2	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	34	17	4	14	28,57	6	14	42,86
TOTAL			**Makassar**	**236**	**99**			20,02			28,90
			Kota Palopo	**255**	**164**			0,00			18,28
			-	**0**	**0**			#DIV/0!			#DIV/0!
			total	**491**	**263**			18,50			29,76

Lampiran 19

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAK

B, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s,d TW III (Jan - Sept)			RAPK s,d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Suplemen Kesehatan	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Kosmetik	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Pangan	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
			Makassar	50	153	32,68	84	204	41,18
			Kota Palopo	113	196	57,65	162	253	64,03
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	163	349	46,70	246	457	53,83
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Suplemen Kesehatan	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Kosmetik	Makassar						

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s,d TW III (Jan - Sept)			RAPK s,d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
		Pangan	Makassar						
			Kota Palopo						
			-						
			TOTAL						
			Makassar	10	24	41,67	15	32	46,88
			Kota Palopo	2	2	100,00	2	2	100,00
			-	0	0	0	0	0	0
			Total	12	26	46,15	17	34	50,00
TOTAL			**Makassar**			37,17			44,03
			Kota Palopo			78,83			82,02
			-			#DIV/0!			#DIV/0!
			total			46,43			51,91

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

	No	UPT	Target		Januari												T	
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara		
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19
Makassar	18	Makassar	Tahun n		3								188731055	3		3	
			Carry over *			7					1	2	1231199000				
	19	Kota Palopo	Tahun n														
			Carry over *														
		Total per masing2 UPT	Makassar	0	3	7	0	0	0	0	1	2	1419930055	3	0	3	0
			Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL SELURUH UPT		0	3	7	0	0	0	0	1	2	1.419.930.055	3	0	3	0

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Februari					Maret							
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n						56.751.000	3	3			3			
		Carry over *													2	1
19	Kota Palopo	Tahun n														
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	0	0	56.751.000	3	3	0	0	3	0	2	1
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	0	0	0	56.751.000	3	3	0	0	3	0	2	1

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	April												
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara		
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19
18	Makassar	Tahun n		57.464.370	1					3			13.010.850	1			
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n															
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	57.464.370	1	0	0	0	0	3	0	0	13.010.850	1	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	57.464.370	1	0	0	0	0	3	0	0	13.010.850	1	0	0	0

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Mei					Juni							
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n				3		39.000.000	6	2	2					
		Carry over *														
19	Kota Palopo	Tahun n														
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	3	0	39.000.000	6	2	2	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	3	0	39.000.000	6	2	2	0	0	0	0	0

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

Juli

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Juli								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)			
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara							Jumlah kasus	Jumlah Perkara	SPDP
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				
18	Makassar	Tahun n		34.958.000					2					1	1	1
		Carry over *														
19	Kota Palopo	Tahun n												1	1	1
		Carry over *														
	Total per masing2 UPT	**Makassar**	0	34.958.000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		**0**	**34.958.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Agustus						September							
				Tahap penanganan perkara					Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					
				P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan
18	Makassar	Tahun n				2			24.000.000	2	2	2		1			3
		Carry over *															1
19	Kota Palopo	Tahun n			0	0	0	0	16125000	0	0	0	0	1	0	0	0
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	0	0	2	0	0	24.000.000	2	2	2	0	1	0	0	4
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	16.125.000	0	0	0	0	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	0	0	2	0	0	40.125.000	2	2	2	0	2	0	0	4

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Oktober								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)				
					Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara							Jumlah kasus	Jumlah Perkara		
							SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19
18	Makassar	Tahun n		92.811.000					1	2	1						
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n															
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	92.811.000	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
		Kota Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	92.811.000	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		November					Desember								
				Tahap penanganan perkara				Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan				SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
18	Makassar	Tahun n		1		2			1					1	2		30.600.000
		Carry over *															
19	Kota Palopo	Tahun n			1										1		
		Carry over *															
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	30.600.000
		Kota Palopo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	30.600.000

Lampiran 20

Intelijen dan Penyidikan di bida

No	UPT	Target		Total								
				Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
						SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II	putusan pengadilan	
18	Makassar	Tahun n		21	8	8	0	8	8	8	3	537.326.275
		Carry over *		0	7	0	0	0	0	3	4	1.231.199.000
19	Kota Palopo	Tahun n		1	1	1	0	1	1	1	0	16.125.000
		Carry over *		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total per masing2 UPT	Makassar	0	21	15	8	0	8	8	11	7	1.768.525.275
		Kota Palopo	0	1	1	1	0	1	1	1	0	16.125.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SELURUH UPT		0	22	16	9	0	9	9	12	7	1.784.650.275

Lampiran 21

Persentase Keberhasilan Penindakan

UPT		Tahapan	s.d TW I (Jan - Maret)											s.d TW II (Jan - Ju					
			Target		Realisasi		Koefisien	Koefisien	Bobot	Nilai	Total Nilai	Capaian	% keberhasilan	Target		Realisasi		Koefisien	Koefisien
			Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara Carry	Tahun	Carry Over		Realisasi	Realisasi	perkara	penindakan	Perkara	Perkara	Perkara	Perkara	Tahun	Carry Over
Makassar	Makassar	**SPDP**	8	7	0		1,00		0,15	7,50%	62,50%	66,67%	41,67%	8	7	2		1,00	
		Tahap I			3	0	1,00	0,70	0,4	40,00%						0	0	0,60	0,58
		P21			0	4	0,00	0,70	0,3	12,35%						0	4	0,60	0,58
		Tahap II			0	3	0,00	0,30	0,15	2,65%						3	3	0,60	0,25
		Total	8	7	3	7								8	7	5	7		
	Kota Palopo	**SPDP**		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%		0			0	
		Tahap I					0	0	0,4	0%								0	0
		P21					0	0	0,3	0%								0	0
		Tahap II					0	0	0,15	0%								0	0
		Total	0	0	0	0								0	0	0	0		
	-	**SPDP**		0			0		0,15	0%	0,00%	0	0,00%		0			0	
		Tahap I					0	0	0,4	0%								0	0
		P21					0	0	0,3	0%								0	0
		Tahap II					0	0	0,15	0%								0	0
		Total	0	0	0	0								0	0	0	0		
	TOTAL	**SPDP**	8	7	0		1,00		0,15	15,00%	70,00%	66,67%	46,67%	8	7	2		1,00	
		Tahap I			3	0	1,00	0,70	0,4	40,00%						0	0	0,60	0,58
		P21			0	4	0,00	0,70	0,3	12,35%						0	4	0,60	0,58
		Tahap II			0	3	0,00	0,30	0,15	2,65%						3	3	0,60	0,25
		Total	8	7	3	7								8	7	5	7		

Lampiran 21

Persentase Keberl

UPT		Tahapan	ni)					s.d TW III (Jan - Sept)														
			Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun	Koefisien Carry	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realis
								Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara								Perkara	Perkara	Perkara s.d
Makassar	Makassar	**SPDP**	0,15	15,00%	75,37%	80,00%	60,29%	8	7	0		1,00		0,15	15,00%	87,73%	100,00%	87,73%	8	7	0
		Tahap I	0,4	29,89%						2	0	1,00	0,47	0,4	40,00%						0
		P21	0,3	22,42%						2	3	0,75	0,47	0,3	24,89%						0
		Tahap II	0,15	8,05%						4	4	0,50	0,27	0,15	7,84%						8
		Total						8	7	8	7								8	7	8
	Kota Palopo	**SPDP**	0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%	1	0			1,00		0,15	15,00%	55,00%	100,00%	55,00%	1	0	
		Tahap I	0,4	0%						1		1,00	0,00	0,4	40,00%						0
		P21	0,3	0%								0,00	0,00	0,3	0,00%						0
		Tahap II	0,15	0%								0,00	0,00	0,15	0,00%						1
		Total						1	0	1	0								1	0	1
	-	**SPDP**	0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%		0	
		Tahap I	0,4	0%								0	0	0,4	0%						
		P21	0,3	0%								0	0	0,3	0%						
		Tahap II	0,15	0%								0	0	0,15	0%						
		Total						0	0	0	0								0	0	0
	TOTAL	**SPDP**	0,15	15,00%	75,37%	80,00%	60,29%	9	7	0		1,00		0,15	15,00%	85,29%	100,00%	85,29%	9	7	0
		Tahap I	0,4	29,89%						3	0	1,00	0,44	0,4	40,00%						0
		P21	0,3	22,42%						2	3	0,67	0,44	0,3	23,04%						0
		Tahap II	0,15	8,05%						4	4	0,44	0,25	0,15	7,25%						9
		Total						9	7	9	7								9	7	9

Lampiran 21

Persentase Keberl

UPT		Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)							
			asi Perkara	Koefisien Tahun	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Makassar	Makassar	SPDP		1,00		0,15	15,00%	97,95%	100,00%	97,95%
		Tahap I	0	1,00	0,47	0,4	40,00%			
		P21	3	1,00	0,47	0,3	30,00%			
		Tahap II	4	1,00	0,27	0,15	12,95%			
		Total	7							
	Kota Palopo	SPDP		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Tahap I		1,00	0,00	0,4	40,00%			
		P21		1,00	0,00	0,3	30,00%			
		Tahap II		1,00	0,00	0,15	15,00%			
		Total	0							
	-	SPDP		0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
		Tahap I		0	0	0,4	0%			
		P21		0	0	0,3	0%			
		Tahap II		0	0	0,15	0%			
		Total	0							
	TOTAL	SPDP		1,00		0,15	15,00%	98,04%	100,00%	98,04%
		Tahap I	0	1,00	0,44	0,4	40,00%			
		P21	3	1,00	0,44	0,3	30,00%			
		Tahap II	4	1,00	0,25	0,15	13,04%			
		Total	7							

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

R POM DI MAKASSAR